



Australian Government



LAPORAN TAHUNAN KOMPAK

Januari - Desember 2019

KOMPAK
*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

LAPORAN TAHUNAN KOMPAK

Januari - Desember 2019

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72,
Jakarta 10320 Indonesia

T: +62 21 8067 5000

F: +62 21 3190 3090

E: communications@kompak.or.id

www.kompak.or.id

LAPORAN TAHUNAN KOMPAK

Januari - Desember 2019

Daftar Isi

KINERJA: JANUARI-DESEMBER 2019	1
Ringkasan Eksekutif.....	2
Pencapaian Utama.....	2
Fokus Kerja KOMPAK Tahun 2019	5
Capaian Akhir (EOFO) dan Capaian Antara (IO) KOMPAK	9
Ikhtisar Kinerja KOMPAK 2019	11
Kemajuan Pelaksanaan Rencana Kerja.....	13
Hasil, Kegiatan dan Pemetaan Mitra.....	16
DAMPAK PEMBANGUNAN	23
Catatan tentang Pelaporan Hasil.....	24
Pengelolaan Keuangan Publik	25
Analisis Situasi	25
Instrumen dan Analisis Pengelolaan Keuangan Publik.....	26
Mekanisme Pendanaan dari Pemerintah Pusat.....	30
Pembiayaan Berbasis Kinerja	32
Dana Otonomi Khusus (Otsus).....	32
Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH).....	34
Analisis Situasi	34
Inisiatif Nasional	35
Inisiatif Daerah	36
Efektivitas Upaya PASH.....	40
Penguatan Kecamatan dan Desa	42
Analisis Situasi	42
Cakupan, Efektivitas dan Pelembagaan Model PTPD.....	43
Perencanaan dan Penganggaran Inklusif Desa.....	48
Inisiatif Penguatan Pemerintah Papua Barat dan Papua.....	52
Sistem Informasi Desa (SID).....	54
Analisis Situasi	54
Cakupan dan Pelembagaan Sistem Informasi Desa.....	54
Integrasi Sistem Informasi Desa dengan Basis Data Lainnya.....	57
Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Desa	57
Sistem Informasi Kecamatan dan Kabupaten	59

Akuntabilitas Sosial	60
Analisis Situasi	60
Kebijakan Nasional Tentang Akuntabilitas Sosial	61
Sekar Desa	61
Posko Aspirasi.....	62
Akademi Paradigta.....	63
Sepeda Keren.....	64
Keperantaraan Pasar	65
Analisis Situasi	65
Uji Coba Model Keperantaraan Pasar	66
Dukungan Perumusan Kebijakan Nasional Tentang Pengembangan Ekonomi Lokal	66
Kesehatan, Pendidikan dan Inovasi	68
Aplikasi Seluler dan <i>Dashboard</i> Layanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil	68
Layanan Kesehatan Daerah Terpencil Menggunakan <i>Drone</i>	68
Inisiatif untuk Mengatasi Jumlah Anak Tidak Bersekolah	69
Indikator untuk Rencana Aksi Nasional Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	70
Universitas Membangun Desa (UMD)	70
Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)	72
Analisis Kesenjangan Dan Peluang Kesetaraan Gender	72
Jalur Pertama: Program Khusus GESI	73
Jalur Kedua: Pengarusutamaan GESI.....	74
Agenda Penelitian.....	76
Daftar Penelitian dan Kajian Evaluasi	76
LAPORAN KEUANGAN.....	81



KINERJA:
JANUARI-DESEMBER
2019



Ringkasan Eksekutif

PENCAPAIAN UTAMA

KOMPAK memasuki tahun keenam dari delapan tahun periode investasi program ini. KOMPAK mulai beroperasi sejak Januari 2015 dan akan didanai hingga pertengahan 2022, dengan jumlah personel 144 orang dan pengeluaran tahunan sebesar \$20,5 juta¹ (tidak termasuk biaya manajemen). KOMPAK melaksanakan kegiatan di tujuh provinsi, 24 kabupaten* dan berkantor pusat di Jakarta.

KOMPAK bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan menerima manfaat dari peningkatan penyediaan layanan dasar dan kesempatan ekonomi. Dalam upaya mencapai tujuan ini, KOMPAK mendukung berbagai inisiatif peningkatan kapabilitas pemerintah – baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa – dalam pengelolaan dan penyediaan layanan dasar serta pengembangan ekonomi lokal. Perencanaan dan koordinasi yang kuat, pemerintah daerah yang efektif dan inklusif, serta sistem pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada kinerja dan efisien menjadi bagian yang tak terpisahkan.

KOMPAK menjalin kemitraan dengan empat kementerian di tingkat pemerintah pusat: Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional); Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT); dan Kementerian Keuangan.

KOMPAK telah mencapai kemajuan signifikan dalam melembagakan model yang berhasil diuji coba ke dalam sistem pemerintahan daerah dan berupaya menggunakan pengalaman ini untuk mencapai kemajuan di tingkat nasional. Pada November 2019, sebuah Tim Penasihat Strategis Independen (ISAT) melaporkan bahwa “KOMPAK terus mengalami kemajuan pesat dalam mencapai tujuan programnya dan membangun budaya kinerja yang kuat”. Laporan ini juga menyoroti bahwa meskipun “kemajuan cukup baik dalam hal keberlanjutan ... ini tetap merupakan tantangan terbesar bagi DFAT dan KOMPAK dalam dua tahun tersisa dari fasilitas ini.”

¹ Dalam laporan ini, \$1 = RP9.500. Setiap tanda \$ merujuk pada dollar Australia (\$) kecuali dinyatakan lain.

FOKUS KERJA KOMPAK TAHUN 2019

- **1 Pengelolaan keuangan publik**
 Menerapkan instrumen dan analisis pengelolaan keuangan publik guna capaian penyelenggaraan layanan dasar

- **2 Penguatan adminduk dan statistik hayati**
 Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen identitas hukum dan kelengkapan data kependudukan

- **3 Penguatan kecamatan dan desa**
 Menjadikan kecamatan dan desa sebagai pusat tata kelola peningkatan kualitas layanan dasar

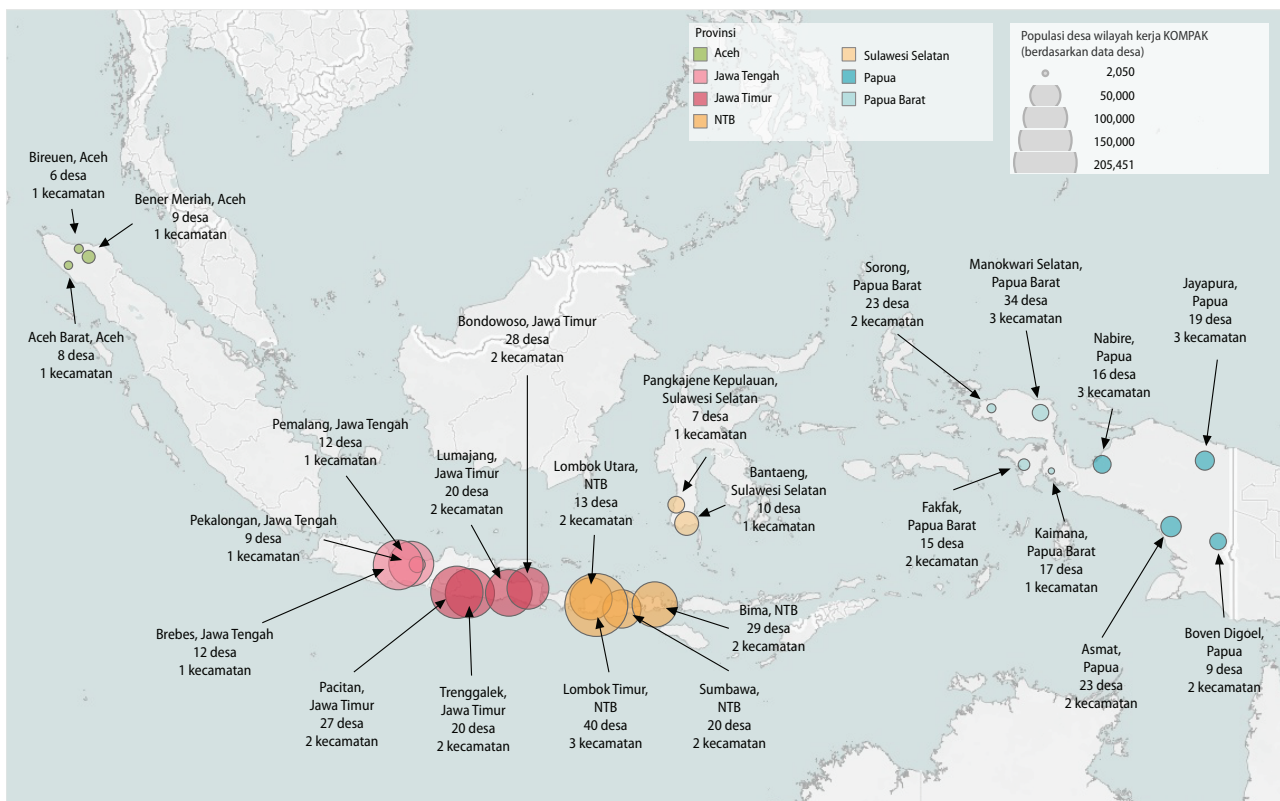
- **4 Sistem informasi desa**
 Mendorong pemanfaatan data untuk perencanaan dan penganggaran

- **5 Akuntabilitas sosial**
 Memperkuat akuntabilitas sosial guna meningkatkan kualitas penyediaan layanan

- **6 Keperantaraan pasar**
 Mendorong keperantaraan pasar untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal

- **7 Kesehatan, pendidikan dan inovasi**
 Mengembangkan dan menguji inovasi guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan dan layanan lainnya

WILAYAH KERJA KOMPAK: 7 PROVINSI, 24 KABUPATEN, 43 KECAMATAN, 426 DESA*



* Pada 2019, wilayah kerja KOMPAK mencakup 26 kabupaten. Menimbang faktor politik dan keamanan, kegiatan di Kabupaten Waropen dan Kabupaten Lanny Jaya akan diakhiri tahun 2020. Kedua kabupaten ini tidak termasuk dalam survei KOMPAK.

KOMPAK memfokuskan kerjanya pada upaya keberlanjutan dan pelembagaan. Fokus ini sangat jelas terlihat dalam hasil kerja KOMPAK yang selama ini mampu mengoptimalkan sumber daya pemerintah bagi masyarakat. Meski tidak mudah untuk diukur secara kuantitatif, tetapi investasi Pemerintah Indonesia terlihat dalam replikasi dan pelembagaan model-model yang dihasilkan KOMPAK serta melalui pendanaan pelatihan dan kegiatan secara bersama, antara lain:

- Penerapan dan pengembangan model yang dibangun oleh KOMPAK, berupa pembinaan teknis yang diberikan kecamatan kepada desa agar desa mampu lebih baik dalam merencanakan, mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya desa yang terbatas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Model ini dinamakan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dan telah direplikasi di 100 kecamatan dan dikembangkan ke tingkat nasional oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.
- Pengembangan dan implementasi sistem informasi desa di 339 desa dalam 24 kabupaten. Pemerintah desa dan kabupaten mendanai kebutuhan sumber daya manusia dan pengadaan, sedangkan KOMPAK memberikan berbagai pelatihan dan dukungan teknis. Penerapan sistem ini juga telah diperluas hingga mencakup desa-desa yang berada di 159 kecamatan lain di luar 43 kecamatan wilayah kerja KOMPAK. Pemerintah Provinsi Papua Barat bahkan telah berkomitmen akan menerapkan sistem ini untuk menghubungkan 1.742 desa.
- Rancangan dan pelembagaan model fasilitator Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH) desa yang didanai oleh pemerintah desa dan kabupaten. Model ini telah berkontribusi pada peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar sepuluh persen poin di kabupaten-kabupaten KOMPAK selama empat tahun terakhir berdasarkan laporan kajian PUSKAPA.

Banyak uji coba model telah menghasilkan pembelajaran yang digunakan untuk menetapkan strategi, pedoman dan peraturan di tingkat nasional, antara lain:

- Strategi Nasional PASH 2019-2024 untuk mempercepat perluasan cakupan kepemilikan identitas hukum. Strategi ini mendukung penerapan model fasilitator PASH desa, penggunaan data desa untuk layanan menjangkau masyarakat, dan kolaborasi dengan unit layanan (sekolah/klinik).
- Pedoman dan pelatihan yang diberikan oleh Kemendesa PDTT kepada pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitas sosial dan mendorong pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan. Kegiatan ini merupakan hasil kerja KOMPAK dan mitranya dalam uji coba model dan pelatihan penganggaran berbasis masyarakat, tata kelola desa, aspirasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan.
- Pengembangan sistem peringkat berbasis kinerja desa berskala nasional – berdasarkan uji coba KOMPAK di enam kabupaten – yang akan diimplementasikan secara nasional oleh Kementerian Keuangan. Sistem ini akan menjadi penopang diterapkannya pendanaan berbasis kinerja sebagai insentif bagi desa untuk meningkatkan pencapaian indikator layanan dasar.

RINGKASAN TEMUAN DAN REKOMENDASI TIM PENASIHAT STRATEGIS INDEPENDEN/ISAT (DESEMBER 2019)

ISAT melakukan peninjauan pada bulan Desember 2019 tepat setelah KOMPAK melaksanakan tahun pertama fase kedua KOMPAK. ISAT berfokus pada lima bidang: keberlanjutan, manajemen kinerja, akuntabilitas sosial, keselarasan dan kolaborasi dengan program DFAT serta keselarasan dengan prioritas Pemerintah Indonesia. Laporan ISAT menunjukkan bahwa:

“KOMPAK terus mengalami kemajuan pesat dalam mencapai tujuan programnya dan membangun budaya kinerja yang kuat. Secara keseluruhan, KOMPAK mengarah pada capaian yang positif, meskipun upaya transisi KOMPAK masih menunjukkan bukti yang bervariasi. Tantangan berikutnya bagi DFAT dan tim manajemen KOMPAK adalah memberikan dukungan dan insentif kepada tim untuk melanjutkan transisi tersebut - dan menjawab ‘apa langkah selanjutnya?’”

Rekomendasi utama:

- KOMPAK perlu memastikan tetap berfokus pada area kerja yang tetap akan berkelanjutan setelah berakhirnya KOMPAK.
- KOMPAK perlu menekankan lebih lanjut petikan pelajaran yang diperoleh dari kerja KOMPAK selama delapan tahun program KOMPAK berlangsung.
- Sistem manajemen kinerja KOMPAK dapat lebih diperkuat dengan mengidentifikasi baseline terbaru di area kerja KOMPAK dan meninjau capaian akhir yang realistis.
- KOMPAK perlu menunjukkan lebih banyak bukti adanya perubahan nyata dalam tata kelola pemerintah desa.
- KOMPAK perlu memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan/alokasi sumber daya dilakukan berdasarkan tujuan strategis pemerintah dan KOMPAK, bukan kepentingan jangka pendek para pemangku kepentingan.

FOKUS KERJA KOMPAK TAHUN 2019

Pengelolaan keuangan publik

KOMPAK telah berhasil mengintegrasikan standar pelayanan minimal (SPM) ke dalam rencana dan anggaran pembangunan tahunan dan jangka menengah di 20 kabupaten. Berdasarkan kajian nasional KOMPAK, diperlukan tambahan dana sekitar Rp130 triliun (\$14 miliar) agar semua kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dapat mencapai SPM. Sejalan dengan upaya mencapai SPM, kerangka kerja monitoring SPM nasional telah dikembangkan dan akan diimplementasikan awal tahun 2020.

Sistem Perencanaan Penganggaran Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) telah tersedia di 13 kabupaten dan empat provinsi. Selain itu, analisis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten telah selesai dilakukan di 14 kabupaten. Meskipun instrumen dan analisis pengelolaan keuangan publik ini membantu pemerintah memperoleh informasi yang lebih baik untuk mengambil keputusan, instrumen dan analisis ini perlu dikembangkan lagi agar dapat digunakan secara optimal dan diterapkan secara efektif. KOMPAK juga mendukung pemerintah Provinsi Aceh dan Papua untuk membangun sistem perencanaan dan penganggaran elektronik yang pertama kali terhubung langsung dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri.

KOMPAK membantu pemerintah kabupaten mendapat akses pendanaan yang lebih baik, serta merencanakan dan mengkoordinasikan mekanisme pendanaan dari pemerintah pusat. Dalam hal akses, KOMPAK menyelenggarakan pelatihan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan aplikasi KRISNA (untuk pengajuan DAK Fisik) untuk 51 pemerintah kabupaten dengan tujuan meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan mengajukan pembangunan infrastruktur penyedia layanan dasar. KOMPAK juga membantu menyusun dan merevisi indikator Dana Insentif Daerah (DID). Sehubungan dengan perencanaan dan koordinasi, hampir semua kabupaten (22 dari 24 kabupaten) mengadakan rapat koordinasi rutin untuk menyusun proposal DAK Fisik dan dua per tiga kabupaten secara aktif memonitor indikator DID dan menyusun rencana penggunaan DID. KOMPAK juga mempublikasikan empat catatan kebijakan yang mengkaji penetapan biaya dan penggunaan DAK Non-fisik berdasarkan analisis pengeluaran sepuluh kabupaten.

Di Papua dan Papua Barat, KOMPAK telah menyelesaikan evaluasi terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus). KOMPAK juga merupakan perancang utama dua program penting yang menggunakan Dana Otsus. ISAT menyimpulkan bahwa KOMPAK “telah membantu memperluas beberapa kegiatan unggulan dengan menggunakan dana dan sumber daya pemerintah daerah. Hal ini merupakan pencapaian besar bagi KOMPAK dan Australia.”

Penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati (PASH)

Berdasarkan laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahunan dan kajian KOMPAK-PUSKAPA, kabupaten wilayah kerja KOMPAK mencatat angka cakupan kepemilikan akta kelahiran yang lebih besar dari rata-rata nasional. Kajian ini menemukan bahwa kepemilikan dokumen identitas hukum (akta kelahiran, akta nikah dan kartu keluarga) meningkat 9-18% pada tahun 2015-2019 dan menunjukkan bahwa fasilitator PASH desa berkontribusi besar atas peningkatan ini. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai peningkatan tertinggi melalui inovasi inisiatif layanan penjangkauan, data dan koordinasi. Desa yang didukung oleh seorang fasilitator PASH dapat menerbitkan akta kelahiran untuk 65 warga per desa. Selama enam bulan sebelumnya, tanpa fasilitator PASH, hanya 12 warga (d disesuaikan dengan populasi) per desa yang mendapat akta kelahiran.

Berdasarkan pengalaman ini, KOMPAK membantu penyusunan Strategi PASH Nasional dan pedoman nasional tentang PASH berbasis desa dan tanggap darurat. KOMPAK juga telah mengkaji definisi ‘kelompok rentan’ dan menyusun indikator indeks Kemudahan Berwarganegara di Indonesia (EOBI) yang mengukur kemudahan akses mendapatkan dokumen identitas hukum dan layanan dasar.

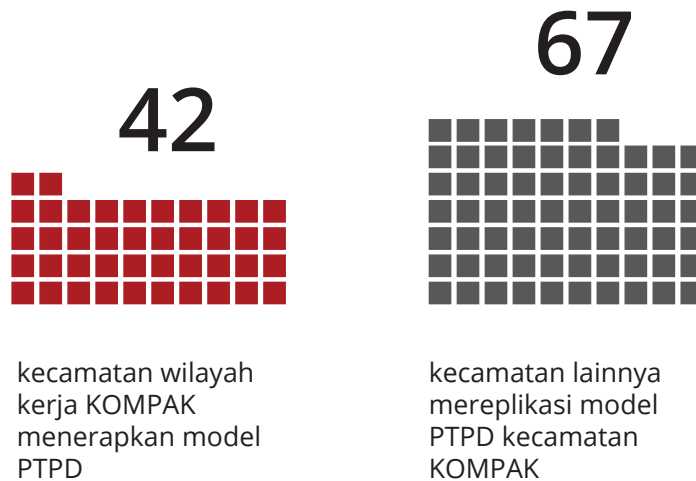
Penguatan kecamatan dan desa

Pada 2019, KOMPAK melanjutkan keberhasilan selama enam tahun terakhir melalui pengembangan dan pelebagaan model penguatan kapasitas desa (PTPD/PbMAD). Aparatur kecamatan yang berperan sebagai fasilitator PTPD memberikan pelatihan dan pembinaan teknis kepada pemerintah desa. Model ini juga dilengkapi dengan modul Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD) yang dapat digunakan pemerintah desa untuk mengidentifikasi dan mendanai pelatihan dan pembinaan teknis yang dibutuhkan. Sebanyak 109 kecamatan (42 kecamatan KOMPAK dan 67 kecamatan lainnya) telah menerapkan model ini yang akan diperluas hingga tingkat nasional melalui Program Penguatan dan Pembangunan Pemerintahan Desa (P3PD), kerja sama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.

KOMPAK mendukung Kementerian Dalam Negeri menyusun pedoman nasional dan bahan pelatihan serta menerbitkan peraturan dan mengalokasikan dana untuk melembagakan model PTPD. Hampir semua desa (99%), di luar wilayah Papua mendapatkan pembinaan teknis dari fasilitator PTPD dalam enam bulan terakhir (78%, jika termasuk Papua). Survei Desa juga menunjukkan bahwa 97% desa menerima manfaat dari keberadaan PTPD dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

KOMPAK dan Kemendesa PDTT menguji coba model 'musrenbang inklusif' atau musyawarah khusus untuk meningkatkan inklusivitas. Dalam model ini, kelompok rentan berkumpul dalam acara musyawarah tahunan untuk menyepakati prioritas-prioritas kegiatan desa. KOMPAK juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam rangka memperkuat penerapan model ini dan menyusun pedoman pengembangan model ini agar dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional.

Jumlah replikasi model PTPD sangat tinggi



Sistem informasi desa (SID)

Sistem informasi desa telah dikembangkan di 81% desa KOMPAK dan didukung oleh operator terlatih dan dana pemerintah daerah. KOMPAK terus berupaya meningkatkan penggunaan dan integrasi sistem ini. Pada 2019, sistem ini semakin sering digunakan oleh tiga per empat dari keseluruhan desa wilayah kerja KOMPAK. Meskipun demikian, satu dari sepuluh desa belum merasakan manfaat dari sistem ini.

Masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain ketersediaan data berkualitas dan integrasi dengan sistem informasi lainnya seperti kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) dan Basis Data Terpadu (BDT). Sekitar satu dari lima desa memiliki data metrik layanan dasar utama, tetapi sebagian besar data tersebut belum terhubung dengan basis data lainnya misalnya BDT dan Dukcapil.

Akuntabilitas sosial

Program Sekar Desa dan Posko Aspirasi merupakan dua model uji coba yang saling melengkapi di 33 desa. Model ini diterapkan KOMPAK untuk memperkuat kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa. Pada 2019, lebih dari 3.000 aparatur pemerintah dan anggota masyarakat desa diberikan pelatihan penganggaran desa dan mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat. Hasilnya, lebih dari 15.000 aspirasi dan pengaduan tersampaikan dan sebagian diakomodasi dalam penganggaran desa.

KOMPAK juga terus mendukung Akademi Paradigta yang berperan meningkatkan tata kelola desa dan pemberdayaan perempuan. Sebanyak 249 perempuan lulus pada tahun 2019, sehingga total alumni Paradigta telah mencapai 2.330 orang. Sekitar 1 dari 6 (n = 398) alumni Paradigta menjabat sebagai pimpinan desa, baik lewat BPD maupun pemerintah desa.

Keperantaraan pasar

Pengembangan ekonomi lokal merupakan prioritas utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, oleh karena itu KOMPAK memelopori uji coba model Keperantaraan Pasar di tujuh kabupaten. Sekitar 10.000 petani dan pengusaha usaha mikro dan kecil (UMK) memperoleh manfaat dari 14 kelompok usaha yang menyalurkan kembali perolehan keuntungan untuk program pembangunan masyarakat. KOMPAK telah mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan model ini, tetapi belum ada bukti apakah model ini akan berhasil jika diperluas. Evaluasi model ini rencananya akan dilakukan pada tahun 2020 untuk meninjau manfaatnya berdasarkan pendapatan, ketenagakerjaan dan inklusifitas.

Kesehatan, pendidikan dan inovasi

Di Aceh, KOMPAK sedang menguji coba aplikasi seluler bagi bidan untuk memonitor kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Sudah 500 ibu hamil terdaftar dalam aplikasi ini. Model ini kemudian diterapkan juga di Sulawesi Selatan melalui pendanaan bersama dengan pemerintah. KOMPAK juga telah melakukan studi latar belakang, atas permintaan Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, tentang penggunaan *drone* untuk distribusi obat-obatan dan persediaan medis di Sulawesi Selatan. Dalam rangka mendukung inisiatif Pemerintah Indonesia meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan gizi, KOMPAK bersama Bappenas merumuskan Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD dan kerangka kerja monitoring yang akan diterbitkan awal tahun 2020.

CAPAIAN AKHIR (EOFO) DAN CAPAIAN ANTARA (IO) KOMPAK



EOFO 1: Pemerintah daerah dan unit layanan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan dasar dengan lebih baik

Dalam upaya mencapai EOFO1, KOMPAK mendukung pemerintah kabupaten dan desa untuk memenuhi layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat melalui pengelolaan keuangan publik (PFM), Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH) dan sistem informasi desa (SID).

Di 24 kabupaten, KOMPAK mendukung penggunaan instrumen dan analisis PFM untuk perencanaan dan penganggaran. Dukungan ini termasuk pelembagaan SPM bidang kesehatan dan pendidikan di 20 kabupaten (IO1, IO2, IO3) dan peningkatan kualitas analisis kemiskinan di tingkat kabupaten dengan menggunakan SEPAKAT (IO3) dan analisis pengeluaran tahun jamak (IO2). KOMPAK akan terus berupaya meningkatkan keterkaitan antara analisis dan perencanaan program. Saat ini sekitar separuh dari seluruh jumlah kabupaten wilayah kerja KOMPAK telah menggunakan instrumen dan analisis PFM dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2020. KOMPAK juga mendukung pemerintah kabupaten untuk menerapkan model pembiayaan berbasis kinerja yang bertujuan untuk memastikan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan indikator pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Model DID ini sedang diuji coba di enam kabupaten agar pemerintah kabupaten dapat memonitor, merencanakan dan menggunakan DID secara lebih baik untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar.

KOMPAK juga telah berhasil menjadikan model uji coba layanan dasar desa sebagai dasar penyusunan Strategi Nasional PASH (IO1, IO3, IO4). Dalam hal ini, KOMPAK mampu membuktikan efektivitas model ini kepada Pemerintah Indonesia melalui peningkatan pengurusan akta kelahiran sebesar lebih dari sepuluh persen di beberapa kabupaten selama empat tahun terakhir.

Agar pemerintah desa dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, KOMPAK memperluas dukungan sistem informasi desa (IO1, IO3). Sistem ini dapat menyediakan data yang dapat digunakan untuk menargetkan program layanan dasar, misalnya mengidentifikasi anak tidak sekolah dan penyandang disabilitas. Dari 426 desa KOMPAK, lebih dari 80% telah memiliki sistem informasi dan 68% memanfaatkan sistem tersebut dalam perencanaan dan penganggaran. KOMPAK juga membantu merancang program Otsus di Papua Barat untuk memperluas tersedianya sistem ini di lebih dari 1.700 desa.

EOFO 2: Masyarakat miskin dan rentan mendapat manfaat dari peningkatan tata kelola desa

KOMPAK terus berupaya meningkatkan tata kelola desa melalui penguatan kapasitas kecamatan (IO1, IO3, IO4) dan melakukan uji coba model akuntabilitas sosial (IO1, IO4). Pada 2019, KOMPAK mendukung Kementerian Dalam Negeri mengembangkan pedoman nasional dan bahan pelatihan model PTPD (kecamatan memberikan pembinaan teknis kepada desa), serta melembagakan model tersebut melalui penetapan peraturan dan alokasi dana di semua kecamatan wilayah kerja KOMPAK. Saat ini, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia sedang memperluas penerapan model ini hingga tingkat nasional.

KOMPAK juga menguji coba model pelatihan anggaran untuk BPD dan masyarakat serta model mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat. Meskipun kedua model ini baru dimulai tahun 2019, hasilnya telah digunakan untuk membantu Kemendesa PDTT menyusun pedoman tentang akuntabilitas sosial dan pemberdayaan perempuan. Kajian lebih lanjut akan dilakukan tahun 2020 untuk menentukan apakah kedua model ini perlu didorong untuk direplikasi lebih luas.

EOFO 3: Masyarakat miskin dan rentan mendapat manfaat dari peningkatan kesempatan ekonomi

Dalam mencapai EOFO3, KOMPAK menguji coba model Keperantaraan Pasar di tujuh kabupaten (IO1 dan IO4). Sekitar 10.000 petani dan pengusaha UMK merasakan manfaat dari model ini. Pembelajaran yang diperoleh dari uji coba model ini digunakan Bappenas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024). Selanjutnya, KOMPAK perlu melakukan penilaian lebih lanjut terhadap dampak model ini terhadap kesempatan pengembangan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ikhtisar Kinerja KOMPAK 2019

MASUKAN (INPUT)

\$20,5 juta

pengeluaran tahunan KOMPAK, 62% di tingkat nasional dan 38% di daerah

144

personel, 49% perempuan. KOMPAK juga didukung 65 konsultan teknis jangka pendek

KEGIATAN

25

kegiatan utama menghasilkan 215 keluaran di 24 kabupaten dan empat kementerian

86%

keluaran Rencana Kerja Tahunan 2019 dilaksanakan sesuai rencana

KELUARAN (OUTPUT)

17.500

aparatur pemerintah, anggota masyarakat dan pihak lainnya berpartisipasi dalam 675 lokakarya dan pelatihan KOMPAK

9

kajian penelitian, baik yang sudah selesai maupun masih berlangsung, dilakukan untuk menilai efektivitas dan mencatat petikan pelajaran

UJI COBA DAN REPLIKASI

4

model KOMPAK sedang direplikasi di tingkat provinsi dan secara nasional



Indikator dana insentif berbasis kinerja desa



Fasilitator pencatatan sipil desa



Model penguatan kapasitas desa (PTPD)



Sistem informasi desa

8

model tambahan sedang diuji coba bersama pemerintah pusat dan daerah



Aplikasi perencanaan dan penganggaran elektronik



Pelatihan melek anggaran berbasis masyarakat



Forum perencanaan desa inklusif



Mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat



Sistem informasi kabupaten dan kecamatan



Akademi tata kelola desa untuk perempuan dan kelompok rentan



Model keperantaraan pasar



Model kerja sama universitas dan desa

**HASIL/
KEMAJUAN**



Pengelolaan
Keuangan Publik

20

kabupaten melembagakan SPM dalam rencana kerja dan anggaran tahunan

3,8 dari 5

rerata skor diberikan oleh 13 kabupaten tentang manfaat sistem SEPAKAT

3,4 dari 5

rerata skor diberikan oleh 15 kabupaten tentang manfaat diterapkan analisis kendala anggaran

67%

pemerintah kabupaten secara aktif mengkoordinasikan perencanaan dan monitoring penggunaan DAK Fisik dan DID

6

kabupaten menguji coba model pembiayaan berbasis kinerja desa

2

kajian utama selesai. Evaluasi penggunaan Dana Otsus dan evaluasi perkiraan biaya SPM



Penguatan
Administrasi
Kependudukan &
Statistik Hayati (PASH)

74%

desa wilayah kerja KOMPAK memiliki fasilitator PASH

5x

lebih banyak warga mengurus akta lahir di desa yang didukung fasilitator PASH

10%

peningkatan cakupan akta lahir dari 2016 hingga 2019, menurut kajian PASH



Penguatan Kecamatan
dan Desa (KVS)

78%

desa menerima pembinaan teknik dari fasilitator PTPD dalam 6 bulan terakhir

4,2 dari 5

rerata skor diberikan oleh desa wilayah kerja KOMPAK tentang manfaat model PTPD

109

kecamatan telah menerapkan model peningkatan kapasitas desa (PTPD)



Sistem Informasi Desa

81%

desa wilayah kerja KOMPAK memiliki sistem informasi desa

68%

desa rutin menggunakan sistem tersebut untuk perencanaan dan penganggaran

201

dari 388 kecamatan di wilayah kerja KOMPAK mengimplementasikan sistem informasi desa



Akuntabilitas
sosial

3.358

masyarakat dari 33 desa mendapat pelatihan melek anggaran

249

perempuan lulus dari Akademi Paradigta sehingga total alumni mencapai 2.330



Keperantaraan
Pasar

14

kelompok usaha didukung uji coba Keperantaraan Pasar, sekitar 10.000 pekerja memperoleh manfaatnya

Kemajuan Pelaksanaan Rencana Kerja

Sebagian besar keluaran (*output*) dan penanda kemajuan (*progress marker*) dalam Rencana Kerja Tahunan 2019 berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang diproyeksikan. KOMPAK menghasilkan 215 keluaran dan mencapai 98 penanda kemajuan dengan total pengeluaran sebesar \$20,5 juta (termasuk \$10,8 juta untuk implementasi kegiatan). Pengeluaran masih dalam batas satu persen dari total anggaran.

Tingkat penyelesaian pelaksanaan keluaran dan penanda kemajuan masing-masing 86% dan 89%. Kemajuan dinilai dalam evaluasi kinerja enam bulanan, sehingga tim pelaksana dapat mempelajari hasil penilaian dan menyesuaikan rencana kerja untuk mencapai capaian akhir (EOFO). Hasil penilaian berkontribusi pada konsolidasi keluaran secara signifikan dari 448 menjadi 215 keluaran, sehingga mampu menyederhanakan manajemen proyek. *Progress marker* ditambahkan di bulan April untuk dapat menangkap hasil pembangunan (*development outcomes*) dengan lebih baik.

Pengeluaran di Aceh tercatat sedikit lebih rendah karena berbagai kegiatan dalam Rencana Kerja Otsus ditunda hingga tahun 2020. Di Papua, beberapa *output* belum sepenuhnya selesai karena akses yang sulit ke desa dan situasi politik yang tidak stabil. Evaluasi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) juga ditunda hingga 2020 agar kelompok usaha memiliki waktu yang cukup untuk benar-benar membuahkan hasil.

CATATAN TENTANG OUTPUT DAN PROGRESS MARKERS

Progress marker dan *output* merupakan mekanisme utama untuk menelusuri kemajuan terhadap rencana kerja. *Output* adalah hasil kerja yang direncanakan KOMPAK, sedangkan *progress marker* adalah *milestone* tercapainya sasaran jangka panjang secara berkelanjutan.

VALUE FOR MONEY: MENILAI BIAYA PER PESERTA

Keluaran KOMPAK termasuk pelatihan untuk lebih dari 17.000 peserta dari tujuh provinsi wilayah kerja KOMPAK. Biaya per peserta pelatihan berdasarkan anggaran rata-rata sekitar \$130, dengan biaya tertinggi (\$480 per peserta) untuk pelatihan pengelolaan keuangan publik (PFM) dan biaya terendah (\$12 per peserta) untuk pelatihan akuntabilitas sosial (SA). Biaya pelatihan PFM lebih tinggi karena memerlukan tenaga ahli teknis dan diselenggarakan rutin di ibukota provinsi, sedangkan pelatihan akuntabilitas sosial diadakan di desa menggunakan model pelatihan untuk pelatih.

JUMLAH PELATIHAN DAN PESERTA PELATIHAN KOMPAK

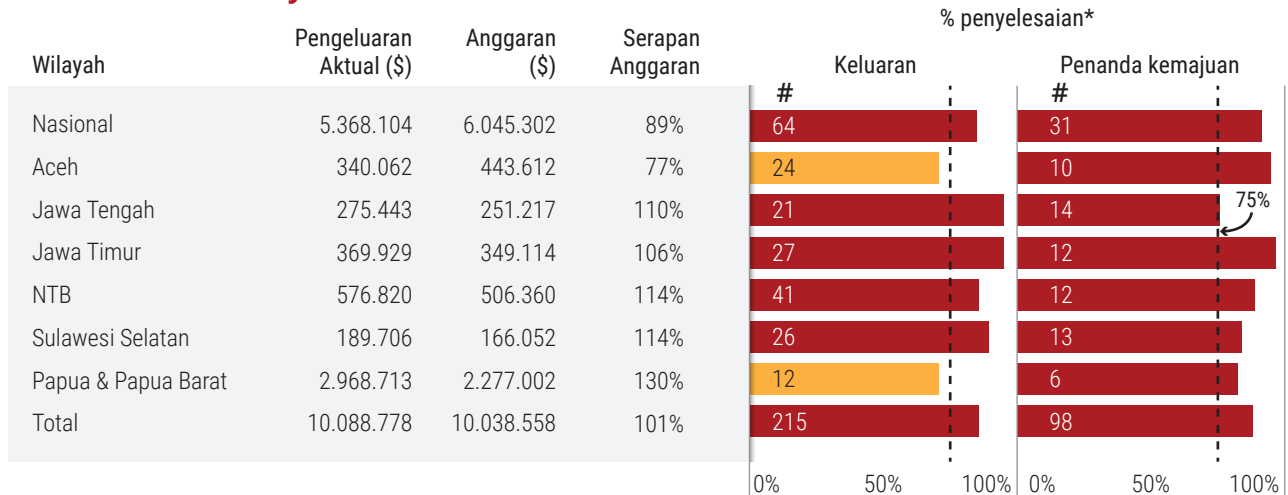
Kegiatan Unggulan	Jumlah Pelatihan	Total Peserta	% Peserta Perempuan	Biaya per Peserta (AUD)
PFM	194	1.592	41%	\$480
KVS	95	897	32%	\$417
LED	38	1.039	30%	\$209
CRVS	53	1.297	36%	\$166
Pend., Kes., dan Inov.	111	2.879	44%	\$158
SID	23	545	30%	\$154
KOMPAK internal	11	713	47%	\$84
GESI & SA	150	8.568	69%	\$12
Total	675	17.530	53%	\$130

* Berdasarkan anggaran (bukan pengeluaran) dan kehadiran peserta, tercatat pada Sistem Informasi Manajemen KOMPAK.

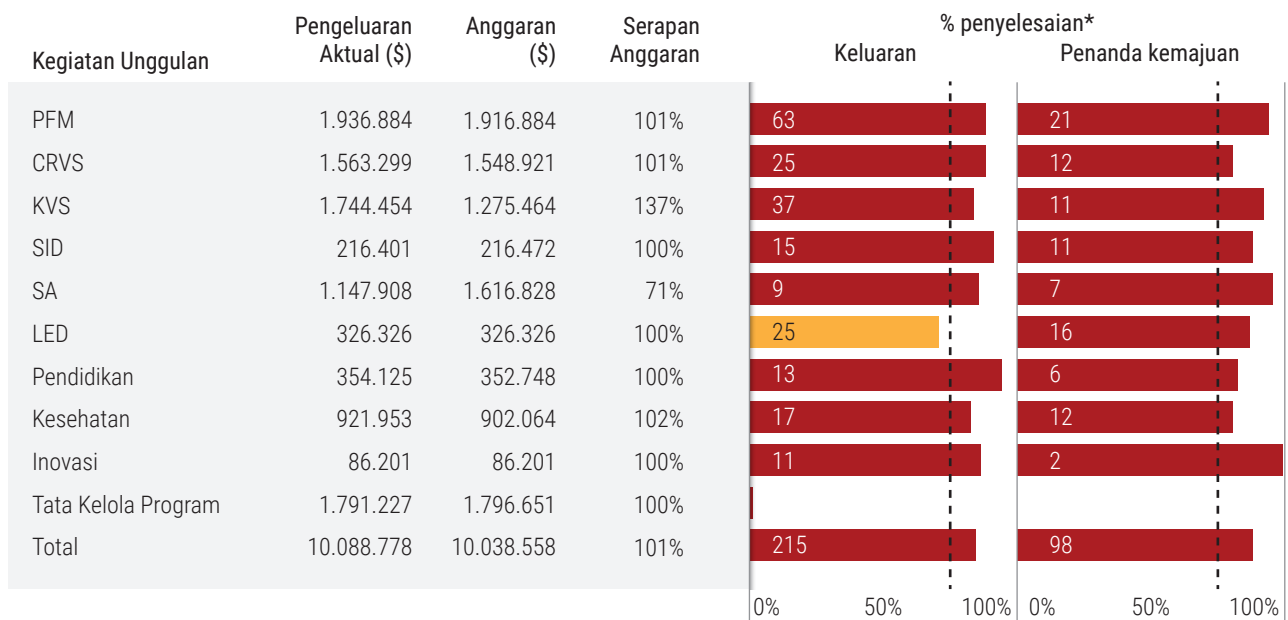
Pada 2019, KOMPAK mencapai **215 capaian** dan **98 penanda kemajuan** dengan pengeluaran **\$10,1 juta**

Pencapaian Rencana Kerja Tahunan 2019

Berdasarkan wilayah



Berdasarkan Kegiatan Unggulan



* Kemajuan berdasarkan penilaian dan skor evaluasi kinerja

Hasil, Kegiatan dan Pemetaan Mitra

Struktur pelaporan hasil kerja dan perencanaan kerja KOMPAK mengalami beberapa restrukturisasi. Pada 2019, KOMPAK menggunakan *'activity concept notes'* (ACN) yang mengelompokkan kegiatan berdasarkan empat layanan dasar dalam area kerja KOMPAK: pencatatan sipil, kesehatan, pendidikan dan pengembangan ekonomi lokal. Terdapat tantangan dalam penggunaan struktur ini, yaitu lebih terfokus pada penyediaan layanan dasar, bukan pada perbaikan mekanisme tata kelola penyediaan layanan dasar.

Laporan ini menggunakan struktur yang menerapkan pendekatan berbasis kegiatan unggulan (*flagship activities*) yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan 2020. Struktur ini juga terlihat dalam Kerangka Kerja Hasil (*Results Framework*), sehingga terdapat konsistensi antara tahun 2019 dan 2020 dan mempermudah untuk memahami pencapaian tahun 2019 dan area yang perlu diperbaiki tahun 2020. Kegiatan utama (n = 25) dirangkum berdasarkan kabupaten untuk menunjukkan implementasi kegiatan tahun 2019 dan berdasarkan kegiatan yang direncanakan dan akan dihapus tahun 2020.

Dalam melaksanakan kegiatannya, KOMPAK tidak bekerja sendiri. KOMPAK mengandalkan kemitraan dan jaringan kerja sama yang kuat dengan pemerintah pusat dan daerah, mitra pelaksana, program DFAT lainnya, lembaga penelitian dan kerja sama multilateral, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Bersama dengan para mitra ini, KOMPAK mampu mengoptimalkan keahlian dan sumber daya guna meningkatkan kualitas dan jangkauan kegiatan KOMPAK.

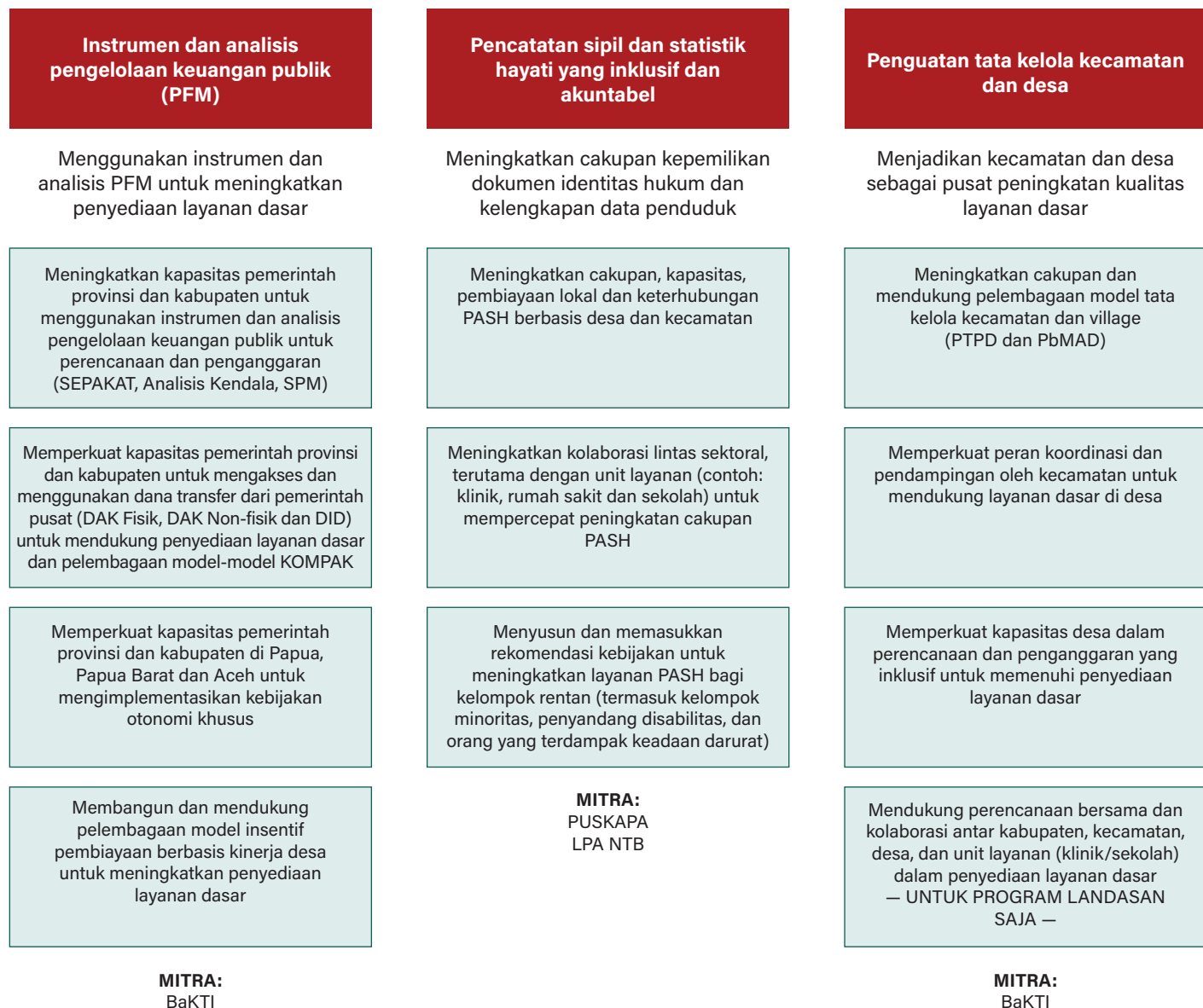
Mitra Pelaksana Utama Kegiatan KOMPAK

MITRA	AREA KOLABORASI
PUSKAPA	Kegiatan PASH di tingkat nasional dan daerah.
BaKTI	Implementasi Program LANDASAN di Papua dan Papua Barat.
PEKKA	Desain dan implementasi model akuntabilitas sosial, antara lain Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dan Tata Kelola Desa (Akademi Paradigta) dan kegiatan perempuan dan kelompok rentan (KLIK- PEKKA).
Seknas Fitra	Desain dan implementasi model akuntabilitas sosial, antara lain Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dan Posko Aspirasi.
LPA NTB	Kegiatan PASH di NTB.
SEHATI	Model aplikasi seluler untuk bidan dan ibu hamil (PWS+).

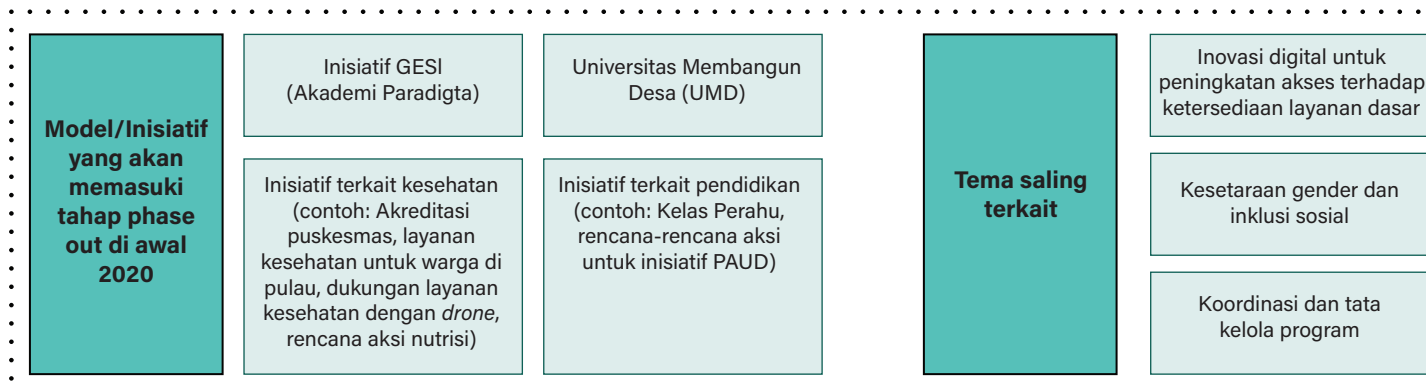
Mitra DFAT

MITRA	AREA KOLABORASI
<p>Bank Dunia dan Local Solutions to Poverty (LSP)</p> <p>Tata Kelola Kecamatan dan Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desain dan implementasi P3PD, terutama model penguatan kapasitas desa (PTPD/PbMAD) dan model akuntabilitas sosial. • Kajian tentang indeks EOBI. • Penyusunan nomenklatur anggaran kecamatan untuk bimbingan dan pengawasan desa (binwas desa). • Advokasi Undang-Undang Desa (UU Desa) dan implementasi akuntabilitas sosial, termasuk publikasi lima catatan kebijakan untuk Pemerintah Indonesia. • Pengembangan SEPAKAT.
<p>MAHKOTA</p> <p>BANGGA Papua Program Bantuan Tunai Universal untuk Anak di Papua</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi komunikasi untuk penerima manfaat program BANGGA Papua. • Kajian tentang <i>blockchain</i> dan instrumen transfer anggaran alternatif untuk BANGGA Papua.
<p>Badan-Badan Khusus PBB</p> <p>Penyediaan layanan dasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi desain dan implementasi Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (UNICEF dan WHO). • Strategi komunikasi untuk penerima manfaat program BANGGA Papua (UNICEF). • Pengumpulan data untuk program Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (UNICEF).
<p>MAMPU</p> <p>Akuntabilitas sosial dan inklusivitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan pembangunan desa inklusif, partisipasi perempuan dalam ekonomi dan pencatatan sipil untuk perempuan dan kelompok rentan (terutama melalui PEKKA). • Desain dan implementasi program Sekolah bagi Kelompok Rentan (Sepeda Keren) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. • Pengembangan ekonomi lokal dan keperantaraan pasar bagi perempuan.
<p>Program DFAT lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi desain dan implementasi Strategi Nasional Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati, terutama layanan bagi kelompok rentan (PEDULI). • Pengelolaan keuangan publik untuk peningkatan kualitas layanan dasar tingkat daerah (PROSPERA). • Pengembangan ekonomi lokal di Aceh (PRISMA). • Advokasi belanja pemerintah daerah untuk pendidikan (INOVASI dan TASS).

Strategi Unggulan: Program Tata Kelola KOMPAK



Komponen lainnya dalam KOMPAK



Sistem informasi desa

Meningkatkan penggunaan data desa untuk mendukung perencanaan dan penganggaran

Meningkatkan cakupan dan mendukung pelebagaan sistem informasi desa

Meningkatkan penggunaan sistem informasi desa oleh desa untuk perencanaan, penganggaran, pelaporan dan kegiatan lainnya

Mengintegrasikan sistem informasi desa dengan sistem informasi daerah lainnya (misalnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/SIKAD)

Mengembangkan dan menguji coba sistem informasi di kecamatan dan kabupaten

MITRA:
BaKTI

Akuntabilitas sosial

Memperkuat akuntabilitas sosial untuk meningkatkan kualitas layanan dasar

Meningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme aspirasi, literasi anggaran dan mekanisme akuntabilitas sosial lainnya.

Memperkuat kebijakan, pedoman dan model akuntabilitas sosial dan inklusi dalam pelaksanaan UU Desa di tingkat nasional dan daerah

MITRA:
Seknas Fitra
PEKKA
BaKTI

Keperantaraan pasar

Menyelesaikan implementasi dan dokumentasi uji coba model Keperantaraan Pasar

Mengembangkan instrumen dan rekomendasi model bisnis nasional untuk mendukung keberlanjutan Keperantaraan Pasar

Apa yang dimaksud pelembagaan?

Proses menggabungkan inisiatif ke dalam sistem pemerintahan, antara lain melalui penetapan peraturan, pendanaan lanjutan, penyusunan kebijakan dan pedoman, instalasi aplikasi/sistem dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan staf lembaga yang mengambil alih inisiatif tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat KOMPAS Sustainability Plan 2019-2020.

Performance dan Analytics

Kajian dan evaluasi

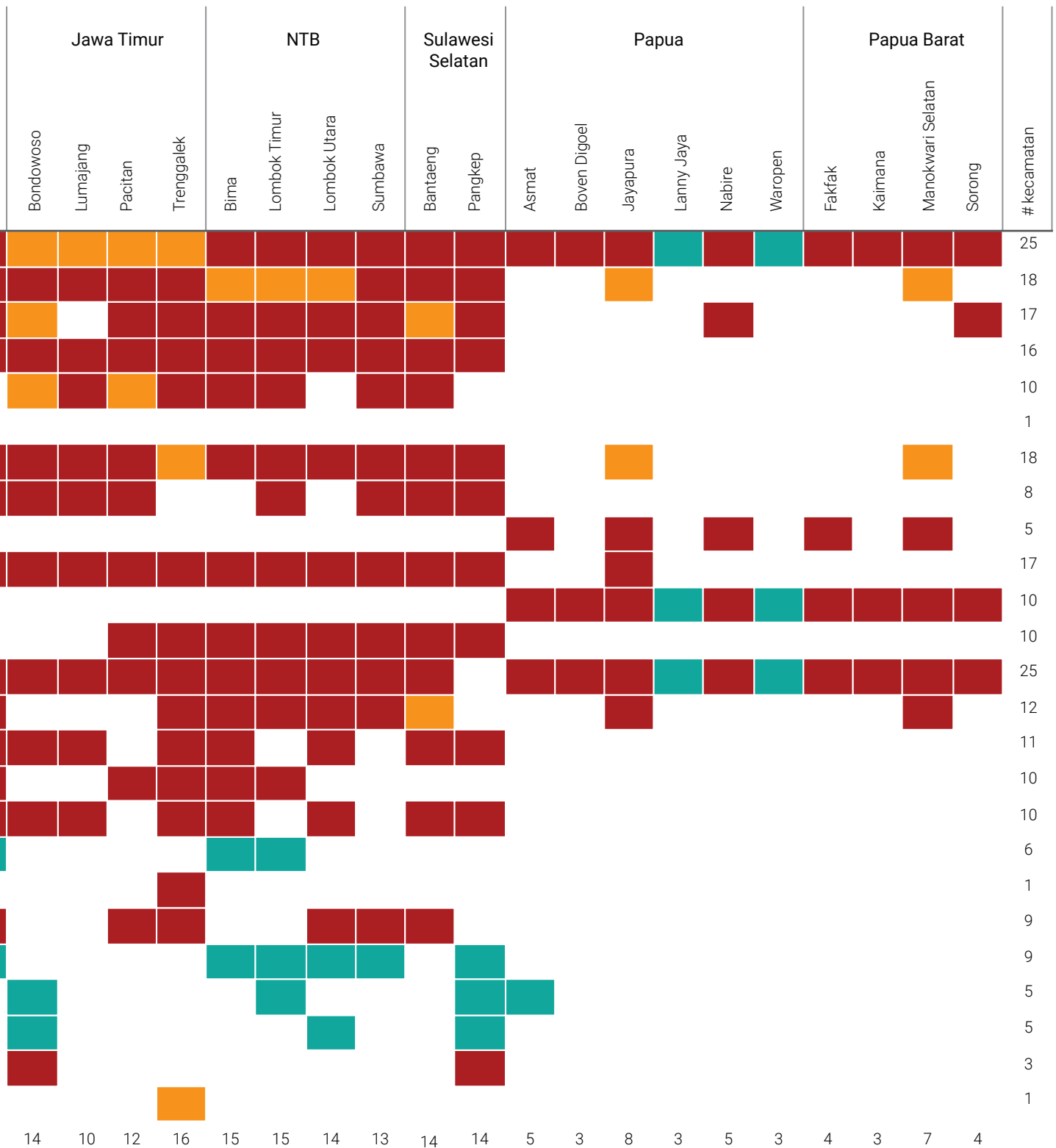
Komunikasi dan Manajemen Pengetahuan

Kegiatan unggulan KOMPAK dan kabupaten sasaran

Kegiatan	Dukungan KOMPAK	Aceh			Jawa Tengah		
		Aceh Barat	Bener Meriah	Bireuen	Brebes	Pekalongan	Pemalang
1. PFM	Pengajuan, penganggaran dan pemantauan DAK dan DID	■	■	■		■	■
	Instrumen dan Analisis Kemiskinan (SEPAKAT)	■	■	■	■	■	■
	Penerapan SPM oleh Kabupaten	■	■	■	■	■	■
	Analisis Kendala Anggaran Kabupaten	■	■	■	■	■	■
	Model Dana Insentif Berbasis Kinerja Desa	■	■				
	Perencanaan/Penganggaran Secara Elektronik		■				
2. CRVS	Model Fasilitator PASH Desa	■	■	■	■	■	■
	Lokasi Kajian PASH						■
	Koordinasi Kecamatan dan Unit Layanan						■
3. KVS	Model Penguatan Kapasitas Desa (PTPD/PbMAD)	■	■	■	■	■	■
	Program LANDASAN						
	Model Musrena/Musrenbang Inklusif	■	■				
4. SID	Sistem Informasi Desa	■	■	■	■	■	■
	Model Sistem Informasi Kabupaten dan Kecamatan			■	■	■	■
5. SA	Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa)	■			■	■	■
	Inisiatif Penjangkauan Masyarakat (KLIK PEKKA)	■	■	■	■	■	■
	Model Mekanisme Aspirasi Masyarakat (Posko Aspirasi)	■				■	■
	Sekolah Kepemimpinan Perempuan (Akademi Paradigta)			■	■	■	■
	Model Sekolah bagi Kelompok Rentan (Sepeda Keren)			■	■	■	■
6. LED	Model Keperantaraan Pasar	■	■			■	■
7. Kesehatan, Pendidikan & Inovasi	Model Universitas Membangun Desa (UMD)		■		■	■	■
	Layanan Kesehatan Daerah Terpencil (mis. <i>drone</i> dan studi lain)		■				
	Layanan Pendidikan Daerah Terpencil (mis. Kelas Perahu)				■	■	
	Model Aplikasi Seluler untuk Bidan (PWS+)		■				
	Kabupaten Digital						
Total	# kegiatan	13	15	10	12	15	15

■ Kegiatan dilaksanakan pada 2019 dan diteruskan pada 2020

■ Kegiatan direncanakan untuk 2020 (belum dilaksanakan)



um dilaksanakan pada 2019)



Kegiatan dilaksanakan pada 2019 tetapi tidak dilanjutkan lagi (phase out) pada 2020



DAMPAK
PEMBANGUNAN



Catatan tentang Pelaporan Hasil

Hasil dalam laporan ini disajikan berdasarkan laporan program dan laporan mitra, survei KOMPAK dan data sekunder.

Pada bulan Juni dan Desember 2019, KOMPAK melakukan survei untuk desa, kecamatan, dan kabupaten di seluruh wilayah kerja. Kecuali dinyatakan lain, persentase yang tercantum di bawah ini merupakan hasil survei terbaru di 418 desa, 42 kecamatan dan 24 kabupaten (tingkat respons: 98%). Sebanyak delapan desa dan satu kecamatan tidak dapat diakses pada saat survei dilakukan.

Survei dilaksanakan oleh petugas monitoring dan evaluasi KOMPAK dengan mengunjungi atau menghubungi perwakilan desa dan mengumpulkan data menggunakan kuesioner terstruktur. Dalam kuesioner tersebut, dikumpulkan informasi tentang status permasalahan tertentu, untuk melihat apakah KOMPAK memiliki dampak terhadap penyelesaian masalah tersebut. Informasi yang dikumpulkan survei ini berguna bagi KOMPAK untuk secara lebih tepat menargetkan intervensi dan menilai kemajuan dalam satu hingga dua tahun ke depan.

	DATA TERKUMPUL	TARGET	TINGKAT RESPONS
Survei Kabupaten	24	24	100%
Survei Kecamatan	42	43	98% ^a
Survei Desa	418	426	98% ^a

^a Enam desa dan satu kecamatan di Kabupaten Nabire, Papua dan dua desa di Papua Barat (Kabupaten Fakfak dan Kaimana) tidak dapat disurvei karena tidak ada petugas yang tersedia di lokasi dan lokasinya sulit diakses.

Pengelolaan Keuangan Publik

ANALISIS SITUASI

Setelah dua dekade diterapkannya desentralisasi fiskal, Pemerintah Indonesia memberikan sinyal akan terus menambahkan dana untuk implementasi kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp2.540 triliun (setara \$270 miliar) mengalokasikan sepertiga anggaran (Rp857 triliun/\$91 miliar) untuk TKDD. Meskipun terdapat peningkatan dalam pengelolaan keuangan publik, pemerintah kabupaten dan desa di seluruh Indonesia masih memiliki kapasitas yang bervariasi dalam pengelolaan dan belanja anggaran secara efektif.

KOMPAK mendukung pemerintah untuk meningkatkan efektivitas alokasi, distribusi, dan penggunaan dana TKDD. Dukungan yang diberikan termasuk melakukan penetapan biaya dan pemantauan SPM, menguji coba sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu (SEPAKAT), serta menganalisis anggaran kabupaten dan desa guna mengidentifikasi masalah dalam pola belanja anggaran (Analisis Kendala Anggaran).

KOMPAK juga memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kualitas proposal untuk mengajukan DAK infrastruktur (DAK Fisik) dan kebijakan alokasi, indikator kinerja dan mekanisme pelaporan DID. Selain itu, pada 2020 Kementerian Keuangan meluncurkan dana insentif kinerja desa berskala nasional yang didukung oleh pembelajaran dari uji coba model KOMPAK

Masalah, tantangan dan rekomendasi utama:

- Terdapat inkonsistensi pada data keuangan, kode anggaran dan laporan anggaran tingkat daerah karena peraturan yang diterapkan berbeda. Masalah ini menimbulkan tantangan saat melakukan konsolidasi analisis dan membandingkan daerah.
- Dibutuhkan lebih banyak panduan dan dukungan untuk meningkatkan kapasitas analisis dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah dan dalam membantu pemerintah menerapkan instrumen analisis dalam proses perencanaan dan penganggaran.
- Di 20 kabupaten, KOMPAK telah berhasil mengintegrasikan SPM ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan anggaran. Namun, belum ada kerangka monitoring SPM secara nasional yang terstandardisasi untuk membandingkan kinerja kabupaten.
- Penyusunan proposal pengajuan DAK Fisik sebagian besar bersifat *ad hoc*, yaitu pemerintah kabupaten hanya membuat 'daftar belanja'. Akibatnya, banyak proposal yang tidak diprioritaskan. Memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten untuk mengidentifikasi proyek prioritas, terutama yang terkait dengan pencapaian SPM, akan membantu meningkatkan pemanfaatan DAK fisik.

- Pemerintah Indonesia menyalurkan DID untuk memberi insentif kinerja pemerintah daerah. Namun, jumlah indikator DID semakin bertambah dan banyak pemerintah daerah yang tidak mengetahui atau memahami indikator tersebut. Akibatnya, banyak pemerintah daerah belum paham aspek kinerja apa yang harus diperbaiki agar dapat menerima insentif.
- Meninjau kinerja 75.000 desa agar DID dapat diperluas merupakan tantangan besar. KOMPAK menilai pemerintah kabupaten adalah pihak yang paling tepat untuk meninjau kinerja desa dan menyusun indikator kinerja sesuai dengan konteks dan prioritas setempat.

INSTRUMEN DAN ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK

STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) LAYANAN DASAR

Pada 2014, Pemerintah Indonesia menetapkan² SPM kesehatan, pendidikan dan layanan dasar lainnya. SPM menentukan target kualitas layanan dasar yang harus dicapai kabupaten, misalnya cakupan imunisasi atau tolok ukur pendaftaran sekolah. Mendapatkan *buy-in* dari pemerintah kabupaten untuk pemenuhan SPM merupakan tantangan bagi Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. Hingga saat ini, KOMPAK memberikan dukungan di tingkat nasional dan kabupaten untuk melembagakan SPM ke dalam rencana kerja dan anggaran, serta kerangka kerja monitoring nasional dan penetapan biaya.

Di tingkat kabupaten, KOMPAK menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendukung pemerintah kabupaten mengadopsi SPM (lihat tabel di halaman 26). Hampir semua (20 dari 24) kabupaten telah memasukkan target SPM dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja tahunan dan telah mengalokasikan dana secara khusus untuk mencapai standar (naik dari 15 pada Juni 2019). Hanya dua kabupaten yang belum memasukkan SPM ke dalam dokumen perencanaan. *Template* terkait, pedoman, pelatihan dan pembelajaran dari KOMPAK akan membantu Pemerintah Indonesia melembagakan SPM di seluruh kabupaten di Indonesia.

KOMPAK menyelesaikan kajian yang dilakukan untuk Bappenas untuk memperkirakan kebutuhan pendanaan untuk mempercepat kemajuan menuju target SPM bidang kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, dan perumahan dasar. Penentuan biaya didasarkan pada analisis di sembilan kabupaten KOMPAK dan diekstrapolasi untuk memperkirakan kesenjangan pendanaan, melalui DAK Fisik dan Non-fisik, untuk memenuhi standar minimum untuk infrastruktur dan layanan dasar pemerintah kabupaten. Kajian ini menunjukkan bahwa diperlukan tambahan Rp130 triliun (\$14 miliar) untuk membantu 503 kabupaten dan kota untuk mencapai SPM, terutama untuk meningkatkan air dan sanitasi yang memerlukan 80% dari dana tersebut. Temuan ini digunakan sebagai masukan untuk penyusunan RPJMN dan oleh pemerintah kabupaten KOMPAK sebagai informasi untuk mengalokasikan DAK Non-fisik.

KOMPAK juga mendukung penyusunan kerangka kerja monitoring SPM nasional. Kerangka kerja ini menetapkan indikator standar yang perlu dilaporkan semua kabupaten, sehingga mempermudah perbandingan kinerja antarkabupaten dan identifikasi daerah berkinerja buruk. Kerangka kerja ini masih dalam tahap penyusunan yang akan dilanjutkan dalam Rencana Kerja Tahunan 2020.

² UU No. 23/2014. PP dan Permen tentang SPM disusun berdasarkan UU No. 23/2014.

PENERAPAN SISTEM SEPAKAT

Pada Mei 2019, Bappenas meluncurkan sistem SEPAKAT untuk memberikan akses kepada kabupaten untuk memperoleh data dan analisis guna meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran. Pada 2019, KOMPAK dan Bank Dunia memberikan bantuan teknis untuk memutakhirkan aplikasi SEPAKAT dari 2.0 menjadi 3.0. Sistem yang diperbarui memiliki modul baru tentang monitoring dan manajemen pengetahuan, serta kapabilitas integrasi dan analisis yang lebih canggih pada modul penganggaran dan perencanaan. KOMPAK juga membuat panduan pengguna sistem SEPAKAT dan pedoman khusus tentang cara menggunakan sistem tersebut untuk menyusun dokumen perencanaan tingkat kabupaten (RPJMD, SPKD dan LPKD). Penerapan sistem ini juga didukung oleh Bappenas dan KOMPAK melalui penyelenggaraan lokakarya dan acara yang mempromosikan sistem ini kepada 76 pemerintah kabupaten.

Meskipun SEPAKAT berpotensi secara signifikan meningkatkan kualitas perencanaan berbasis bukti, masih ada tantangan untuk mendorong kabupaten mengadopsi dan menggunakan sistem tersebut secara efektif. KOMPAK dan Bappenas telah menyediakan akses dan pelatihan awal sistem SEPAKAT untuk empat kantor provinsi dan 13 kabupaten (di Jawa Timur, sistem ini digunakan oleh kabupaten, tetapi belum digunakan provinsi). Pada 2019, tujuh dari 13 kabupaten tersebut telah menggunakan SEPAKAT untuk menyusun dokumen perencanaan. Empat kabupaten menyatakan sistem tersebut 'sangat berguna' (lihat tabel di halaman 26). Namun, kabupaten lainnya memberikan tanggapan yang bervariasi terhadap sistem SEPAKAT. Lebih dari tiga kabupaten masih belum menggunakan sistem ini untuk menyusun dokumen perencanaan, sehingga belum menentukan apakah sistem ini berguna atau tidak. Kabupaten Pacitan, misalnya, menyatakan bahwa data statistik yang sudah terlalu lama menjadi keterbatasan dari sistem tersebut. KOMPAK dan Bappenas berupaya mengatasi hal ini dengan menghubungkan SEPAKAT dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, sistem keuangan pemerintah kabupaten dan BDT.

ANALISIS KENDALA ANGGARAN KABUPATEN

Inisiatif lain yang dilakukan KOMPAK adalah Analisis Kendala Anggaran Kabupaten. Analisis ini telah dilakukan di 15 kabupaten dan sebanyak lima laporan akhir sudah diterbitkan (lihat tabel di halaman 26). Analisis ini mengkaji pengeluaran dan pendapatan APBD dari 2013 hingga 2018, termasuk tinjauan tentang efektivitas dan efisiensi pengeluaran bidang kesehatan, pendidikan, pencatatan sipil dan layanan dasar lainnya.

Walaupun laporan tersebut juga berisi rekomendasi untuk pemerintah kabupaten, tantangan bagi KOMPAK adalah untuk mendukung pemerintah kabupaten memahami temuan dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Survei kabupaten KOMPAK, dirangkum pada tabel di halaman 26, menunjukkan bahwa hanya dua dari 15 pemerintah kabupaten melakukan perubahan setelah analisis dilakukan dan sebagian besar menyatakan tidak memiliki pandangan positif maupun negatif tentang manfaat analisis tersebut. Diskusi lebih lanjut dengan lima pemerintah kabupaten yang temuannya dipublikasikan KOMPAK menunjukkan bahwa masukan dari analisis tersebut bermanfaat dan digunakan untuk penyusunan RPJMD kabupaten. Menimbang investasi yang dilakukan KOMPAK dan potensi peningkatan kualitas penganggaran kabupaten, upaya lebih lanjut diperlukan pada 2020 untuk mengidentifikasi strategi yang perlu diadvokasi lebih baik serta merancang analisis dan bantuan teknis sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ELEKTRONIK

Kementerian Dalam Negeri secara aktif mengadvokasi perencanaan dan penganggaran elektronik melalui pengembangan SIPD tahun 2018. SIPD bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pemerintah provinsi dan kabupaten. KOMPAK mendukung inisiatif ini melalui dua cara: terus memberikan dukungan teknis berkelanjutan untuk mengintegrasikan SPM dan menstandarisasi kode anggaran SIPD dan KRISNA dan implementasi perencanaan dan penganggaran elektronik di Provinsi Aceh dan Papua.

Sistem perencanaan dan penganggaran elektronik di Provinsi Aceh mengintegrasikan semua kantor pemerintah provinsi dari awalnya satu kabupaten (Bener Meriah). Sistem ini mencakup semua dana pemerintah, tidak hanya Dana Otsus. Sebelumnya, perencanaan dan penganggaran dilakukan di tempat terpisah dan sedikit sekali berkaitan dengan Rencana Induk Otonomi Aceh

Sistem baru ini meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran dengan menghubungkan keluaran dan kegiatan rencana induk ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat provinsi dan kabupaten. Pada 2020, KOMPAK membantu Pemerintah Provinsi Aceh memperluas sistem ini ke 22 kabupaten. Sistem ini berpotensi untuk menghubungkan semua provinsi dan kabupaten di Indonesia apabila dikembangkan melalui strategi SIPD yang lebih luas. Sistem perencanaan dan penganggaran elektronik terintegrasi di Aceh adalah sistem yang terhubung dengan sistem perencanaan elektronik nasional untuk pertama kalinya di Indonesia.

Sistem perencanaan dan penganggaran elektronik di Provinsi Papua (Papua Pu Perencanaan) diterapkan di tingkat provinsi dan Kota Jayapura. Sistem ini rencananya akan diterapkan juga di 28 kabupaten di Papua pada 2020. Sistem ini terhubung dengan SIPD dan menjadi pusat integrasi rencana pembangunan jangka menengah Papua dengan rencana distrik dan sektor, termasuk indikator SPM, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KOMPAK juga memberikan dukungan teknis untuk membangun sistem dan membantu koordinasi dan pelatihan untuk pemangku kepentingan, termasuk pembuatan video tentang sistem perencanaan dan penganggaran elektronik untuk perluasan penerapan.

Melembagakan instrumen dan analisis pengelolaan keuangan publik

Provinsi	Kabupaten	SPM			SEPAKAT			Analisis Kendala Anggaran		
		Target SPM tercantum pada RPJMD dan RPKD	Dana dialokasikan untuk mencapai target SPM	Analisis penetapan biaya SPM selesai dilakukan	SEPAKAT tersedia	Digunakan kabupaten (jumlah dokumen)	Tingkat manfaat	Dilaksanakan	Digunakan kabupaten	Tingkat manfaat
Aceh	Aceh Barat	Ya	Ya	Tidak	Tidak	1	Sangat Berguna	Tidak	Tidak	Tidak
	Bener Meriah	Ya	Ya	Tidak	Tidak			Dipublikasikan	Tidak	Netral
	Bireuen	Ya	Ya	Tidak	Tidak	3	Berguna	Tidak	Tidak	Netral
Jawa Tengah	Brebes	Ya	Ya	Tidak	Tidak			Tidak	Tidak	Netral
	Pekalongan	Ya	Ya	Tidak	Tidak	1	Sangat Berguna	Tidak	Tidak	Netral
	Pemalang	Ya	Ya	Tidak	Tidak		Netral	Dipublikasikan	Ya	Netral
Jawa Timur	Bondowoso	Ya	Ya	Tidak	Tidak	1	Netral	Tidak	Tidak	Netral
	Lumajang	Ya	Ya	Tidak	Tidak		Netral	Tidak	Tidak	Netral
	Pacitan	Ya	Ya	Tidak	Tidak	3	Berguna	Dipublikasikan	Tidak	Netral
	Trenggalek	Ya	Ya	Tidak	Tidak		Netral	Tidak	Tidak	Sangat Berguna
NTB	Bima	Ya	Ya	Tidak	Tidak			Tidak	Tidak	Tidak Berguna
	Lombok Timur	Ya	Ya	Tidak	Tidak			Tidak	Tidak	Netral
	Lombok Utara	Ya	Ya	Tidak	Tidak			Tidak	Tidak	Netral
	Sumbawa	Ya	Ya	Tidak	Tidak		Netral	Tidak	Tidak	Netral
Sulawesi Selatan	Bantaeng	Ya	Ya	Tidak	Tidak	6	Sangat Berguna	Dipublikasikan	Tidak	Netral
	Pangkep	Ya	Ya	Tidak	Tidak	3	Sangat Berguna	Dipublikasikan	Ya	Sangat Berguna
Papua	Asmat	Ya	Ya	Tidak	Tidak			Tidak	Tidak	
	Boven Digoel	Ya	Ya	Tidak	Tidak			Tidak	Tidak	
	Jayapura	Ya	Ya	Tidak	Tidak			Tidak	Tidak	
	Nabire	Ya	Ya	Tidak	Tidak			Tidak	Tidak	
Papua Barat	Fakfak	Ya	Ya	Tidak	Tidak			Tidak	Tidak	
	Kaimana	Ya	Ya	Tidak	Tidak			Tidak	Tidak	
	Manokwari Selatan	Ya	Ya	Tidak	Tidak			Tidak	Tidak	
	Sorong	Ya	Ya	Tidak	Tidak			Tidak	Tidak	
Jumlah kabupaten		22	20	9	13	7	3.8	15	2	3.4

■ Ya ■ Tidak

(Sumber: Survei Kabupaten KOMPAK, Des 2019)

Catatan:

Data dikumpulkan melalui Survei Kabupaten KOMPAK terhadap petugas Bappeda.

SPM: Petugas ditanya 'Apakah [RPJMD] [RPKD] kabupaten mencakup target SPM?' (Ya/Tidak) dan 'Apakah kabupaten mengalokasikan dana untuk mencapai target SPM?' (Ya/Tidak). Analisis Penetapan Biaya SPM merujuk pada analisis yang sudah selesai dilakukan DAN hasil analisis digunakan untuk mengalokasikan DAK non-fisik.

'Digunakan kabupaten': Untuk SEPAKAT, petugas ditanya 'Dalam siklus perencanaan terakhir, apakah kabupaten melakukan analisis dan menggunakan hasil analisis SEPAKAT?'. Jawab (Ya/Tidak/Tidak Tersedia) untuk tujuh dokumen perencanaan (RPJMD, RPKD, SPKD, RAD, P2KD, Renja Daerah dan bahan presentasi). Angka di tabel merujuk pada jumlah dokumen yang menggunakan hasil analisis SEPAKAT. Untuk Analisis Kendala Anggaran, petugas ditanya 'Apakah kabupaten melakukan perubahan/penyesuaian berdasarkan analisis?' (Ya/Tidak/Tidak Tersedia).

'Tingkat Manfaat': 'Seberapa besar manfaat [SEPAKAT] dan/atau [Analisis Kendala Anggaran (kajian APBD)] untuk perencanaan?' Jawaban berdasarkan 5 skala Likert, 1 'Tidak berguna' to 5 'Sangat berguna'. Pertanyaan hanya ditujukan bagi kabupaten yang menggunakan SEPAKAT dan/atau Analisis Kendala Anggaran.

MEKANISME PENDANAAN DARI PEMERINTAH PUSAT

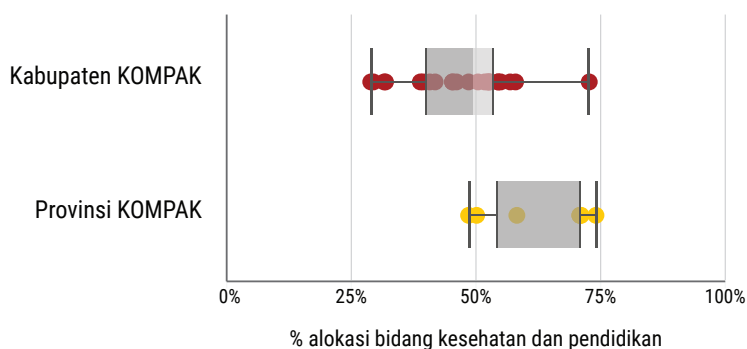
DAK FISIK DAN KRISNA

KOMPAK telah memberikan dukungan kepada Bappenas dan pemerintah kabupaten untuk merencanakan dan menggunakan pendanaan DAK Fisik secara lebih baik untuk pembangunan infrastruktur layanan dasar. Dukungan ini termasuk penyusunan dan pengajuan proposal pendanaan yang lebih terarah melalui KRISNA untuk layanan dasar prioritas. Pada 2019, KOMPAK memberikan pelatihan kepada 51 pemerintah kabupaten, termasuk semua kabupaten KOMPAK di luar wilayah Papua.

KOMPAK menilai keberhasilan berdasarkan pemerintah kabupaten yang berperan aktif dalam koordinasi proposal, implementasi dan manajemen informasi. Survei kabupaten menunjukkan bahwa hampir semua (22 dari 24) kabupaten melakukan pertemuan koordinasi rutin untuk persiapan proposal DAK Fisik. Survei ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten (21 dari 24) memperbarui data kesehatan dan pendidikan sebelum menyusun proposal. Hanya tiga kabupaten di Aceh yang belum melakukan hal yang sama.

Melalui upaya ini, KOMPAK bertujuan untuk meningkatkan pendanaan untuk layanan kesehatan dan pendidikan dasar. Berdasarkan data DAK Fisik 2019, kabupaten KOMPAK menetapkan alokasi yang hampir sama dengan rata-rata nasional (masing-masing 56% dan 55% untuk layanan pendidikan dan kesehatan). Alokasi tertinggi (73%) dilakukan Brebes, sedangkan Bireun dan Manokwari Selatan menetapkan alokasi terendah (masing-masing 23%).

Persentase alokasi DAK Fisik bidang kesehatan dan pendidikan oleh kabupaten dan provinsi



(Sumber: Kementerian Keuangan, alokasi DAK Fisik, 2019)

DAK NON-FISIK

Desember 2019, KOMPAK menerbitkan empat catatan kebijakan yang mengkaji penetapan biaya dan pemanfaatan DAK Non-fisik berdasarkan pengeluaran di sepuluh kabupaten. Catatan kebijakan ini memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan program asuransi untuk ibu hamil, pendidikan dan pengembangan anak usia dini, sertifikasi pendidikan bagi peserta didik yang tidak langsung melanjutkan pendidikan tinggi (*non-school leaver*) dan pencatatan sipil. Menindaklanjuti catatan kebijakan ini, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan memasukkan bagian dari rekomendasi tersebut ke dalam pedoman nasional tentang penggunaan DAK Non-fisik.

Bersama dengan Kementerian Keuangan, KOMPAK mengembangkan aplikasi pelaporan penggunaan DAK Non-fisik dan meluncurkan aplikasi ini pada bulan Juli. Pemerintah kabupaten dan provinsi dapat menggunakan aplikasi ini untuk menyerahkan laporan DAK Non-fisik secara elektronik, sehingga data yang dilaporkan dapat dikumpulkan untuk dianalisis oleh kementerian di tingkat pusat.

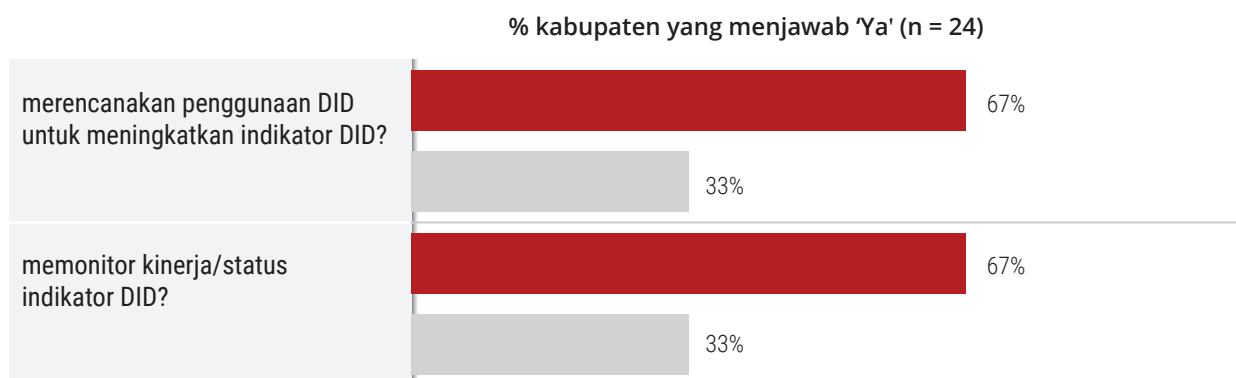
DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana tambahan yang dialokasikan Kementerian Keuangan untuk kabupaten berdasarkan kinerja pencapaian indikator kesehatan, pendidikan, pengelolaan keuangan, administrasi dan indikator lainnya yang ditentukan sebelumnya. KOMPAK memfasilitasi pertemuan dan lokakarya antarkementerian untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi perbaikan pada indikator dan rumus alokasi.

KOMPAK juga memberikan bantuan teknis kepada kabupaten untuk memonitor indikator dan menggunakan DID untuk meningkatkan kinerja. Dua per tiga kabupaten wilayah kerja KOMPAK telah merencanakan dan memantau dana dan indikator DID, tetapi masih ada tantangan dalam konsistensi pendanaan dari tahun ke tahun. Antara tahun 2019 dan 2020, kabupaten wilayah kerja KOMPAK mengalami peningkatan dan pengurangan pendanaan yang signifikan, tetapi secara keseluruhan menunjukkan tren positif, yaitu 77% provinsi dan kabupaten menerima dana DID pada 2020. Pendanaan DID berkurang di beberapa lokasi, seperti di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, karena persaingan ketat antara 34 provinsi dan 415 kabupaten se-Indonesia.

Dua per tiga kabupaten KOMPAK aktif merencanakan penggunaan DID untuk meningkatkan capaian indikator

Sehubungan dengan DID, apakah kabupaten melakukan rapat koordinasi dalam 6 bulan terakhir untuk:



(Sumber: Survei Kabupaten KOMPAK, Des 2019)

PEMBIAYAAN BERBASIS KINERJA

PEMBIAYAAN BERBASIS KINERJA DESA

KOMPAK melakukan uji coba model pembiayaan berbasis kinerja desa di enam kabupaten: Bima, Bantaeng, Sumbawa, Aceh Barat, Bener Meriah, dan Lumajang. Sejak model pertama diluncurkan pada 2017, KOMPAK, Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah mampu menguji berbagai indikator dan rumus alokasi dan mendokumentasikan pembelajaran sebagai masukan dalam pengembangan pendekatan nasional.

Pada 2019, KOMPAK mendukung Kementerian Keuangan³ menyelenggarakan empat lokakarya untuk memperbesar skala desain dan pengembangan sistem penilaian kinerja desa nasional sebagai dasar alokasi Dana Desa. Sistem penilaian ini disetujui Kementerian Keuangan⁴ dan diadopsi sebagai pendekatan nasional yang diimplementasikan pada 2020 dengan menggunakan 1,5% alokasi Dana Desa. Menggunakan rumus yang dikembangkan dari hasil analisis KOMPAK, pendekatan ini mengidentifikasi sepuluh persen desa yang menerima tambahan dana berdasarkan kinerja terhadap sepuluh indikator yang ditetapkan sebelumnya termasuk pengelolaan keuangan desa, layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Dana insentif berbasis kinerja ini akan dicairkan pertama kali pada 2021 sesuai dengan peningkatan indikator tahun 2019 dan 2020.

DANA OTONOMI KHUSUS (OTSUS)

DANA OTSUS DI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Papua dan Papua Barat merupakan dua provinsi di Indonesia yang masih tertinggal dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah. Dalam upaya mengurangi kesenjangan yang ada, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Otsus kepada pemerintah provinsi.

KOMPAK telah mendukung upaya Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas dalam Otsus Papua dengan memberikan bantuan teknis yang menghasilkan dua kajian utama pada 2019: sebuah laporan berjudul "Tinjauan Komprehensif Penggunaan Dana Otsus di Provinsi Papua" dan sebuah draf kajian akademis sebagai masukan penyusunan kajian akademis versi pemerintah sendiri untuk revisi Undang-Undang Otonomi Khusus.

Tinjauan Komprehensif menyajikan analisis pemanfaatan Dana Otsus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta kemajuan indikator peningkatan layanan dasar, peluang ekonomi dan akuntabilitas sosial. Analisis KOMPAK terhadap pemanfaatan Dana Otsus menunjukkan bahwa kedua provinsi tersebut masih membutuhkan kelanjutan Dana Otsus untuk mempercepat pembangunan daerah. Dengan adanya kemungkinan pemekaran provinsi, Dana Otsus akan sangat perlu untuk dilanjutkan dan dana tambahan akan diperlukan apabila terbentuk provinsi baru.

³ Melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

⁴ Berdasarkan UU No. 20/2019 tentang APBN 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019

Tinjauan Komprehensif juga mengkaji peraturan dan wewenang terkait, mekanisme tata kelola Dana Otsus, dan sumber dana alternatif misalnya pajak daerah dan pemasukan negara dari sumber daya alam seperti kehutanan, pertambangan dan perikanan. Temuan dan rekomendasi kajian telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta pemangku kepentingan lainnya.

BANGGA PAPUA

Bersama dengan program MAHKOTA DFAT, KOMPAK memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menguji coba program bantuan langsung tunai dari Dana Otsus yang berfokus pada perbaikan gizi anak Papua berumur empat tahun ke bawah.

Pada 2019, Program BANGGA Papua mendorong pemanfaatan Dana Otsus sebesar lebih dari Rp50 miliar (\$5 juta) sebagai bantuan langsung tunai untuk 31.917 anak-anak di kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, yaitu Kabupaten Asmat, Lanny Jaya, dan Paniai. KOMPAK memberikan dukungan kepada Sekretariat Bersama (Sekber) agar dapat bekerja lebih baik dan mengembangkan strategi komunikasi (yang dipimpin oleh salah satu mitra pelaksana yaitu BaKTI).

Strategi komunikasi tersebut bertujuan untuk membantu Sekretariat Provinsi dan Kabupaten (Sekber) berkomunikasi secara lebih efektif kepada masyarakat umum dan pemangku kepentingan politik tentang BANGGA Papua, termasuk menyampaikan pesan kepada pengasuh yang menerima bantuan langsung tunai. Pesan yang disampaikan berfokus untuk mempromosikan praktik pemenuhan gizi dan sanitasi yang baik untuk mengatasi masalah kurang gizi pada anak.

Pada Desember 2019, KOMPAK juga telah melakukan studi kelayakan tentang penggunaan *blockchain* dan teknologi lainnya untuk pembayaran bantuan langsung tunai. Studi ini merekomendasikan untuk memperbarui sistem informasi manajemen BANGGA Papua apabila teknologi *blockchain* diterapkan; namun, belum ada keputusan sampai saat ini dan ada kekhawatiran bahwa pendanaan pemerintah tidak akan tersedia untuk bantuan langsung tunai pada 2020, sehingga pembaruan sistem akan tertunda.

Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH)

ANALISIS SITUASI

Indonesia mencapai kemajuan substansial dalam peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak dari 53% tahun 2007 menjadi 84% tahun 2018⁵. Seiring dengan peningkatan cakupan tersebut, laju penambahan cakupan melambat menjadi 3,6% secara nasional sejak tahun 2015. Hal ini menunjukkan diperlukannya cara-cara yang lebih inovatif untuk meningkatkan cakupan.

Kementerian Dalam Negeri mengawasi layanan pencatatan sipil secara nasional, sementara KOMPAK bekerja sama dengan Bappenas dan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan PASH. Secara lebih spesifik, KOMPAK berfokus dalam mendukung pemerintah daerah mengadopsi model penjangkauan berbasis desa. KOMPAK juga memberikan bantuan teknis kepada Bappenas dalam penyusunan pedoman nasional implementasi Strategi Nasional PASH.

Masalah, tantangan dan rekomendasi utama:

- Peningkatan cakupan kepemilikan identitas hukum masih terhambat tantangan birokrasi pengurusan akta kelahiran dan dokumen lainnya. Keberhasilan KOMPAK terlihat nyata dalam peningkatan cakupan dokumen identitas hukum dengan menggabungkan layanan dukungan pencatatan sipil berbasis masyarakat, melalui fasilitator PASH desa yang dapat mengidentifikasi warga yang tidak memiliki dokumen identitas hukum dan membantu warga tersebut menyelesaikan proses pencatatan sipil, dengan proses yang cepat mulai dari pengajuan hingga penerbitan dokumen.
- Meskipun Bappenas sudah menjadi mitra utama KOMPAK dari Pemerintah Indonesia dalam PASH, dukungan dari Kementerian Dalam Negeri sangat penting agar implementasi pedoman nasional berjalan lancar. Keterlibatan Kementerian Dalam Negeri masih terbatas dalam upaya KOMPAK meningkatkan layanan PASH karena adanya tantangan memperoleh dukungan untuk menguji coba pendekatan baru.

PENTINGNYA PASH

Pencatatan sipil sangat penting untuk mencatat peristiwa dalam kehidupan misalnya kelahiran, pernikahan, perceraian, dan kematian. Selain memberikan identitas hukum dan akses terhadap layanan, pencatatan sipil mengumpulkan statistik hayati tentang jumlah dan penyebaran penduduk, termasuk kelompok rentan, yang berguna bagi pengambil keputusan dalam perumusan kebijakan dan pengembangan program.

⁵ BPS (2019). Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

INISIATIF NASIONAL

STRATEGI NASIONAL PENGUATAN ADMINDUK DAN STATISTIK HAYATI (PASH)

Pada September 2019, Pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional untuk Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH)⁶ 2019-2024. Penyusunan strategi ini didukung oleh KOMPAK, PUSKAPA, dan kelompok penyusun lainnya, termasuk POKJA Identitas Hukum (POKJA ID) dan UNICEF. POKJA ID adalah kelompok yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil⁷ yang dibentuk oleh PUSKAPA untuk memberikan masukan pada kebijakan dan kegiatan PASH. Strategi Nasional PASH memaparkan rencana lima pilar untuk mempercepat cakupan kepemilikan identitas hukum dari 2019 hingga 2024 melalui:

- Perluasan layanan identitas hukum;
- Peningkatan kesadaran dan keproaktifan masyarakat untuk melakukan pencatatan peristiwa hayati;
- Penetapan target dan penjangkauan secara spesifik terhadap kelompok rentan;
- Pengembangan statistik hayati yang lebih akurat, lengkap dan tepat waktu; dan
- Penguatan kolaborasi lintas sektoral dalam layanan identitas hukum.

Sebagai pelengkap Strategi Nasional PASH, KOMPAK mendukung penyusunan pedoman teknis tentang pemberian layanan pencatatan sipil berbasis desa. Pedoman yang akan diadopsi oleh Bappenas pada tahun 2020 ini mencakup administrasi umum layanan berbasis desa, perekrutan fasilitator PASH, pengumpulan dan verifikasi data penduduk, proses penerbitan dokumen identitas hukum serta koordinasi antara fasilitator desa dengan kantor Dukcapil tingkat kabupaten. Pedoman ini didasarkan pada pembelajaran yang didapat dari uji coba model di lokasi KOMPAK.

KESIAPAN DAN TANGGAP DARURAT LAYANAN PENCATATAN SIPIL

Gempa bumi di Lombok tahun 2018 menunjukkan perlunya membangun kembali layanan pencatatan sipil secara cepat agar penduduk yang terdampak dapat secara mudah mengakses layanan dan membangun kembali kehidupan mereka. KOMPAK melakukan kajian pada 2019 untuk menganalisis tanggap darurat pencatatan sipil dan bagaimana meningkatkannya. Laporan akhir dan temuannya digunakan untuk perumusan pedoman nasional dan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Bappenas pada awal 2020.

KAJIAN TENTANG DEFINISI KELOMPOK RENTAN

Atas permintaan Bappenas, KOMPAK telah melakukan kajian untuk lebih memahami hubungan antara kepemilikan identitas hukum dan kerentanan. Kajian ini akan diterbitkan pada awal 2020. Komponen utama kajian ini adalah mendefinisikan apa 'kelompok rentan' dan siapa yang termasuk 'kelompok rentan'. Kajian ini akan membantu perancangan layanan identitas hukum, program perlindungan sosial dan monitoring yang lebih inklusif dan responsif.

⁶ Perpres No. 62 Tahun 2019

⁷ POKJA ID terdiri dari IKI, KEMITRAAN, PEKKA, LBH APIK, LAKPESDAM NU, dan PERCA Indonesia

Sementara studi ini belum diterbitkan, para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, anggota POKJA ID, dan LSM, telah menyepakati definisi umum yang membagi kelompok rentan ke dalam tiga kategori, yaitu orang terpinggirkan karena:

- Kurangnya akses terhadap layanan, misalnya masyarakat di daerah terpencil, miskin atau buta huruf;
- Sistem dan layanan yang tidak responsif terhadap anggota masyarakat yang terdampak bencana, disabilitas, pengungsian, atau pernikahan anak; dan
- Diskriminasi identitas sosial, misalnya kelompok masyarakat adat and kelompok minoritas seksual (transgender, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, pekerja seks, dan lainnya).

PENGEMBANGAN INDEKS KEMUDAHAN BERWARGANEGARA DI INDONESIA (EOBI)

Bappenas sedang mengembangkan Indeks Kemudahan Berwarganegara di Indonesia (EOBI) untuk mengukur kemudahan akses ke identitas hukum dan layanan dasar serta cakupan kepemilikan dokumen identitas hukum. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbandingan antarwilayah dan area yang perlu diperbaiki, termasuk memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh berbagai kelompok, seperti perempuan dan kelompok rentan, saat mengakses layanan identitas hukum. KOMPAK dan PUSKAPA telah memberikan bantuan teknis pada pengembangan indikator dan desain model uji coba yang dijadwalkan untuk implementasi pada tahun 2020.

INISIATIF DAERAH

PENGUATAN PASH DESA

KOMPAK, PUSKAPA, dan Bappenas telah menguji coba model di semua kabupaten KOMPAK di luar Papua dan Papua Barat (16 dari 24) yang melibatkan fasilitator PASH desa di desa-desa dan terhubung dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten serta unit layanan (sekolah, klinik, dan rumah sakit). Pada akhir 2019, sekitar setengah dari kabupaten (13 dari 24) telah melembagakan peraturan dan mengalokasikan anggaran untuk model ini dan KOMPAK memulai persiapan untuk menguji coba model ini di Papua dan Papua Barat.

Survei Desa KOMPAK membuktikan 70% desa memiliki petugas khusus layanan PASH, baik fasilitator PASH Desa (29%) maupun pejabat desa yang menyediakan layanan PASH (41%). Desa-desa ini juga memiliki kinerja yang jauh lebih baik daripada desa tanpa petugas khusus layanan PASH. Survei menunjukkan bahwa desa-desa dengan petugas khusus layanan identitas hukum membantu rata-rata lima kali lebih banyak orang untuk mendapatkan akta kelahiran dibandingkan desa tanpa petugas khusus (65 dibandingkan dengan 13 per desa, disesuaikan dengan populasi). Namun, tidak ada perbedaan signifikan dalam layanan untuk menjangkau para penyandang disabilitas (2,6 dibandingkan dengan 2,9 per desa).

Provinsi berkinerja terbaik adalah Aceh, NTB, dan Sulawesi Selatan. Di Aceh dan Sulawesi Selatan, semua desa KOMPAK memiliki fasilitator PASH desa, sedangkan NTB memiliki fasilitator dan pejabat desa yang khusus memberikan layanan PASH. Kabupaten yang paling efektif dalam mempercepat cakupan adalah kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Barat yang melaporkan 108 per 1.000 orang telah mendapatkan akta kelahiran dalam enam bulan terakhir. Peningkatan tinggi juga diperoleh di NTB dan Sulawesi Selatan.

Aceh dan NTB menggunakan berbagai strategi untuk mempercepat cakupan. Di NTB, KOMPAK dan mitra memberikan dukungan melalui pelatihan, bantuan teknis dan uji coba model untuk setiap kantor Dukcapil kabupaten. Inisiatif-inisiatif peningkatan cakupan termasuk:

- Membentuk kelompok kerja tingkat kabupaten, yang terdiri dari perwakilan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten, dinas kesehatan dan pendidikan, serta unit layanan untuk berbagi pengalaman dan mengidentifikasi pendekatan inovatif.
- Di Bima, kantor Dukcapil menjangkau masyarakat dengan langsung mengunjungi kecamatan yang berbeda setiap akhir minggu. Pemerintah kabupaten juga mengalokasikan dana insentif bagi bidan untuk melaporkan kelahiran secara tepat waktu dan akurat. Tiga desa terbaik dapat menerima Rp5 juta (\$530).
- Di Lombok Utara dan Lombok Timur, kantor Dukcapil dapat mengurus akta kelahiran secara daring, melalui WhatsApp, sehingga sangat memudahkan penyandang disabilitas.

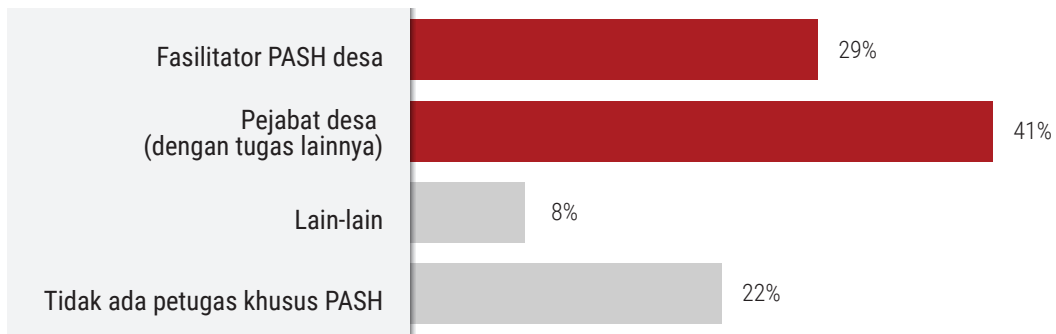
Di Aceh, KOMPAK bermitra dengan pemerintah kabupaten untuk memobilisasi dana untuk pelatihan pencatatan sipil bagi 2.000 pejabat pemerintah dari 11 kabupaten dan kota. NTB dan Aceh juga memanfaatkan program universitas berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN)/UMD untuk mengunjungi masyarakat dalam upaya mengidentifikasi dan mendukung orang yang belum memiliki dokumen identitas hukum untuk mengakses layanan.

Pendekatan lain untuk mempercepat cakupan adalah mengadakan hari pencatatan sipil masyarakat. Dikenal sebagai KLIK-PEKKA, inisiatif ini dilakukan di 22 desa di lima provinsi dan menghubungkan lebih dari 5.000 anggota masyarakat (69% perempuan) dengan layanan untuk dokumen identitas hukum dan pendaftaran program perlindungan sosial.

KOORDINASI KECAMATAN

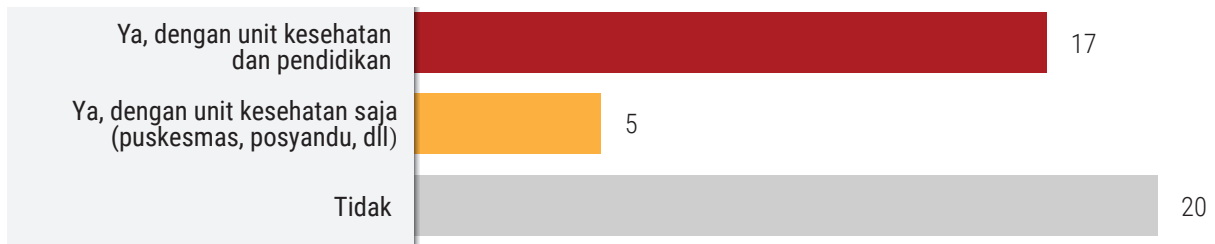
Kecamatan juga berpotensi untuk melakukan peran sinergis, membantu mengoordinasikan berbagai tingkat pemerintah untuk mengidentifikasi daerah berkinerja buruk dan untuk menghubungkan sekolah, klinik, dan rumah sakit dengan lebih baik, sehingga bayi baru lahir dan anak-anak dari keluarga miskin dapat lebih mudah menjangkau layanan identitas hukum. Masih ada ruang untuk meningkatkan fungsi ini dan mendelegasikan beberapa fungsi kantor kabupaten ke kecamatan. Hanya sekitar setengah dari kecamatan (22) melaporkan telah berperan aktif dalam koordinasi PASH dengan unit layanan kesehatan dan pendidikan.

Siapa yang memberikan layanan pencatatan sipil di desa? (n = 418)



(Sumber: Survei Desa KOMPAK, Des 2019)

Apakah kecamatan (didukung Dukcapil) mengkoordinasi layanan untuk menjangkau unit layanan (kesehatan dan pendidikan) untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dalam enam bulan terakhir? (n = 42)



(Sumber: Survei Kecamatan KOMPAK, Des 2019)

70% desa memiliki petugas khusus layanan pencatatan sipil

Petugas khusus layanan pencatatan sipil di desa

PETUGAS	PROVINSI KOMPAK (SELAIN PAPUA)					PAPUA & PAPUA BARAT		TOTAL
	ACEH	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	NTB	SULAWESI SELATAN	PAPUA	PAPUA BARAT	
Fasilitator PASH desa	23	18	23	30	17	9		120
Pejabat desa (dengan tugas lainnya)		13	72	52		10	25	172
Lain-lain				6		5	23	34
Tidak ada petugas khusus PASH		2		14		37	39	92
Total	23	33	95	102	17	61	87	418

(Sumber: Survei Kecamatan KOMPAK, Des 2019)

Rata-rata jumlah orang per desa yang diberikan layanan pencatatan sipil



(Sumber: Survei Kecamatan KOMPAK, Des 2019)

LAYANAN PASH UNTUK PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS

Fasilitator PASH desa dilibatkan di desa-desa untuk menjangkau masyarakat, terutama masyarakat paling rentan. Pada 2019, 40% desa melaporkan telah menjangkau 1.520 orang penyandang disabilitas. Provinsi berkinerja terbaik adalah Sulawesi Selatan dan Aceh, dengan 80% desa melaporkan layanan menjangkau setidaknya satu orang penyandang disabilitas dalam enam bulan terakhir. Provinsi lainnya masih belum mencapai setengah dari keseluruhan jumlah desa. Temuan ini menyoroti bahwa masih ada ruang yang cukup besar untuk meningkatkan layanan PASH desa bagi para penyandang disabilitas.

EFEKTIVITAS UPAYA PASH

KOMPAK dapat menilai kemajuan pencatatan sipil menggunakan tiga sumber utama: 1) Survei Desa, yang memberikan wawasan tentang cakupan dan tingkat kegiatan; 2) SUSENAS tahunan, yang merupakan survei yang dipimpin pemerintah menggunakan sampel nasional termasuk perkiraan cakupan kepemilikan akta kelahiran; dan, 3) kajian independen yang dipimpin PUSKAPA menilai dampak intervensi KOMPAK PASH selama tiga tahun terakhir. Tiga metode ini menunjukkan NTB dan Aceh sebagai provinsi berkinerja terbaik, sedangkan Papua masih harus mengejar ketertinggalan.

TEMUAN AWAL DARI KAJIAN PASH DI WILAYAH KERJA KOMPAK

Pada 2019, PUSKAPA melakukan kajian untuk menilai kemajuan pencapaian tujuan PASH dan mengidentifikasi perubahan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan desain program PASH di tingkat daerah. Kajian ini menggunakan pengumpulan data metode campuran (survei rumah tangga, wawancara, mendalam, dan diskusi kelompok terarah/FGD) yang mencakup sepuluh kabupaten wilayah kerja KOMPAK di lima provinsi⁸. Kajian ini bertujuan untuk menilai perubahan terkait PASH antara 2015 dan 2019 dan untuk menelaah kontribusi kegiatan yang didukung KOMPAK, jika ada.

Kajian ini akan diterbitkan pada awal 2020 dan temuan awal menunjukkan bahwa kepemilikan dokumen identitas hukum meningkat: 74% responden memiliki akta kelahiran (sebelumnya 64% pada 2015), 84% memiliki akta nikah (sebelumnya 66%) dan 99% memiliki kartu keluarga (sebelumnya 90%). Tantangan dalam mempertahankan metode pengambilan sampel yang sama antara 2015 dan 2019 menyebabkan penelitian ini tidak dapat menyimpulkan secara pasti bahwa peningkatan ini tercapai melalui intervensi KOMPAK saja.

Kajian ini juga menemukan bahwa model fasilitator PASH desa berkontribusi untuk mempromosikan pencatatan sipil di tingkat desa dan membuktikan bahwa bantuan KOMPAK menghasilkan sistem dan prosedur yang lebih baik dan peningkatan kapasitas pejabat daerah. Kajian ini juga menunjukkan kolaborasi lintas sektoral yang lebih kuat (misalnya layanan kesehatan dan pendidikan), alokasi anggaran yang lebih baik untuk layanan pencatatan sipil, dan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses pembangunan desa.

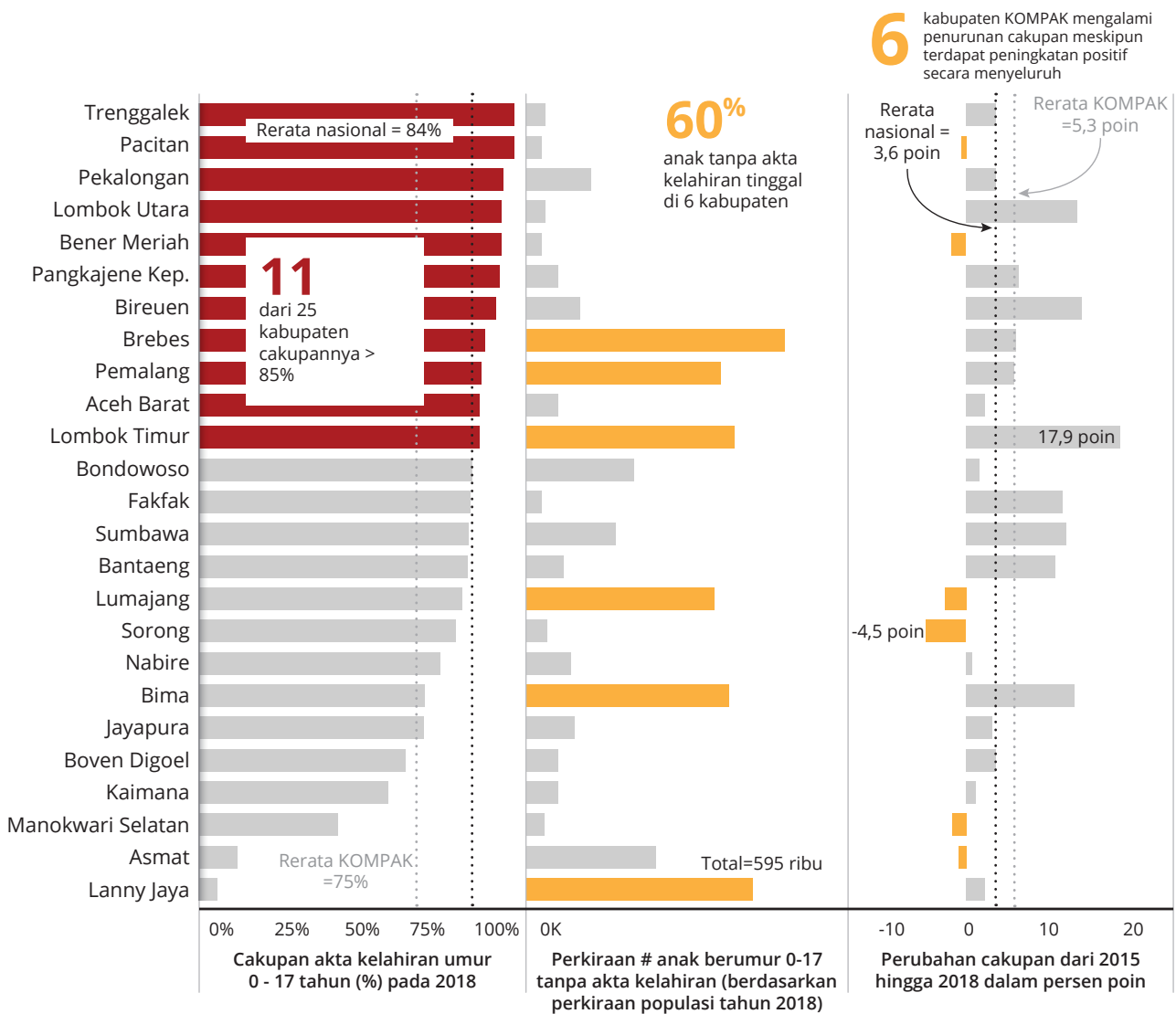
KINERJA BERDASARKAN SURVEI SUSENAS

Survei tahunan SUSENAS memberikan informasi tentang kinerja kabupaten dalam percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran (yang digunakan untuk mewakili administrasi kependudukan secara lebih luas). Berdasarkan survei 2018 (survei terakhir yang tersedia), kabupaten KOMPAK telah secara keseluruhan melakukan kinerja yang lebih baik dengan peningkatan 5,3% poin dibandingkan rerata kinerja secara nasional, yaitu 3,4% poin dari tahun 2015 hingga 2018.

⁸ Aceh Barat dan Bener Meriah di Aceh, Pemalang dan Pekalongan di Jawa Tengah, Pacitan dan Bondowoso di Jawa Timur, Pangkep dan Bantaeng di Sulawesi Selatan, serta Bima dan Lombok Timur di NTB.

NTB mencatatkan peningkatan paling tinggi dalam cakupan kepemilikan dokumen kependudukan hingga 13,9% selama empat tahun terakhir (SUSENAS, 2018). Daerah yang kinerjanya kurang sebagian besar adalah di Papua dan Papua Barat, yang memiliki cakupan kepemilikan akta kelahiran yang sangat rendah dan belum mencapai peningkatan yang terlihat. KOMPAK tidak terlibat dalam kegiatan PASH di Papua dan Papua Barat dalam periode ini, tetapi menimbang rendahnya cakupan, perencanaan kegiatan ini dituangkan dalam rencana kerja 2020.

Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak umur 0-17 tahun (SUSENAS, 2018)



Penguatan Kecamatan dan Desa

ANALISIS SITUASI

Transfer anggaran tahunan antara 2015 dan 2020 ke 75.000 desa meningkat dari Rp21 triliun (\$2,2 miliar) menjadi Rp72 triliun (\$7,6 miliar)⁹. Peningkatan hampir empat kali lipat ini menjadi dasar diperlukannya peningkatan kapasitas pemerintah desa untuk menggunakan dana ini secara efektif dan efisien.

Sebagai tanggapan, Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Strategi Nasional Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) pada 2017. Strategi ini menyediakan fasilitator Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dan model Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD), dengan KOMPAK sebagai mitra utama dalam pengembangan dan implementasi strategi ini.

Model ini sekarang sedang diadopsi oleh Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari proyek senilai US\$300 juta, dikenal sebagai Program Penguatan dan Pembangunan Pemerintahan Desa (P3PD), untuk meningkatkan kapasitas aparat desa di 350 dari 416 kabupaten yang menerima Dana Desa.

Masalah, tantangan dan rekomendasi utama:

- Peran berbagai kementerian dan lembaga daerah yang mendukung kecamatan dan desa menghasilkan panduan yang saling bertentangan dalam perencanaan dan penganggaran Dana Desa serta implementasinya. Masalah ini juga menjadi semakin rumit karena ketidaksesuaian kerangka hukum dan peraturan, sehingga peran dan tanggung jawab untuk implementasi UU Desa menjadi kurang jelas.
- Dengan penerapan desentralisasi, kecamatan memiliki peran yang lebih besar dalam mengawasi koordinasi, supervisi dan monitoring desa dan unit layanan. Namun, kecamatan tidak memiliki kapasitas, panduan yang jelas, atau alokasi dana yang memadai untuk menjalankan fungsi ini.
- Penting bagi semua mitra pembangunan dan DFAT untuk menyepakati pendekatan terbaik dan untuk menyampaikan pesan berbasis bukti yang konsisten kepada kementerian terkait dan pimpinan politik guna mengadvokasi perumusan dan penetapan sebuah peraturan payung implementasi UU Desa.
- Sejalan dengan implementasi P3PD, penting untuk memonitor efektivitas PTPD dan PbMAD untuk memastikan pelaksanaan secara konsisten. KOMPAK dan Bank Dunia berencana untuk menggunakan P3PD untuk melembagakan model PTPD dan PbMAD, serta membantu menstandarisasi dan meningkatkan sistem informasi dan pelaporan pengelolaan keuangan desa dan kecamatan.

⁹ Transfer anggaran tahunan antara 2015 dan 2020 ke 75.000 desa meningkat dari Rp21 triliun (\$2,2 milyar) menjadi Rp72 triliun (\$7,6 milyar). Kementerian Keuangan (2020). Diakses pada: <https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf>

CAKUPAN DAN PELEMBAGAAN MODEL PENGUATAN KECAMATAN DAN DESA

KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG PENGUATAN KECAMATAN DAN DESA

Di tingkat nasional, desa menerima panduan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kemendesa PDTT serta transfer anggaran langsung dari Kementerian Keuangan. Peran tumpang tindih dari kementerian-kementerian ini beserta dengan arahan dari provinsi dan kabupaten mengakibatkan serangkaian kerangka kerja hukum dan peraturan menjadi rumit dan terkadang bertentangan serta peran dan tanggung jawab yang tidak jelas.

KOMPAK bekerja sama dengan kementerian-kementerian ini untuk membantu mengartikulasikan visi bersama pemerintah, guna merumuskan strategi peningkatan regulasi dan koordinasi, serta menyusun pedoman dan pelatihan standar untuk kecamatan dan desa, antara lain:

- Menyusun catatan kebijakan sebagai bahan informasi penyusunan RPJMN 2020-2024. Catatan kebijakan ini mencakup penguatan kapasitas dan fasilitasi desa, layanan dasar dan SPM, pengawasan, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, pembangunan pedesaan dan sumber daya alam.
- Pada Oktober 2019, KOMPAK dan Bank Dunia merilis lima ringkasan kebijakan yang menjabarkan berbagai isu dan rekomendasi untuk meningkatkan regulasi dan koordinasi. Selain itu, terdapat rekomendasi untuk mengembangkan dan mengadopsi satu peraturan (PP) untuk implementasi UU Desa. Ringkasan kebijakan ini juga mengadvokasi agar peran kecamatan dapat diperluas dan masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses perencanaan.
- Bersama Kementerian Dalam Negeri menyusun pedoman nasional dan paket pelatihan untuk penguatan kecamatan, termasuk publikasi pedoman tentang strategi PKAD Terpadu, model fasilitator PTPD, dan pelatihan desa. Pedoman dan paket pelatihan lainnya sedang dikembangkan untuk mendukung monitoring kinerja kecamatan dan camat.

CAKUPAN, EFEKTIVITAS DAN PELEMBAGAAN MODEL PTPD

Pada 2019, KOMPAK mencapai kemajuan yang baik dalam upaya melembagakan model PTPD dan mendukung kecamatan memperluas penerapan model tersebut. KOMPAK mendukung pemerintah kabupaten untuk menyusun peraturan mengenai delegasi wewenang dan alokasi pendanaan dari bupati kepada camat. Hasilnya, 15 dari 24 kabupaten wilayah kerja KOMPAK telah melembagakan kebijakan ini, sehingga kecamatan memiliki sumber daya dan mandat untuk berperan lebih aktif mendukung dan memonitor desa dan unit layanan.

Peraturan dan pendanaan kabupaten menjadi dasar untuk replikasi di seluruh kecamatan wilayah kerja KOMPAK. Model PTPD telah diadopsi oleh seluruh 42 kecamatan wilayah kerja KOMPAK dan bukti menunjukkan bahwa model ini juga diterapkan di kecamatan lain. Lima dari 24 kabupaten wilayah kerja KOMPAK melaporkan 100 persen cakupan PTPD dan 28 persen dari 388 kecamatan di kabupaten wilayah kerja KOMPAK sedang dalam proses melembagakan model PTPD.

Perlu upaya lebih lanjut agar kecamatan mendapat dana yang memadai dan konsisten. Satu dari empat kecamatan tidak menerima dana pada 2019 untuk implementasi model PTPD dan hanya sekitar dua persen anggaran kabupaten yang dialokasikan kepada kecamatan. KOMPAK mulai memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri tentang klasifikasi dan nomenklatur anggaran belanja kecamatan agar kecamatan dapat mengajukan anggaran tahunan untuk implementasi kegiatan (termasuk PTPD) pada tahun 2020.

Model PTPD KOMPAK yang memungkinkan kecamatan memberikan dukungan teknis kepada desa telah membantu desa merencanakan, mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang terbatas secara lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Model ini telah direplikasi di lebih dari 100 kecamatan dan diperluas secara nasional oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.

KOMPAK mendukung penerapan model fasilitator PTPD di seluruh 42 kecamatan KOMPAK. Dari 42 kecamatan, 22 kecamatan memiliki kantor tata kelola desa (Klinik Desa). Klinik Desa berpusat di kecamatan dan berfungsi sebagai kantor yang dapat dikunjungi perwakilan pemerintahan desa yang memerlukan bantuan. Secara rata-rata, terdapat 5,5 fasilitator PTPD per kecamatan, paling banyak di Aceh dan Jawa Tengah, sedangkan paling sedikit di Papua dan Papua Barat.

Model PTPD terbukti berhasil. Berdasarkan Survei Desa, semua desa di luar Papua mendapat bantuan teknis dari fasilitator PTPD dalam enam bulan terakhir dan sebagian besar menyatakan bantuan teknis tersebut sangat berguna untuk perencanaan, penganggaran, koordinasi dan fungsi inti lainnya. Survei Desa menunjukkan 325 desa yang mendapat bantuan memberikan nilai rata-rata 4,2 dari 5 terhadap kategori 'manfaat', salah satu dari tujuh kategori bantuan yang diberikan fasilitator PTPD.

Hampir setengah dari seluruh kecamatan KOMPAK memberikan dukungan kepada desa setidaknya setiap bulan. Kinerja yang harus diperbaiki terutama di wilayah Papua karena model PTPD belum diimplementasikan sepenuhnya. Evaluasi model PTPD yang direncanakan pada 2020 akan memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai frekuensi dan efektivitas dukungan ini.

Cakupan, replikasi dan pelebagaan model PTPD

Provinsi	Kabupaten	# kecamatan	# kecamatan dengan PTPD	% kecamatan dengan PTPD	Anggaran kabupaten		Apakah ada peraturan kabupaten tentang:	
					Total anggaran kabupaten 2020 (APBD)	% anggaran kabupaten dialokasikan ke kecamatan	Delegasi wewenang dari bupati ke camat	Alokasi dana ke kecamatan
Aceh	Aceh Barat	12	1	8%	1,441M	2%		
	Bener Meriah	10	6	60%	1,032M	0%		
	Bireuen	17	1	6%	1,893M	0%		
Jawa Tengah	Brebes	17	5	29%	3,271M	2%		
	Pekalongan	19	19	100%	2,447M	0%		
	Pemalang	14	1	7%	2,582M	1%		
Jawa Timur	Bondowoso	23	4	17%	2,050M	1%		
	Lumajang	21	3	14%	2,410M	3%		
	Pacitan	12	2	17%	1,716M	0%		
	Trenggalek	14	4	29%	2,075M	2%		
NTB	Bima	18	18	100%	2,090M	0%		
	Lombok Timur	21	21	100%	2,797M	2%		
	Lombok Utara	5	5	100%	1,078M	2%		
	Sumbawa	24	2	8%	1,856M	3%		
Sulawesi Selatan	Bantaeng	8	8	100%	1,050M	2%		
	Pangkep	13	1	8%	1,431M	0%		
Papua	Asmat	23	0	0%	1,500M	4%		
	Boven Digoel	20	0	0%	1,375M	5%		
	Jayapura	19	2	11%	1,344M	2%		
	Nabire	15	3	20%	1,200M	0%		
Papua Barat	Fakfak	17	3	18%	1,251M	5%		
	Kaimana	7	0	0%	1,153M	2%		
	Manokwari Selatan	6	0	0%	738M	2%		
	Sorong	33	0	0%	1,645M	0%		
Total		388	109	28% (rerata)	41,425M	2% (rerata)	21	16

(Sumber: Survei Desa KOMPAK, Des 2019)

■ Ya
■ Tidak

Semua kecamatan memiliki setidaknya satu fasilitator PTPD dan sekitar setengahnya memiliki Klinik Desa aktif

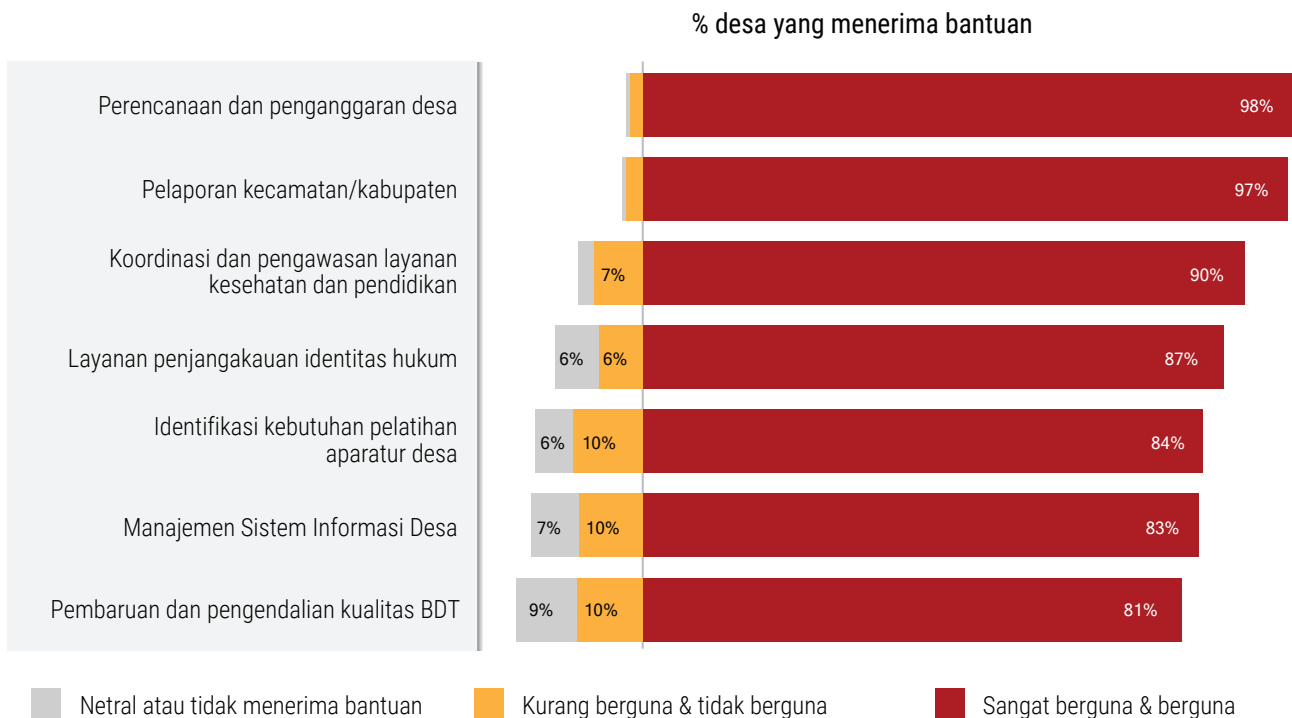
Cakupan Klinik Desa dan fasilitator PTPD di tingkat kecamatan (survei kecamatan)

Provinsi	# kecamatan	# Klinik Desa	# petugas kecamatan	# fasilitator PTPD	Rata-rata # fasilitator PTPD per kecamatan
Aceh	3	3	94	44	
Jawa Tengah	3	2	56	41	
Jawa Timur	8	5	171	50	
NTB	9	8	204	49	
Sulawesi Selatan	2	0	37	12	
Papua	9	2	274	16	
Papua Barat	8	2	185	21	
Total	42	22	1.021	233	

(Sumber: Survei Kecamatan KOMPAK, Des 2019)

Hampir semua desa yang menerima bantuan fasilitator PTPD menyatakan bantuan tersebut bermanfaat

Seberapa besar manfaat yang diterima dari bantuan kecamatan dan fasilitator PTPD dalam: (n = 325)



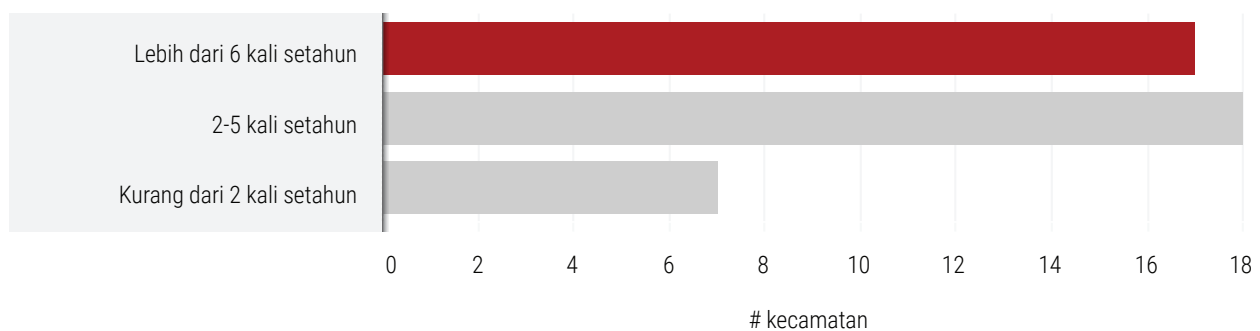
(Source: KOMPAK Village Survey, Dec 2019)

MONITORING DAN KOORDINASI KECAMATAN

KOMPAK juga telah memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada pemerintah kecamatan untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pemantauan dan koordinasi. Terdapat hasil yang beragam pada frekuensi dan jenis rapat koordinasi yang diadakan. Sekitar 40% kecamatan menyatakan rapat koordinasi rutin diadakan setiap dua bulan bersama desa dan unit layanan. Hasil ini ditriangulasikan dengan Survei Desa yang menunjukkan bahwa paling sering rapat koordinasi diadakan untuk membahas bidang kesehatan, kemudian bidang pendidikan dan PASH. Sekitar setengah dari kecamatan (22) melaporkan bahwa kunjungan penjangkauan ke pemerintah desa dilakukan setiap bulan sekali atau lebih.

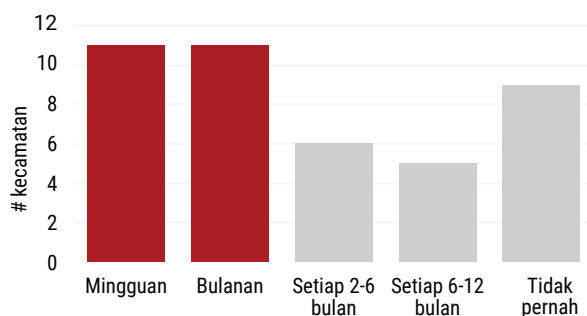
40% kecamatan melakukan rapat lintas sektoral setidaknya dua bulan sekali

Seberapa sering kecamatan melakukan rapat koordinasi lintas setoral bersama desa dan unit layanan? (n = 42)



(Sumber: Survei Kecamatan KOMPAK, Des 2019)

Seberapa sering, rata-rata, fasilitator PTPD melakukan kunjungan ke desa? (n = 42)



(Sumber: Survei Kecamatan KOMPAK, Des 2019)

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INKLUSIF DESA

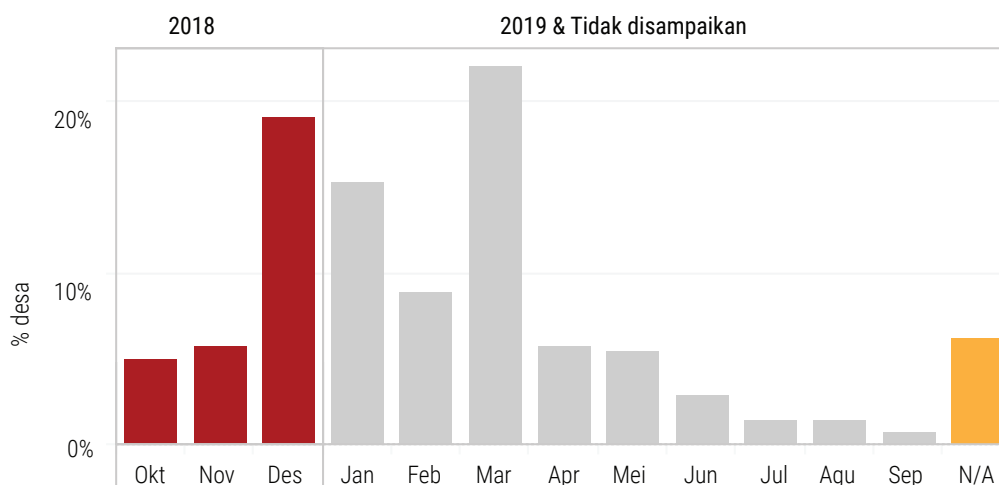
MEMPERKUAT KAPASITAS DESA DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INKLUSIF UNTUK PENYEDIAAN LAYANAN

Kecamatan dipandang sebagai mekanisme utama untuk memberikan bantuan teknis perencanaan dan penganggaran kepada pemerintah desa melalui model PTPD dan PbMAD. Pemerintah desa juga harus mengimplementasikan forum perencanaan desa (Musrenbang) yang inklusif yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan. Apabila upaya ini berjalan secara efektif, pemerintah desa harus memiliki akses ke sistem pengelolaan keuangan, menyampaikan anggaran APB Desa secara tepat waktu, dan mengalokasikan dana untuk prioritas masyarakat. Survei Desa menunjukkan bahwa:

- Semua desa di luar Papua dan Papua Barat menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sistem pengelolaan keuangan desa secara elektronik. Namun, 46 desa di Papua dan Papua Barat tidak memiliki instalasi sistem ini atau jika sistem ini ada, pengguna sistem tidak terlatih.
- Hanya sekitar satu dari tiga desa yang menyampaikan APB Desa secara tepat waktu. Di NTB, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat, lebih dari 80% desa mengajukan anggaran setelah batas waktu bulan Desember. Pada bulan Maret, terjadi lonjakan pengajuan karena bupati biasanya menerbitkan keputusan tentang dana desa dan pemerintah desa dapat melakukan perubahan pada anggaran.
- Hampir semua desa di luar Papua dan Papua Barat melaporkan bahwa perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya terwakili dalam Musrenbang terakhir. Di empat kabupaten di Papua dan Papua Barat, kurang dari 30% desa menyatakan Musrenbang dilakukan secara inklusif.

1 dari 3 desa menyampaikan APB Desa tepat waktu

Kapan desa menyampaikan APB Desa pada siklus perencanaan terakhir (2019)? (n = 418)



(Sumber: Survei Desa KOMPAK, Des 2019)

MUSRENBANG INKLUSIF (MUSYAWARAH KHUSUS)

Untuk meningkatkan inklusivitas dalam perencanaan dan penganggaran desa, KOMPAK dan Kementerian Desa PDTT sedang mengujicoba model untuk mengidentifikasi dan mendukung anggota masyarakat yang rentan termasuk perempuan, penyandang cacat dan lainnya untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan sebelum proses Musrenbang biasa berlangsung. Forum perencanaan ini dikenal sebagai Musyawarah Khusus. Melalui Musyawarah Khusus, kelompok rentan dapat menyusun prioritasnya dan bersama-sama melakukan advokasi. Model ini awalnya diuji coba di Kabupaten Aceh Barat tetapi telah berkembang ke daerah lainnya. Penerapan model ini didukung kuat di Aceh, NTB serta Kabupaten Pacitan dan Trenggalek di Jawa Timur. KOMPAK bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi ini untuk menyusun pedoman model Musyawarah Khusus, yang akan dapat diadopsi oleh kabupaten lain.

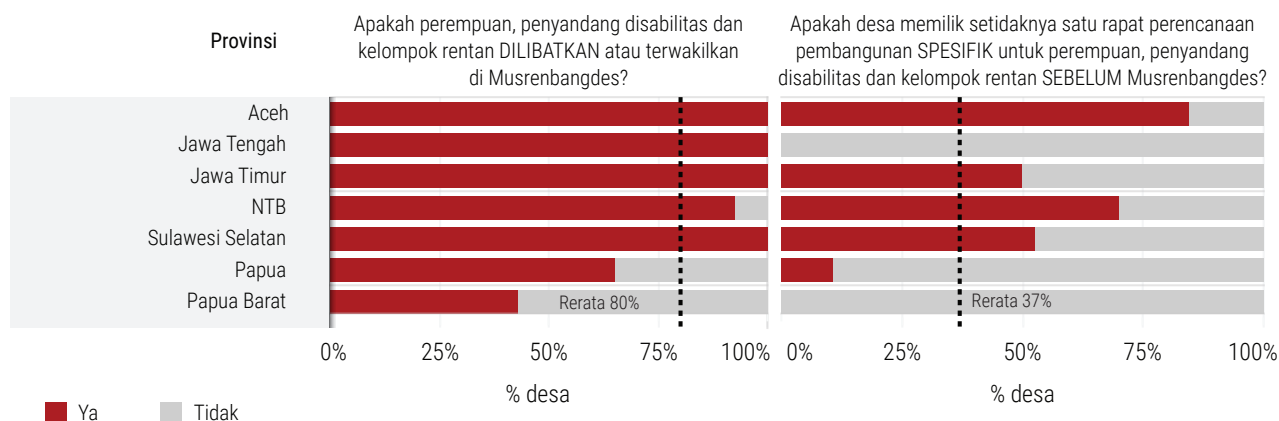
Sebuah tinjauan oleh tim Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial KOMPAK pada bulan September 2019 menemukan bahwa model ini secara keseluruhan efektif melibatkan perempuan dan kelompok rentan, tetapi ada hal yang perlu ditingkatkan sebelum model ini diperluas lebih lanjut. Tinjauan ini mencatat pentingnya memiliki fasilitator yang terlatih, dan idealnya lebih dari satu fasilitator. Fasilitator perlu diberikan pelatihan pemahaman pedoman dan idealnya berasal dari desa. Hasil pengamatan menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan, terutama anggota kelompok perempuan lokal. Anak-anak dan penyandang disabilitas kurang aktif terlibat kecuali secara langsung diminta memberi masukan. Selain itu, formulir proposal rumit dan kurang dapat dimengerti oleh peserta buta huruf, dan diperlukan metode untuk mengumpulkan proposal secara partisipatif. KOMPAK sedang menyesuaikan desain model berdasarkan rekomendasi ini.

Beberapa contoh proposal yang dimasukkan ke dalam Dana Desa termasuk:

Desa Pucangombo, Pacitan, Jawa Timur	Desa Pringapus, Trenggalek, Jawa Timur
<ul style="list-style-type: none"> • Alat bantu dengar dan kursi roda untuk penyandang disabilitas • Perbaikan 20 rumah masyarakat miskin • Bantuan beras untuk orang lansia dan miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Tambahan makanan dan selimut untuk penyandang disabilitas • Implementasi rapat perencanaan pembangunan untuk perempuan dan kelompok rentan • Pendidikan masyarakat dan bantuan suplemen makanan untuk mencegah <i>stunting</i>

Kelompok rentan dilibatkan dalam forum perencanaan desa, pendekatan yang lebih inklusif dapat ditingkatkan

Inklusivitas forum perencanaan desa (n = 418)



(Sumber: Survei Desa KOMPAK, Des 2019)

ANALISIS ANGGARAN DESA (APB DESA)

KOMPAK melakukan kajian analisis pengeluaran desa di wilayah kerja KOMPAK untuk menetapkan *baseline* dan memahami lebih baik tentang alokasi anggaran layanan dasar (pendidikan dan kesehatan). Kajian ini dapat berguna untuk mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong perubahan belanja desa.

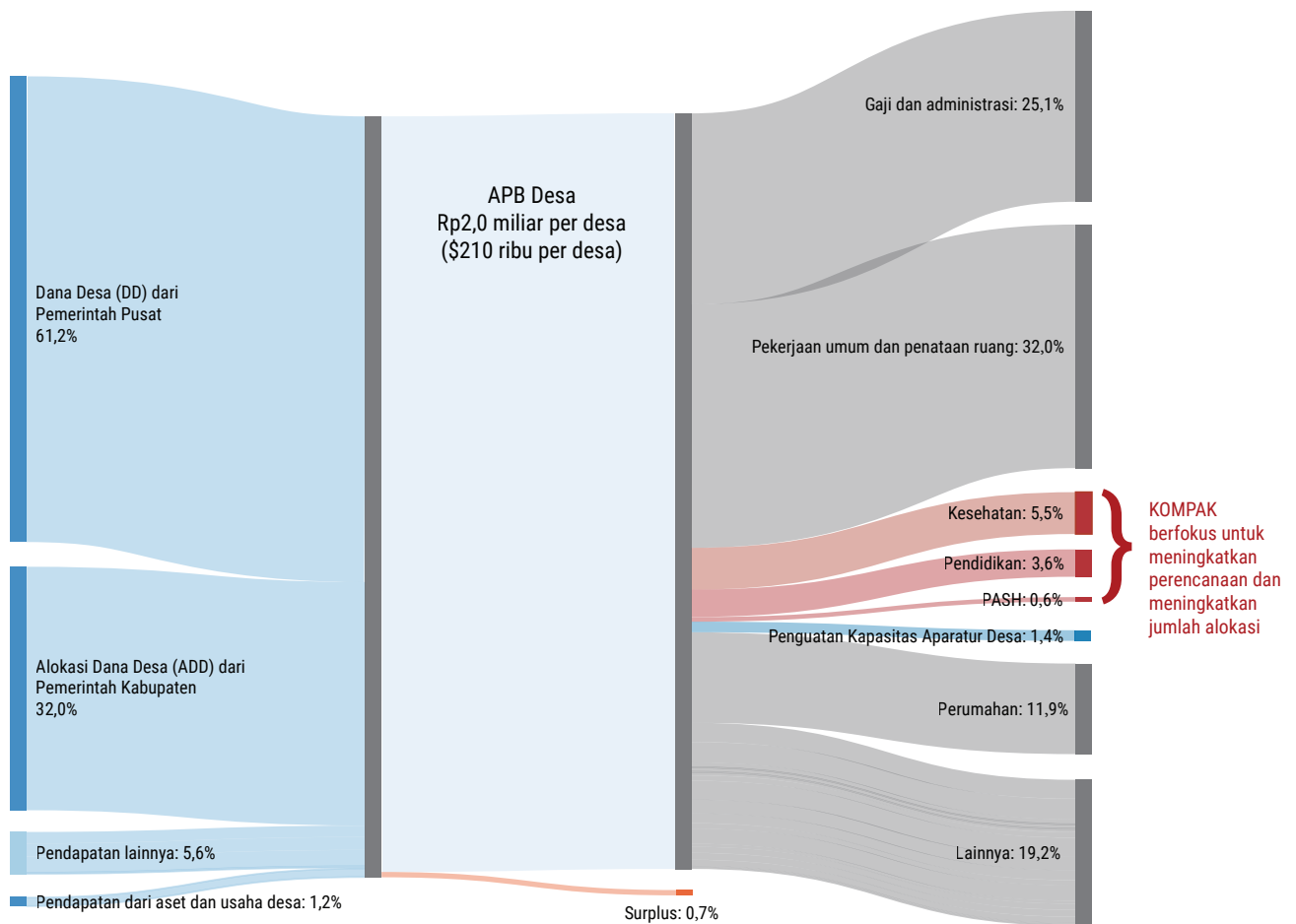
Analisis Anggaran Desa mengumpulkan data APB Desa dari 272 desa (62% wilayah kerja KOMPAK). Analisis ini menunjukkan bahwa rata-rata anggaran desa sebesar Rp2,0 miliar (\$210.000)¹⁰. Perbedaan anggaran cukup terlihat karena perbedaan jumlah penduduk, lokasi, dan kebutuhan khusus.

Analisis Anggaran Desa juga menemukan 93% pendapatan desa berasal dari dua sumber: Dana Desa dari pemerintah pusat dan alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten. Pendapatan dari aset dan usaha desa masih rendah (~1%). Pengeluaran desa terbesar tercatat untuk administrasi pemerintah (25%) dan pekerjaan infrastruktur publik (32%), sedangkan pengeluaran untuk layanan dasar kesehatan, pendidikan dan PASH hanya sebesar kurang dari 10 persen anggaran atau sekitar Rp182 juta (\$21.000) per desa. Dana penguatan kapasitas yang dapat digunakan untuk mendanai PTPD dan PbMAD sebesar 1,4 persen atau sekitar Rp28 juta (\$3.000).

Temuan analisis akan dipublikasikan awal tahun 2020.

¹⁰ Terdapat beberapa perbedaan antara perkiraan APB Desa 2019 berdasarkan Survei Desa dan Analisis Anggaran Desa. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan metode pengambilan sampel yang berbeda - Survei Desa menunjukkan wilayah Papua memiliki jumlah anggaran yang lebih tinggi, sehingga dana per kapita menjadi lebih tinggi - atau karena perkiraan populasi. Survei Desa menggunakan data dari desa, bukan statistik resmi pemerintah.

Analisis Anggaran Desa KOMPAK 2019



INISIATIF PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH PAPUA DAN PAPUA BARAT

PERANCANGAN PROGRAM PROSPPEK DAN DMMD DI PAPUA BARAT DAN PAPUA

Pada Mei 2019, KOMPAK dan Pemerintah Papua Barat menandatangani nota kesepahaman pengembangan program yang didanai oleh Dana Otsus, yaitu PROSPPEK (Program Strategis Pembangunan dan Pemberdayaan Kampung). KOMPAK memberikan bantuan teknis dalam perancangan program dua tahun plus senilai \$40 juta ini, serta persiapan peraturan, pedoman, dan anggaran untuk implementasinya. Unsur utama PROSPPEK adalah perluasan sistem informasi desa dan kecamatan ke lebih dari 1.700 desa dengan modul yang dirancang khusus untuk mengumpulkan informasi tentang masyarakat adat, sehingga mempertajam sasaran program perlindungan sosial. PROSPPEK juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan, monitoring layanan dasar dan pengawasan desa. PROSPPEK dijadwalkan untuk diluncurkan pada awal 2020, tergantung pada pendanaan dan dukungan politik yang berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2019, KOMPAK juga mendukung perancangan program DMMD (Distrik Membangun, Membangun Distrik). DMMD diuji coba melalui model penguatan tata kelola kecamatan dan desa KOMPAK, dan didanai oleh pemerintah kabupaten dan lembaga sektoral. KOMPAK memberikan dukungan untuk mengembangkan sepuluh rencana induk kecamatan, pedoman operasional, dan paket pelatihan. Dengan berkolaborasi bersama Bappenas dan Pemerintah Kabupaten Jayapura, DMMD dikembangkan untuk mendorong kecamatan berperan sebagai pusat informasi penyediaan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat adat, kewirausahaan, dan pertumbuhan regional. Rencana induk akan disetujui pada awal 2020.

PROGRAM LANDASAN

Untuk menilai kemajuan investasi Pemerintah Australia di Papua dan Papua Barat, KOMPAK dan mitranya BaKTI melakukan evaluasi dan menerbitkan dua laporan evaluasi pada awal 2019:

- Tinjauan Program LANDASAN Tahap II di Provinsi Papua dan Papua Barat; dan
- Tinjauan *Stocktaking* Program LANDASAN (Daerah Papua KOMPAK: 2016-2018).

Kedua tinjauan ini berfungsi untuk memberikan informasi penyusunan program menuju 2022 melalui asesmen terhadap status implementasi program, pencapaian, tantangan, peluang, dan membuat rekomendasi. Analisis temuan kajian tersebut menuju ke arah positif, dengan program LANDASAN mencapai 'kemajuan yang wajar menimbang target yang ambisius (ruang lingkup besar vs jangka waktu terbatas) dan tantangan lokal serta permasalahan operasional dan program.' Salah satu hasil yang jelas terlihat adalah keterkaitan antara pasar dan unit layanan dalam proses perencanaan yang didukung ketersediaan data (sistem informasi desa) dan koordinasi yang lebih baik. Area yang perlu diperbaiki antara lain kesetaraan gender, inklusi sosial, dan administrasi penduduk. Area-area ini ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja Tahunan KOMPAK Tahun 2020.

Pada 2019, KOMPAK memberikan bantuan teknis untuk menerapkan SPM di bidang kesehatan dan pendidikan, melanjutkan perluasan sistem informasi desa (Sistem Administrasi dan Informasi Kampung/SAIK dan Sistem Administrasi dan Informasi Distrik/SAID) serta mendukung inisiatif penguatan tata kelola kecamatan dan desa, termasuk melalui bantuan perancangan program baru yang didanai oleh Dana Otsus. Pencapaian utama hingga akhir 2019 antara lain:

- 88 dari 219 sekolah dasar telah membuat profil berdasarkan SPM dan rencana kerja serta standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai untuk meningkatkan kinerja di bidang pendidikan. Sekolah-sekolah ini juga telah membentuk komite untuk mengawasi kemajuan SPM.
- 30 dari 31 pusat kesehatan telah menyusun rencana kerja dan SOP untuk mencapai SPM. Upaya ini menghasilkan peningkatan kualitas manajemen secara keseluruhan, manajemen risiko dan manajemen keselamatan pasien.
- Dua dari tiga desa sasaran¹¹ telah menerapkan SAIK dan berdasarkan bukti yang ada, sistem ini juga telah diterapkan oleh desa di 33 kecamatan. Namun, peningkatan penggunaan sistem ini untuk perencanaan dan penganggaran masih merupakan tantangan dan prioritas yang harus diperhatikan.
- Perancangan dua program baru yang didanai melalui Dana Otsus didukung oleh KOMPAK. Program PROSPPEK akan memperluas sistem informasi desa ke semua 1.742 desa di Papua Barat, jika tersedia dana penuh.

¹¹ Menurut BaKTI, 139 dari 224 desa (62%) telah menginstal SAIK pada Juni 2019. Namun, Survei Desa KOMPAK menemukan bahwa 104 dari 156 desa (67%) telah meng-*install* SAIK, dengan catatan 8 desa yang belum disurvei dianggap tidak memiliki SAIK. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh penghapusan program di kabupaten Lanny Jaya dan Waropen dan perbedaan metode pengumpulan data

Sistem Informasi Desa (SID)

ANALISIS SITUASI

Berdasarkan UU Desa, semua desa diarahkan untuk membangun sistem informasi desa (SID). SID mengkonsolidasikan catatan kependudukan, sehingga statistik makro dan mikro yang akurat dapat diperoleh. SID menghadirkan informasi tentang populasi dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan kemampuan untuk mengidentifikasi orang yang belum memiliki dokumen identitas hukum atau anak-anak tidak bersekolah.

Saat ini belum ada sistem standar atau protokol pengumpulan data (misalnya jenis data yang harus dikumpulkan oleh semua desa) yang disepakati di tingkat nasional. Akibatnya terdapat setidaknya delapan jenis sistem informasi desa yang diterapkan desa, dan bahkan desa-desa di satu kabupaten atau kecamatan dapat menerapkan sistem yang berbeda-beda.

Masalah, tantangan dan rekomendasi utama:

- Belum ada kejelasan tentang kementerian mana yang memimpin implementasi SID. Akibatnya, tidak ada model atau pedoman standar di tingkat nasional (atau bahkan provinsi/kabupaten) tentang protokol pengumpulan data dan rancangan sistem. Tantangan ini merupakan peluang bagi KOMPAK untuk mendukung koordinasi antarlembaga dan memanfaatkan pelajaran yang didapat dari uji coba model KOMPAK untuk merumuskan kebijakan nasional dan daerah.

CAKUPAN DAN PELEMBAGAAN SISTEM INFORMASI DESA

Terdapat 339 desa yang memiliki sistem informasi desa di wilayah kerja KOMPAK (berdasarkan survei di 81% desa). Mempertimbangkan kebutuhan lokal yang berbeda, KOMPAK memberikan dukungan implementasi enam model sistem informasi desa yang distandardisasi oleh kabupaten. Dari seluruh desa yang memiliki sistem informasi desa (n = 339), hampir semua (97%) memiliki operator terlatih dan sebagian besar (87%) memiliki Dana Desa yang dialokasikan untuk mendukung implementasi.

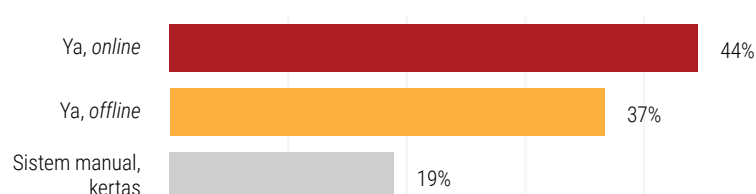
Di wilayah kerja KOMPAK, implementasi sistem informasi desa telah mencakup seluruh Jawa Timur, sedangkan tingkat cakupan sistem informasi desa di NTB dan Aceh melebihi 95%. Sulawesi Selatan berencana untuk membangun sistem informasi desa pada tahun 2020.

SID daring merupakan sistem informasi desa paling efektif karena memudahkan pengumpulan data, keterkaitan dengan sistem lain (misalnya basis data terpadu dan dukcapil) dan pemutakhiran otomatis. Hampir setengah (44%) desa KOMPAK telah memiliki SID daring pada akhir 2019.

Kunci keberhasilan sistem informasi desa adalah panduan dan dukungan pemerintah kabupaten. Hampir setengah (10 dari 24) kabupaten KOMPAK telah menyusun peraturan dan mengalokasikan dana untuk SID. Replikasi juga telah dilakukan hingga mencakup lebih dari 200 kecamatan yang saat ini mengimplementasikan SID, atau sekitar 55% kecamatan di kabupaten wilayah kerja KOMPAK. KOMPAK juga mendukung Pemerintah Provinsi Papua Barat merancang program PROSPPEK yang didanai Otsus. Dukungan ini mencakup pendanaan untuk memperluas implementasi sistem informasi desa dan kecamatan (SAIK dan SAID) hingga mencakup 1.742 desa.

81% desa di wilayah kerja KOMPAK memiliki SID dan semua kabupaten hanya menerapkan satu model SID

Apakah sistem informasi desa (atau sistem serupa) diterapkan di desa ini? (n = 418)



(Sumber: Survei Desa KOMPAK, Des 2019)

Jumlah dan jenis sistem informasi desa berdasarkan desa dan kabupaten:

		Ya, online	Ya, offline	Sistem manual, kertas	Total	Model sistem informasi desa apa yang digunakan di desa?
Aceh	Aceh Barat	1	7		8	SIG Kominsa Aceh (SIGAP)
	Bener Meriah	8	1		9	SIG Kominsa Aceh (SIGAP)
	Bireuen	3		3	6	SIG Kominsa Aceh (SIGAP)
Jawa Tengah	Brebes	12			12	SIDEKEM
	Pekalongan	2	7		9	SIDEKEM
	Pemalang			12	12	Manual, Catatan administrasi kependudukan
Jawa Timur	Bondowoso	28			28	SAID BONDOWOSO
	Lumajang	20			20	Combine Resource Institution (CRI)
	Pacitan	27			27	Combine Resource Institution (CRI)
	Trenggalek	20			20	Combine Resource Institution (CRI)
NTB	Bima	14	15		29	OPENSID
	Lombok Timur	27	10	3	40	OPENSID
	Lombok Utara	13			13	Combine Resource Institution (CRI)
	Sumbawa	2	18		20	OPENSID
Sulawesi Selatan	Bantaeng			10	10	Manual, Catatan administrasi kependudukan
	Pangkep			7	7	Manual, Catatan administrasi kependudukan
Papua	Asmat		8	15	23	SAIK/SAID Papua
	Boven Digoel		9		9	SAIK/SAID Papua
	Jayapura	7	5	7	19	SAIK/SAID Papua
	Nabire	1	9		10	SAIK/SAID Papua
Papua Barat	Fakfak		8	6	14	SAIK/SAID Papua
	Kaimana		2	14	16	SAIK/SAID Papua
	Manokwari Selatan	1	32	1	34	SAIK/SAID Papua
	Sorong		22	1	23	SAIK/SAID Papua
total		186	153	79	418	

(Sumber: Survei Desa KOMPAK, Des 2019)

Per 1 kecamatan KOMPAK, terdapat 4 kecamatan lain yang mereplikasi SID

Replikasi dan pelembagaan sistem informasi desa per kabupaten (survei kabupaten):

Provinsi	Kabupaten	# kecamatan	# kecamatan memiliki SID	% kecamatan memiliki SID	Tersedia sistem informasi kabupaten	Kabupaten menggunakan SID untuk validasi dan penargetan data adminduk	Terdapat peraturan kabupaten tentang SID	Anggaran kabupaten dialokasikan untuk SID
Aceh	Aceh Barat	12	0	0%	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Bener Meriah	10	10	100%	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
	Bireuen	17	1	6%	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Jawa Tengah	Brebes	17	17	100%	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
	Pekalongan	19	1	5%	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Pemalang	14	0	0%	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Jawa Timur	Bondowoso	23	23	100%	Ya	Ya	Tidak	Tidak
	Lumajang	21	21	100%	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Pacitan	12	12	100%	Ya	Ya	Tidak	Tidak
	Trenggalek	14	14	100%	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
NTB	Bima	18	17	94%	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Lombok Timur	21	21	100%	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Lombok Utara	5	5	100%	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	Sumbawa	24	18	75%	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Sulawesi Selatan	Bantaeng	8	8	100%	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
	Pangkep	13	0	0%	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Papua	Asmat	23	2	9%	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Boven Digoel	20	1	5%	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Jayapura	19	3	16%	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Nabire	15	3	20%	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Papua Barat	Fakfak	17	17	100%	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	Kaimana	7	2	29%	Tidak	Tidak	Ya	Ya
	Manokwari Selatan	6	3	50%	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Sorong	33	2	6%	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Total		388	201	52%	6	3	13	14

(rerata)

(Sumber: Survei Kabupaten KOMPAK, Des 2019)

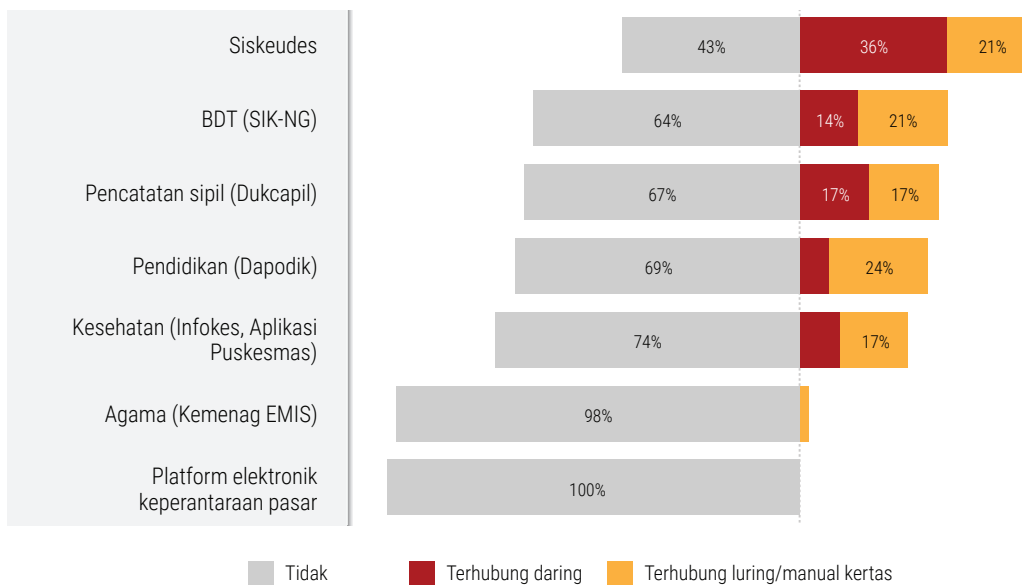
■ Ya ■ Tidak

INTEGRASI SISTEM INFORMASI DESA DENGAN BASIS DATA LAINNYA

Keterhubungan SID dengan basis data lainnya masih dapat ditingkatkan lagi. SID umumnya terhubung dengan Siskeudes, tetapi jarang terhubung dengan BDT dan basis data bidang tertentu.

Sebagian besar SID tidak terhubung dengan basis data lainnya

Apakah **SEMUA** desa di kecamatan memiliki akses ke basis data berikut ini? (n = 42)



(Sumber: Survei Kecamatan KOMPAK, Des 2019)

MENINGKATKAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA

Cakupan SID sudah cukup baik, tetapi diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan penggunaan SID untuk perencanaan dan penganggaran. Survei Desa menunjukkan sudah ada peningkatan penggunaan SID dalam enam bulan terakhir sebesar 20% poin dalam setiap kategori. Saat ini, sekitar dua dari tiga SID digunakan secara rutin untuk kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaporan dan penjangkauan.

Sebagian besar desa menunjukkan bahwa SID bermanfaat. Namun, lebih dari satu dari sepuluh desa menyatakan SID tidak bermanfaat untuk perencanaan dan penganggaran, verifikasi data kemiskinan, dan layanan penjangkauan layanan penyediaan identitas hukum. Oleh karena itu, desa-desa ini perlu diprioritaskan untuk mendapat pelatihan dan pendampingan tambahan dari KOMPAK, fasilitator PTPD maupun desa lainnya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari petugas lapangan, banyak desa menggunakan SID hanya untuk administrasi, misalnya mencatat nama dan tempat tinggal warga yang memiliki dokumen identitas hukum.

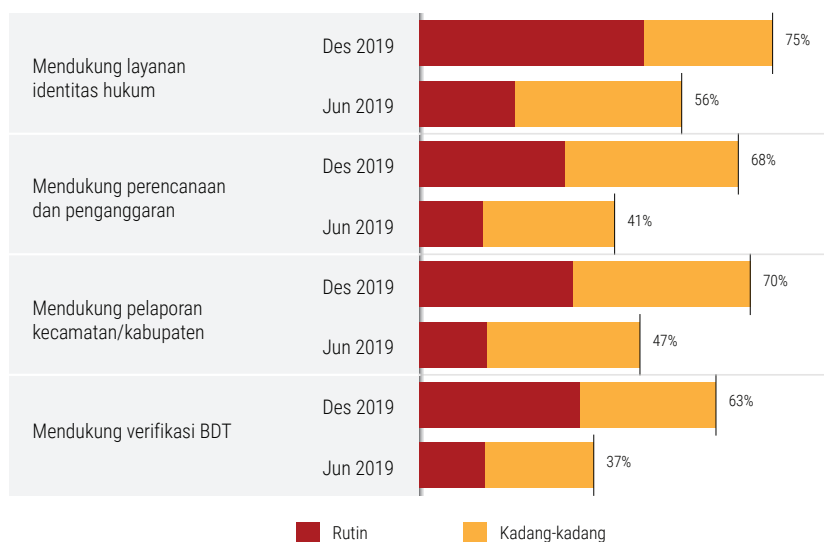
Fungsi SID lebih dari sekadar fungsi administrasi apabila pengguna di desa dapat menggali data dan menghubungkan data tersebut dengan kegiatan di desa. Desa-desa yang berhasil memanfaatkan SID menggunakan sistem tersebut untuk berbagai fungsi, misalnya:

- Mengidentifikasi warga miskin, berdasarkan data upah dan status pekerjaan;
- Mengidentifikasi perempuan yang menjadi kepala rumah tangga atau penyandang disabilitas, berdasarkan data status pernikahan atau disabilitas;
- Menggunakan data umur untuk mengidentifikasi orang lansia yang membutuhkan layanan dukungan, anak-anak usia PAUD, atau anak-anak tidak bersekolah. Data umur juga digunakan di NTB untuk pencegahan pernikahan anak; dan
- Mengidentifikasi orang yang tidak memiliki identitas hukum, sehingga dapat mempertajam sasaran program penjangkauan.

Tantangan yang ada umumnya terkait dengan akurasi dan kelengkapan data, maka dukungan verifikasi data, pembaruan data secara rutin, dan keterkaitan dengan sistem informasi lainnya sangatlah penting. Kebanyakan desa memperbarui data secara berlanjut, misalnya bulanan atau lebih sering, dan melakukan survei tahunan komprehensif. Misalnya, di Pacitan dan Trenggalek, KOMPAK membuat survei yang tergabung ke dalam SID tentang data akses rumah tangga ke air dan sanitasi, infrastruktur perumahan, program perlindungan sosial, status pendidikan, gizi, pekerjaan, dan komponen lainnya. Survei ini memberikan tambahan informasi yang dapat digunakan desa untuk menjalankan kegiatan desa.

Terdapat peningkatan penggunaan SID secara rutin dalam 12 bulan terakhir

Seberapa sering sistem informasi desa (atau sistem serupa) DIGUNAKAN? (n = 339)



(Sumber: Survei Desa KOMPAK, Des 2019)

SISTEM INFORMASI KECAMATAN DAN KABUPATEN

SID akan jauh lebih optimal jika data dapat dikumpulkan di tingkat kecamatan dan kabupaten. KOMPAK telah menguji coba pendekatan ini dan telah mampu mengumpulkan data dari SID di tujuh kabupaten yang secara tidak langsung mengumpulkan data semua kecamatan. Uji coba ini selesai dilakukan di Jawa Timur (Bondowoso dan Pacitan), Jawa Tengah (Pemalang, Pekalongan, dan Brebes) dan Aceh (Aceh Barat dan Bireuen).

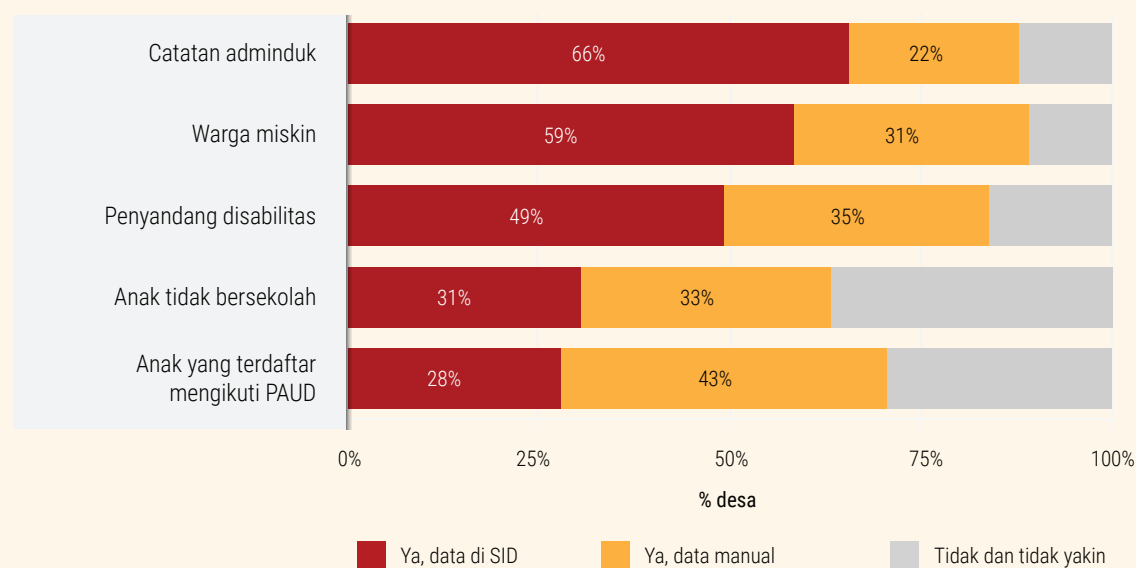
Sistem informasi kabupaten dan kecamatan (menggunakan data sistem informasi desa) masih berupa *prototype*. Dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk mengembangkan sistem yang ramah pengguna agar memudahkan aparat pemerintah kabupaten dan kecamatan memperoleh wawasan dan data yang dibutuhkan.

MEMPERKUAT DATA GENDER DAN KELOMPOK RENTAN

Melalui sistem informasi desa, KOMPAK memperkuat kapasitas pemerintah desa merencanakan dan memberikan layanan kepada kelompok rentan. Semua sistem mengumpulkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan sebagian besar desa juga memiliki sistem untuk memperoleh informasi terkait lainnya, misalnya jumlah penyandang disabilitas dan jenis disabilitas, jumlah orang miskin dan tingkat kemiskinan, jumlah dan jenis program perlindungan sosial, dan akses anak-anak ke sekolah atau layanan kesehatan.

Data ini memberikan wawasan berharga yang dapat digunakan untuk memperkuat capaian GESI, termasuk peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam forum perencanaan (karena kelompok rentan lebih mudah diidentifikasi), program penjangkauan yang ditargetkan untuk meningkatkan pendaftaran sekolah dan cakupan kepemilikan identitas hukum, dan identifikasi rumah tangga miskin sebagai penerima manfaat program layanan dasar bidang kesehatan, gizi, perumahan, dan layanan dasar lainnya.

Apakah sistem informasi desa (atau sistem serupa) mencakup data spesifik berikut ini? (n = 418)



(Sumber: Survei Desa KOMPAK, Des 2019)

Akuntabilitas Sosial

ANALISIS SITUASI

UU Desa memberikan mandat kepada setiap desa untuk mengadakan forum perencanaan desa atau Musrenbang, guna membahas dan menyepakati kegiatan prioritas. Forum tahunan ini biasanya berfokus pada proses, sehingga belum memadai untuk menampung aspirasi masyarakat. Tingkat partisipasi forum perencanaan desa masih rendah sekitar 16% dan kebanyakan peserta adalah laki-laki berpenghasilan lebih tinggi¹². Selain itu, hanya enam persen masyarakat yang mengetahui bagaimana dana desa digunakan.

Perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sering tidak dilibatkan, padahal terdapat bukti¹³ bahwa saat anggota masyarakat dan kelompok minoritas dilibatkan dalam proses perencanaan, dana cenderung lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KOMPAK menguji coba dua pendekatan untuk memperkuat akuntabilitas sosial. Pertama, pendekatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota masyarakat dalam tata kelola desa, penganggaran dan inklusivitas, termasuk yang dilakukan melalui melalui Sekar Desa (dilaksanakan oleh Seknas Fitra), Akademi Paradigta (dilaksanakan oleh PEKKA), dan Sepeda Keren (dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek). Kedua, pendekatan untuk meningkatkan mekanisme aspirasi masyarakat, yang dilakukan melalui Posko Aspirasi (dilaksanakan oleh Seknas Fitra) dan KLIK-PEKKA (dilaksanakan oleh PEKKA berkoordinasi dengan MAMPU).

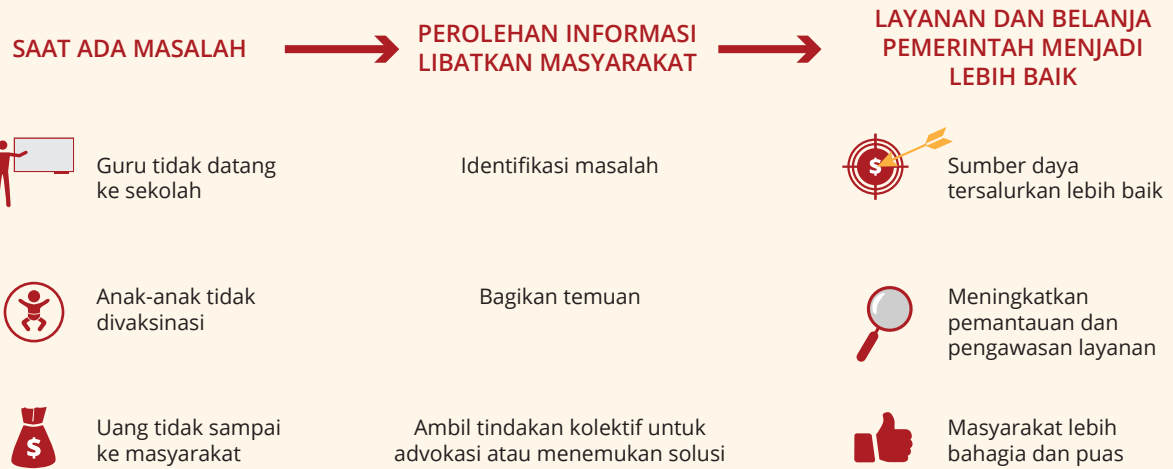
Masalah, tantangan dan rekomendasi utama:

- Sebagian besar pemerintah desa menyelenggarakan Musrenbang tahunan, tetapi biasanya berfokus pada proses dan aspirasi masyarakat tidak tertampung secara memadai. BPD dan masyarakat biasanya tidak memiliki keterampilan dan akses pada informasi atau wewenang untuk meninjau anggaran dan rencana kerja, dan meminta akuntabilitas pemerintah desa. Pemerintah desa juga tidak melaporkan kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa maupun kemajuan kegiatan.
- Seiring dengan berakhirnya dukungan KOMPAK untuk Akademi Paradigta, sumber dana alternatif dan pelembagaannya perlu diidentifikasi dan pembelajaran yang didapat perlu didokumentasikan.

¹² Bank Dunia (2018). Temuan Dasar Kajian Desa Sentinel.

¹³ Bank Dunia dan KOMPAK (2019). Catatan Kebijakan UU Desa: Masyarakat sebagai Pusat Implementasi UU Desa.

MEKANISME PENDEKATAN AKUNTABILITAS SOSIAL



KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG AKUNTABILITAS SOSIAL

Berdasarkan upaya KOMPAK bersama Seknas Fitra dan PEKKA, dua rumusan pedoman akuntabilitas sosial dan pemberdayaan perempuan telah disusun untuk Kemendesa PDTT.

Pedoman akuntabilitas sosial disusun berdasarkan uji coba Sekar Desa dan Posko Aspirasi. Pedoman ini memberikan bahan pelatihan dan arahan bagi BPD dan aparat pemerintah untuk mereplikasi model ini serta modul peran dan tanggung jawab BPD. Kemendesa PDTT adalah mitra utama penyusunan pedoman ini dan bermaksud mereplikasi model ini secara lebih luas melalui P3PD yang dilaksanakan Bank Dunia.

Dalam pemberdayaan perempuan, KOMPAK berkolaborasi dengan PEKKA dan dua program DFAT lain (MAMPU dan PEDULI) untuk menyusun pedoman dengan bahan pelatihan untuk membangun kelompok perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam forum desa, serta memperluas peran perempuan dalam tata kelola dan proses pemerintahan desa.

SEKAR DESA

Pada 2019, Sekar Desa diuji coba di 33 desa di lima provinsi oleh KOMPAK bermitra dengan Seknas Fitra. Sejumlah 3.358 orang (42% perempuan, 6% penyandang disabilitas) atau sekitar 100 orang per desa mengikuti pelatihan enam hari selama tiga bulan. Peserta berasal dari pemerintah desa, BPD dan anggota masyarakat termasuk perempuan dan kelompok rentan. Anggota masyarakat dipilih berdasarkan pemetaan dan identifikasi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, orang lansia, dan masyarakat adat.

Pelatihan ini menyediakan lima modul: 1) Implementasi UU Desa; 2) Peningkatan kinerja BPD; 3) Konsep dasar perencanaan dan penganggaran desa; 4) Analisis gender dan inklusivitas dalam RPJM dan RKP desa; dan 5) Analisis terhadap APB Desa. Modul ini akan diuji coba lebih lanjut dan disempurnakan. KOMPAK bermaksud untuk menggunakan pelajaran dari pelatihan ini sebagai dasar informasi pengembangan pelatihan BPD dan anggota masyarakat untuk Kemendesa PDTT.

Berdasarkan umpan balik peserta, pelatihan ini berjalan efektif untuk meningkatkan pemahaman atas UU desa, perencanaan dan penganggaran, terutama bagi BPD yang jarang menerima pelatihan sebelum mengikuti Sekar Desa. Model pelatihan ini akan dievaluasi pada pertengahan 2020 untuk menentukan efektivitas model dan apakah model ini dapat direplikasi.

POSKO ASPIRASI

Di desa tempat Sekar Desa diselenggarakan¹⁴, KOMPAK dan Seknas Fitra menguji coba Posko Aspirasi sebagai mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat. Mekanisme ini melibatkan BPD sebagai pintu gerbang utama bagi anggota masyarakat untuk mengajukan prioritas, menyusun pengajuan, dan mengadvokasi pemerintah desa agar menerapkan prioritas yang diajukan.

Setiap desa mengadakan 'Pekan Aspirasi' untuk mempromosikan inisiatif ini. Aspirasi dan pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis langsung ke wakil anggota yang ditunjuk BPD atau melalui formulir di salah satu kotak saran yang tersedia di desa. Masyarakat juga dapat mengirimkan surat elektronik, termasuk melalui WhatsApp, pesan singkat atau situs web desa.

Model ini terbukti berhasil. Lebih dari 15.000 saran dikirimkan oleh 3.760 orang atau setara dengan hampir 500 saran dan 120 orang per desa. Saran yang diberikan juga terbukti sangat membantu pemerintah desa mengidentifikasi prioritas lokal yang akan dimasukkan ke dalam rencana pembangunan dan anggaran tahunan. Tantangan yang dihadapi BPD adalah kemampuan untuk menganalisis dan mengumpulkan saran yang masuk. KOMPAK memberikan bantuan kepada tiga anggota BPD untuk mengelompokkan dan menyusun saran yang diajukan. BPD kemudian mengadakan musyawarah masyarakat untuk membahas hasilnya dan menyusun prioritas saran yang akan disampaikan kepada aparat pemerintah desa sebagai bagian dari proses perencanaan anggaran. Dokumentasi mekanisme ini dibutuhkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

KOMPAK dan Seknas Fitra telah menyusun modul pelatihan dan pedoman replikasi model ini untuk pemerintah kabupaten, terutama lima kabupaten yang mengalokasikan Rp800 juta (\$80.000) secara keseluruhan pada tahun 2020 untuk replikasi.

Beberapa contoh saran yang digunakan untuk penganggaran desa antara lain:

Desa Tangkil, Trenggalek, Jawa Timur:	Desa Gumelem, Pekalongan, Jawa Tengah:	Desa Kasimpar, Pekalongan, Jawa Tengah:
<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan tempat untuk pasar desa• Program gizi untuk ibu dan anak kurang gizi• Program penghijauan	<ul style="list-style-type: none">• Alat bantu dengar untuk penyandang disabilitas pendengaran• Membangun kantor untuk guru PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan tempat sampah• Pengembangan program ekowisata• Pemeliharaan embung air bersih dan toilet umum

¹⁴ Satu desa tidak termasuk karena tidak mendapat dukungan politik.

AKADEMI PARADIGTA

KOMPAK bermitra dengan PEKKA untuk mengatasi hambatan partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa dengan memberikan pelatihan tata kelola desa bagi perempuan. PEKKA juga mendukung peserta dan alumni untuk membangun kelompok perempuan dan berperan aktif dalam upaya kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat. PEKKA memiliki jaringan kelompok-kelompok perempuan dengan jumlah anggota lebih dari 2.700 orang di lima provinsi. Kelompok-kelompok ini mendapatkan pelatihan dari PEKKA tentang organisasi masyarakat, advokasi dan kegiatan usaha seperti menganyam keranjang.

Melalui kelompok-kelompok ini, PEKKA mengidentifikasi peserta pelatihan lanjutan di Akademi Paradigta. Pada 2019, 249 perempuan lulus dari akademi. Sebagian besar biaya pelatihan Akademi Paradigta didanai oleh pemerintah desa sejak Juli 2018, sehingga terdapat kemungkinan keberlanjutan model ini.

Saat ini terdapat 2.330 alumni Paradigta. Sekitar satu dari enam (349) alumni menjabat sebagai aparatur pemerintah desa, anggota BPD, pejabat dan anggota badan usaha milik desa (belum ada data statistik saat laporan ini dibuat). Pada 2019, alumni Paradigta mengadvokasi perumusan 19 peraturan daerah (peraturan desa, peraturan bupati, surat keputusan, dan nota kesepahaman) yang berfokus pada pembangunan yang berpihak pada orang miskin dan inklusif gender, termasuk alokasi Dana Desa untuk sponsor perempuan peserta akademi Paradigta dan implementasi peraturan tentang keterlibatan perempuan dalam Musrenbang.

KOMPAK menyusun pedoman teknis tentang pemberdayaan perempuan dan akuntabilitas sosial di tingkat desa. Pedoman ini disusun berdasarkan pembelajaran yang didapat program Paradigta dan akan menghasilkan model yang dapat direplikasi Kemendesa PDPT. Kemendesa PDPT telah berkomitmen untuk mereplikasi program Akademi Paradigta pada tahun 2020.

KOMPAK akan mengakhiri dukungan untuk Akademi Paradigta pada pertengahan 2020 dan evaluasi akan dipublikasikan awal tahun 2020.

AKADEMI PARADIGTA: MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN UNTUK MEMIMPIN DAN BERKONTRIBUSI PADA PEMBANGUNAN DESA

Program pelatihan Akademi Paradigta menyediakan program studi satu tahun untuk mempersiapkan wanita dari desa untuk terlibat secara lebih efektif dengan pemerintah dan masyarakat setempat. Perempuan, biasanya kepala rumah tangga perempuan atau anggota kelompok perempuan, dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, dan alat untuk menjadi anggota yang lebih aktif di pemerintahan desa.

Akademi ini menerapkan sistem pendampingan dengan melatih pengajar perempuan yang kebanyakan berasal dari desa untuk menjadi fasilitator dan mendampingi peserta dalam proses pembelajaran. Sistem ini mempromosikan proses pendidikan berkelanjutan yang mampu memperkuat kapasitas peserta sebagai pemimpin masyarakat dan pemimpin daerah setempat. Inisiatif ini dikembangkan oleh PEKKA untuk memperkuat para pemimpin perempuan di tingkat akar rumput.

SEPEDA KEREN

Sepeda Keren adalah sekolah bagi perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak dan kelompok rentan lainnya (seperti pekerja migran) yang didirikan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Model program ini diterapkan oleh Akademi Paradigta melalui pendamping masyarakat yang memberikan paket pelatihan 6-8 bulan tentang tata kelola desa, gender, hak asasi manusia, dan organisasi masyarakat kepada kader desa dan kelompok rentan. Pendamping masyarakat juga akan mendukung pemerintah desa untuk menyusun peraturan yang lebih inklusif, anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, dan menyelenggarakan Musrenbang yang inklusif.

Sepeda Keren dipimpin dan didanai sebagian besar oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, dengan dukungan teknis dan pendanaan tahap awal dari KOMPAK. Mitra lainnya, termasuk MAMPU, PEDULI, dan organisasi masyarakat sipil juga dilibatkan dalam tahap perancangan dan implementasi. Dua puluh lima pendamping yang sudah mengikuti pelatihan sepuluh hari akan memberikan dukungan kepada pemerintah desa mulai Januari 2020.

Keperantaraan Pasar

ANALISIS SITUASI

Bappenas telah mengidentifikasi pengembangan ekonomi lokal sebagai prioritas utama dalam strategi pengurangan kemiskinan. Di pedesaan Indonesia, sebagian besar orang miskin dan hampir miskin adalah wiraswasta bidang pertanian atau usaha mikro dan kecil (UMK), atau keduanya. Namun, umumnya UMK gagal bertumbuh dan menghasilkan pendapatan yang cukup. Oleh karena itu, meningkatkan produktivitas UMK sangat penting untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin.

Model Keperantaraan Pasar KOMPAK menawarkan model yang dapat digunakan pemerintah desa untuk mempromosikan UMK. Model ini mendukung UMK lokal, seperti koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/BUMDes Bersama (BUMDESMA), dan kelompok usaha perempuan, untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang usaha yang menguntungkan perempuan dan masyarakat miskin. Model ini memungkinkan pengusaha UMK untuk mengumpulkan sumber daya dan menjual dalam jumlah yang lebih besar di tingkat yang lebih tinggi pada *value chain* (seperti pengolahan dan pengemasan bahan baku) kepada pembeli tingkat lokal dan nasional.

Pada 2020, KOMPAK mengalokasikan Rp4,8 miliar (\$510.000) untuk kegiatan Keperantaraan Pasar. Kegiatan ini didanai bersama oleh pemerintah desa dan kabupaten. Pemerintah daerah memberikan dana, dukungan peraturan dan bantuan non-tunai kepada UMK, sedangkan KOMPAK memberikan bantuan teknis.

Analisis KOMPAK terhadap APB Desa menunjukkan badan usaha milik desa meningkatkan pendapatan sekitar Rp24 juta (\$2.600) per desa, atau 1,2 persen dari total pendapatan desa. Keperantaraan Pasar bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan membantu memastikan anggota masyarakat termiskin dan paling rentan mendapat manfaat dari penciptaan peluang kerja dan pendapatan tambahan.

Masalah, tantangan dan rekomendasi utama:

- Tantangan bagi KOMPAK dan pemerintah adalah terbatasnya bukti yang menunjukkan bahwa model keberantaraan pasar efektif atau mencapai nilai investasi (*value for money/vfm*) yang baik.
- KOMPAK merencanakan evaluasi terhadap pendapatan dan produktivitas anggota kelompok usaha pada awal 2020. Evaluasi ini akan membantu menganalisis biaya dan manfaat model keberantaraan pasar.
- Studi kasus menampilkan bukti dan umpan balik dari penerima manfaat dan mitra pemerintah setempat tentang efektivitas model, tetapi data yang objektif terkait pendapatan/pengeluaran atau peserta program masih terbatas. Upaya peningkatan sedang dilakukan oleh KOMPAK terhadap keterbatasan ini.

DEFINISI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

Usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan badan usaha perorangan atau unit usaha perorangan dengan aset kurang dari Rp500 juta (\$50.000) dan omset tahunan kurang dari Rp2,5 miliar (\$250.000). Kerja KOMPAK sebagian besar berfokus pada usaha mikro dengan aset kurang dari Rp50 juta (\$5.000) dan omset tahunan kurang dari Rp300 juta (\$30.000).

UJI COBA MODEL KEPERANTARAAN PASAR

KOMPAK menguji coba model keperantaraan pasar melalui 14 UMK di tujuh kabupaten. Sekitar 100 orang secara langsung mendapat pekerjaan dan sekitar 10.000 petani dan pengusaha kecil mendapatkan manfaat dari model ini. Barang dan jasa yang diperjualbelikan termasuk komoditas olahan, inisiatif pariwisata, dan kerajinan tangan atau pakaian.

KOMPAK telah memberikan bantuan teknis untuk mendaftarkan badan usaha, menetapkan SOP, mengidentifikasi komoditas dan peningkatan *value chain* (seperti peralatan pemrosesan atau pengemasan), mendapatkan pendanaan (termasuk melalui investasi dampak sosial), dan menghubungkan UMK dengan *marketplace* daring dan pembeli atau *off-taker*.

Tantangan yang dihadapi KOMPAK dan pemerintah adalah masih terbatasnya bukti yang menunjukkan efektivitas atau nilai investasi (VFM) model Keperantaraan Pasar. Evaluasi dampak model ini terhadap keuntungan UMK, penciptaan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan pemerintah setempat, dan penyediaan peluang kerja atau layanan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan akan dilakukan tahun 2020.

KOMPAK telah mengumpulkan data pendapatan dan pengeluaran UMK, tetapi masih ada kesenjangan dalam pelaporan dan penetapan (serta penghitungan jumlah) penerima manfaat. Tantangannya adalah banyak dari kelompok usaha tersebut dimiliki secara kolektif, seperti BUMDes. Inisiatif ini berpotensi menguntungkan pengusaha UMK, petani atau pemasok yang menjual barang, dan masyarakat desa. Pada tahun 2020, kegiatan akan diprioritaskan pada pengembangan instrumen untuk bisa menangkap data tentang hal-hal tersebut.

KOMPAK telah mengidentifikasi *platform online* untuk keperantaraan pasar yang dikembangkan sektor swasta untuk mempertemukan UMK dengan pembeli. *Platform* ini akan diujicobakan tahun 2020. Dukungan akan diberikan jika perlu, tetapi KOMPAK tidak melakukan pengawasan implementasi *platform* ini.

DUKUNGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

KOMPAK bersama Bappenas berupaya untuk mengintegrasikan pembelajaran dari uji coba model ini untuk memperkuat penyusunan komponen pengembangan ekonomi lokal dalam RPJMN 2020-2024. KOMPAK juga mendukung penyusunan pedoman nasional tentang keperantaraan pasar guna membantu pemerintah mereplikasi model ini di daerah lainnya.

Kelompok usaha yang ikut serta dalam uji coba keperantaraan pasar (Jan-Des 2019)*

JENIS UMK	KECAMATAN	KOMODITAS	NAMA UMK	PENDAPATAN	PENGELUARAN	LABA/RUGI
BUMDES	Bantaeng	Kopi	BUMDES Daulu			0
		Pengolahan rumput laut	BUMDES Layar Terkembang	5.364.000	6.140.189	(506.189)
	Pacitan	Tepung singkong modifikasi	BUMDES Mokaf Bogati	41.000.000	34.337.500	6.662.500
	Trenggalek	Pengolahan sabut kelapa	BUMDES Banjar			0
BUMDESMA	Pemalang	Agrowisata	BUMDES Belik			0
		Minyak essensial atsiri	BUMDESMA Ulujami			0
	Trenggalek	Olahan rizoma	BUMDESMA Sari Bumi			0
Koperasi	Bantaeng	Kopi	Koperasi Akar Tani			0
	Pekalongan	Teh hijau	Koperasi Berdiri Makmur			0
	Pemalang	Kopi	Koperasi Tani Harapan	339.676.000	381.080.000	18.596.000
Kelompok Usaha Mikro	Pekalongan	Batik Tulis	UKM Batik Kampil			0
	Aceh Barat	Kerajinan tangan dari bunga sepatu	UKM Arlamba	47.173.000	13.894.000	33.279.000
Pokdarwis	Lombok Utara	Wisata desa	Pokdarwis Bayan			0
			Pokdarwis Genggeling			0
Total				493.483.000	435.451.689	58.031.312

* Pengumpulan data dimulai akhir 2019 dan tidak semua kelompok usaha membuat pembukuan pendapatan dan pengeluaran sepanjang tahun. KOMPAK menyediakan dukungan untuk membantu kelompok usaha menyusun anggaran dan laporan keuangan

CONTOH UJICoba KEPERANTARAAN PASAR*Pekalongan, Jawa Tengah*

KOMPAK bermitra dengan Havilla, perusahaan teh premium, untuk membantu koperasi mengolah teh hijau secara lebih efektif. Kemitraan ini menghasilkan peningkatan kapasitas produksi dan akses ke pasar yang lebih luas. Sekitar 5.000 petani teh di sepuluh desa mendapat keuntungan dari menjual teh ke koperasi dalam jumlah lebih besar dan harga yang lebih tinggi.

Trenggalek, Jawa Timur

KOMPAK bersama BUMDESMA dan Agradaya memberikan pelatihan kepada petani tentang pengolahan herbal. Hasilnya, BUMDESA dapat menjual herbal olahan dengan laba bersih yang lebih tinggi dan Agradaya dapat memperoleh produk berkualitas lebih tinggi dengan harga lebih rendah. Pemerintah desa dan kabupaten mendukung upaya ini dengan memberikan dana pemerintah untuk pengadaan peralatan dan pembangunan pabrik.

Aceh Barat, Aceh

KOMPAK bersama DC-9 memberikan pelatihan bagi kelompok usaha perempuan untuk mengolah tanaman eceng gondok menjadi tatakan piring dan mengakses pasar yang lebih luas dengan harga kompetitif. Produk ini telah tersedia di IKEA dan lulus proses seleksi untuk masuk ke Sarinah (BUMN pusat perdagangan kerajinan/produk lokal Indonesia). Pemerintah Aceh Barat tertarik untuk mereplikasi model ini di desa lainnya untuk mengolah komoditas yang berbeda.

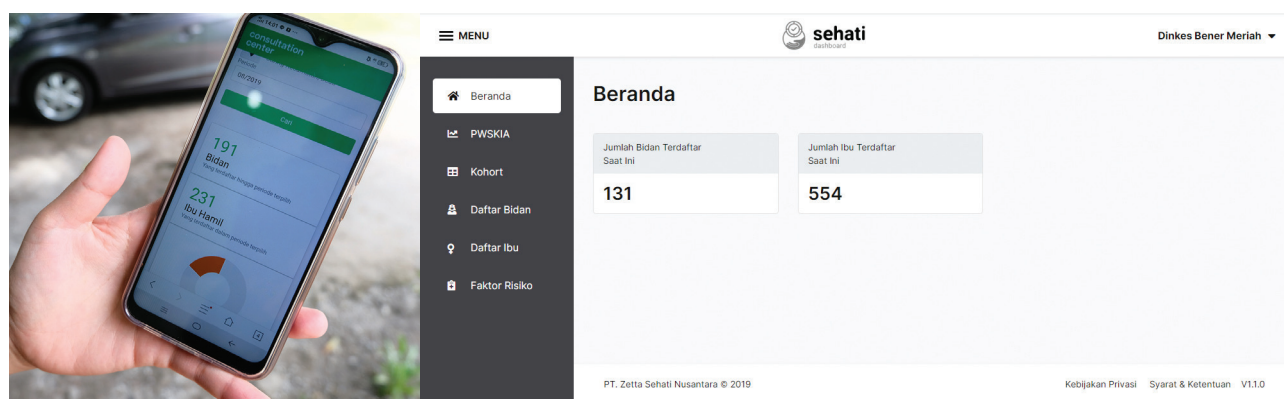
Kesehatan, Pendidikan dan Inovasi

APLIKASI SELULER DAN DASHBOARD LAYANAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL

Pada Maret 2019, KOMPAK dan SEHATI, perusahaan teknologi kesehatan dari sektor swasta, mulai menguji coba aplikasi seluler (PWS+) di 13 klinik di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Uji coba ini diperluas pada bulan November ke 23 klinik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, melalui pendanaan bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.

Aplikasi ini tersedia dalam gawai tablet dengan fitur, yaitu entri data elektronik, analisis otomatis melalui *dashboard* dan berdasarkan perintah (*prompt*), dan salinan digital buku pegangan kesehatan ibu dan anak. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kehamilan berisiko tinggi, memberikan perintah (*prompt*) tindak lanjut dan referal, menyusun laporan akurat secara otomatis bagi pusat kesehatan dan dinas kabupaten untuk mendukung perencanaan dan kegiatan penjangkauan layanan.

Pada akhir 2019, sebanyak 198 bidan menggunakan aplikasi ini dan 554 ibu hamil telah terdaftar. Perbaikan desain awal aplikasi ini sedang dilakukan dan desain akhir akan dirilis bulan April 2020. SEHATI telah mengembangkan modul baru untuk bayi baru lahir dan menyelenggarakan pelatihan pelayanan obstetri neonatal bagi 53 bidan melalui *e-learning* yang dipimpin oleh spesialis obstetri/ginekologi.



LAYANAN KESEHATAN DAERAH TERPENCIL MENGGUNAKAN DRONE

Pada September 2019, KOMPAK menerbitkan laporan akhir untuk Bappenas dan Kementerian Koordinator Kemaritiman tentang studi kelayakan *drone* untuk distribusi obat-obatan dan persediaan medis, terutama di Provinsi Sulawesi Selatan dengan kemungkinan perluasan ke daerah lain. Studi ini menghasilkan kajian literatur program di negara lain yang disertai dengan opsi untuk Pemerintah Indonesia dan hasil wawancara dengan pihak berwenang di tingkat kementerian (Kementerian Kesehatan, Kementerian Transportasi, Kementerian Pertahanan, dan Bappenas), provinsi dan 11 kantor kabupaten di Sulawesi Selatan, serta pengelola dan petugas klinis di 36 fasilitas kesehatan di pulau.

Studi ini menyimpulkan bahwa *drone* bersayap tetap dan *drone* hibrida layak dan dapat digunakan secara efektif untuk mencegah kehabisan stok bernilai tinggi atau stok *cold chain* seperti darah, vaksin dan obat-obatan tertentu. Tantangannya adalah biaya yang tinggi sekitar Rp140 milyar (\$15 juta) per tahun untuk implementasi di Sulawesi Selatan, sehingga belum ada keputusan apakah *drone* akan digunakan.

Selain studi ini, KOMPAK telah melakukan evaluasi program Perahu Sehat Pulau Bahagia. Inisiatif yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan ini menyediakan layanan kesehatan untuk masyarakat di 17 pulau. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan untuk pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, layanan ini disambut baik oleh masyarakat tetapi jadwal layanan perlu dipublikasikan lebih luas agar masyarakat mudah mendapat informasi kapan kunjungan layanan dilakukan. Selain itu, diperlukan pedoman yang secara jelas menentukan jenis dan frekuensi layanan, keterhubungan dengan puskesmas setempat, dan area cakupan layanan.



INISIATIF UNTUK MENGATASI JUMLAH ANAK TIDAK BERSEKOLAH

Menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pada tahun akademik 2016/17, sekitar sepertiga siswa sekolah dasar dan menengah di kabupaten tersebut yang bekerja menemani orang tua melaut mengalami putus sekolah. Pendekatan 'Kelas Perahu' kemudian dikembangkan. Siswa yang bekerja ke lautan diberikan lembar kerja siswa sebagai bahan pelajaran, kemudian dibantu oleh gurunya ketika kembali ke darat.

Uji coba pertama dimulai tahun 2016 sebagai salah satu inisiatif yang didukung pemerintah kabupaten bermitra dengan Konsulat Jenderal Australia (Makassar) dan IKAMA (Ikatan Alumni Mahasiswa Australia) untuk menyusun lembar kerja, metode, dan bahan pelajaran lainnya bagi siswa yang melaut. KOMPAK mulai mendukung uji coba ini pada tahun 2017. Pada tahun 2019, KOMPAK membantu pemerintah kabupaten menyusun strategi replikasi di empat kabupaten di Sulawesi Selatan, termasuk penyusunan rancangan peraturan kabupaten, pedoman teknis dan pelatihan bagi guru dan fasilitator.

Menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, inisiatif ini berhasil menekan tingkat putus sekolah siswa yang pergi melaut hingga di bawah tiga persen dari 415 siswa aktif saat ini. Pada 2019, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerbitkan peraturan dan mengalokasikan Rp250 juta (\$30.000) dari APBD kabupaten untuk model kelas perahu sehingga membuka jalan untuk perluasan model ini di 123 sekolah di kabupaten tersebut.

Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, KOMPAK mendukung upaya pengumpulan data dan penerbitan peraturan daerah tentang wajib belajar 12 tahun untuk mengurangi jumlah anak-anak tidak bersekolah. Upaya ini dilakukan untuk melengkapi pengumpulan data UNICEF melalui Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM). KOMPAK menguji coba model pengumpulan data melalui perangkat seluler dengan kemungkinan dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi desa yang dapat diterapkan desa lainnya. Sebelum replikasi dilakukan, diperlukan bukti lebih lanjut untuk menunjukkan efektivitas model ini.

INDIKATOR UNTUK RENCANA AKSI NASIONAL PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Di tingkat nasional, KOMPAK telah mendukung Bappenas untuk melakukan studi latar belakang tentang indikator untuk Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD. PAUD telah diidentifikasi sebagai salah satu prioritas program nasional dalam RPJMN 2020-2024.

Bermitra dengan Koalisi PAUD Nasional, KOMPAK mengembangkan kerangka monitoring yang mencakup indikator tentang pendidikan, kesehatan dan gizi, serta perlindungan anak, perawatan dan kesejahteraan. Dalam upaya ini, KOMPAK membantu mengadakan rapat untuk memperoleh kesepakatan dari sepuluh kementerian terkait yang bertanggung jawab atas strategi nasional, dan melakukan konsultasi dengan 11 pemerintah kabupaten dan 6 pemerintah provinsi untuk mendapatkan umpan balik terhadap indikator yang diusulkan.

Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD 2020-2024 dan kerangka monitoring akan diluncurkan awal tahun 2020. Kerangka kerja ini akan menjadi komponen penting untuk menilai efektivitas RAN PAUD.

UNIVERSITAS MEMBANGUN DESA (UMD)

Mahasiswa yang terdaftar di lebih dari 3.000 universitas di Indonesia biasanya melakukan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari pendidikan sarjana berupa program yang dikenal dengan nama Kuliah Kerja Nyata (KKN). UMD merupakan inisiatif KOMPAK untuk memobilisasi program KKN untuk pembangunan desa.

KOMPAK berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan universitas, kementerian, sektor swasta, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mengidentifikasi cara kerja yang lebih baik lagi. KOMPAK memfasilitasi berbagai pembuatan nota kesepahaman dengan para pemangku kepentingan, termasuk di NTB, Aceh, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, dan nota kesepahaman antara Kemendesa PDTT dan Kementerian Agama yang mengawasi beberapa universitas untuk menyepakati prioritas dan masa depan program. Pembahasan masih berlanjut dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung UMD.

Beberapa contoh kegiatan UMD antara lain:

- Di empat kabupaten di NTB (Lombok Utara, Lombok Timur, Bima, dan Sumbawa), sebanyak 556 mahasiswa membantu 45 desa melalui UMD. Bersama pemerintah daerah, para mahasiswa mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah untuk mengidentifikasi warga yang belum memiliki dokumen identitas hukum. Hasil dari kunjungan ini ditindaklanjuti dengan penerbitan sedikitnya 4.890 dokumen;
- Di kabupaten Bener Meriah, Aceh, sebanyak 397 mahasiswa membantu pendirian 40 pos gizi desa; dan
- Di kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, sebanyak 15 mahasiswa membantu pengembangan dan peluncuran situs web desa yang memiliki fitur *marketplace* daring untuk mempromosikan produk desa.

KOMPAK juga mendukung peluncuran *Platform* Inspirasi-UMD (<https://inspirasi-umd.id>). Dalam situs web ini, terdaftar 18 universitas dan 14 desa, dan masih ada lebih banyak lagi yang akan mendaftar. *Platform* ini memudahkan desa untuk mempublikasikan proyek pembangunan desa, sehingga universitas dan badan usaha dapat memperoleh informasi tersebut dan memberikan bantuan sukarela.

Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)

Strategi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) KOMPAK 2019-2022 menerapkan pendekatan jalur ganda (*twin-track*), yaitu inisiatif yang terfokus serta pengarusutamaan untuk mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Tim GESI dan tim *Performance* KOMPAK memberikan dukungan teknis kepada tim program dan tim provinsi untuk mengadopsi perspektif gender dan inklusi sosial dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dukungan diberikan untuk menggunakan pemahaman tentang perspektif gender dan inklusi sosial dalam perancangan, implementasi dan monitoring kegiatan.

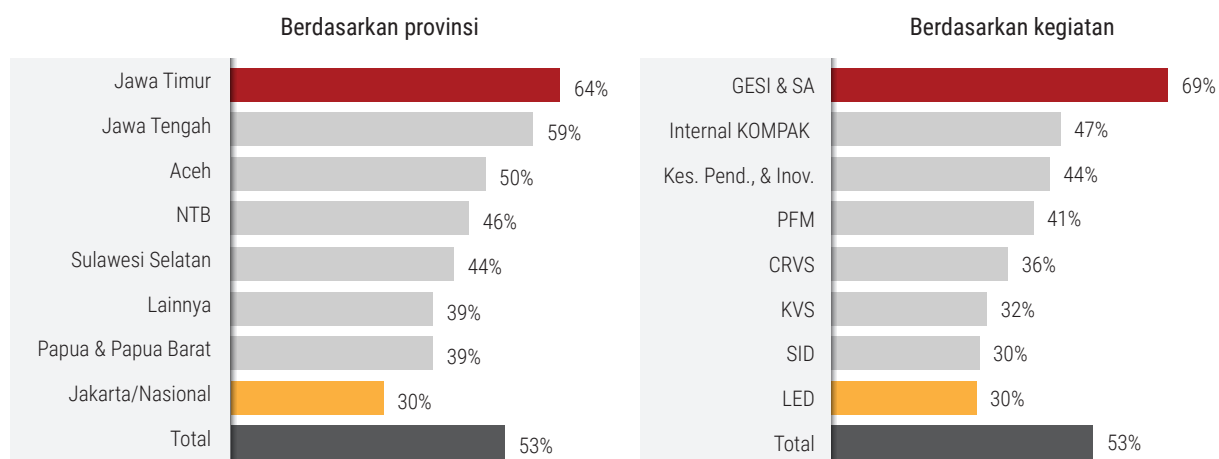
KOMPAK juga memiliki tujuan untuk membawa perubahan dalam kesetaraan gender di tingkat nasional melalui peningkatan kemitraan dengan program DFAT lainnya. Pada 2019, KOMPAK mengadakan sebuah studi tentang definisi orang-orang yang rentan dalam upaya penguatan administrasi kependudukan. Dalam melakukan studi yang dilaporkan kepada Bappenas ini, KOMPAK berkolaborasi dengan PEDULI, MAMPU dan organisasi masyarakat sipil. KOMPAK juga bermitra dengan lembaga-lembaga ini dalam penyusunan pedoman tentang akuntabilitas sosial dan pemberdayaan perempuan untuk Kemendesa PDTT.

ANALISIS KESENJANGAN DAN PELUANG KESETARAAN GENDER

Pada 2019, tim GESI melakukan tinjauan terhadap Musrenbang Inklusif (Musyawarah Khusus) dan Keperantaran Pasar yang diujicobakan KOMPAK. Tinjauan ini menghadirkan informasi penting yang berguna untuk merevisi pendekatan program, misalnya melatih fasilitator untuk mendorong peningkatan partisipasi kelompok rentan.

Tim performance juga meningkatkan kemampuan analitiknya, yang menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika GESI di wilayah sasaran KOMPAK dan menilai keluaran dan capaian berbasis gender dalam kegiatan program. Sistem informasi manajemen KOMPAK menunjukkan sekitar setengah peserta program adalah perempuan. Kegiatan terkait akuntabilitas sosial, yang secara dominan berfokus pada pemberdayaan dan partisipasi perempuan, memiliki tingkat perwakilan perempuan tertinggi. Pelatihan di tingkat nasional dan pelatihan pengembangan ekonomi lokal, yang sebagian besar diberikan untuk aparatur pemerintah, lebih banyak didominasi laki-laki.

Persentase peserta perempuan dalam pelatihan atau acara KOMPAK (n = 17.530)



(Sumber: SIM KOMPAK, Jan-Des 2019)

JALUR PERTAMA: PROGRAM KHUSUS GESI

Pada 2019, Inisiatif KOMPAK pada jalur pertama berfokus pada Akademi Paradigta dan program serupa, yaitu Sepeda Keren.

- Di kabupaten wilayah kerja KOMPAK, kepemimpinan dan partisipasi perempuan di tingkat desa masih rendah: hanya 14% anggota BPD dan aparatur pemerintah adalah perempuan. Akademi Paradigta dan Sepeda Keren dijalankan untuk membantu memperbaiki situasi ini, tetapi masih terlalu dini untuk mengidentifikasi perubahan karena data dasar dikumpulkan pertama kali pada Juni 2019.
- Sebanyak 249 perempuan dari desa telah lulus program 6-9 bulan Akademi Paradigta tentang pemerintahan desa dan pemberdayaan perempuan. Dari 2.330 alumni perempuan, 17% (398) menjabat sebagai anggota BPD atau aparatur pemerintah. Pelatihan-pelatihan ini juga didanai bersama oleh pemerintah desa, sehingga mempromosikan keberlanjutan inisiatif ini dan dukungan yang lebih besar dari desa.
- Sepeda Keren mengadopsi model serupa tetapi melibatkan kelompok rentan lainnya. Inisiatif ini didanai pemerintah Kabupaten Trenggalek dan diluncurkan pada Desember 2019 dengan dukungan teknis dari KOMPAK.

JALUR KEDUA: PENGARUSUTAMAAN GESI

Di jalur kedua, KOMPAK bersama pemerintah daerah telah berupaya untuk meningkatkan inklusivitas dan partisipasi aktif perempuan dalam proses perencanaan dan penganggaran, mengintegrasikan indikator GESI ke dalam peringkat pembiayaan berbasis kinerja desa, meningkatkan kualitas data di tingkat desa, dan meningkatkan kepemilikan cakupan identitas hukum untuk perempuan.

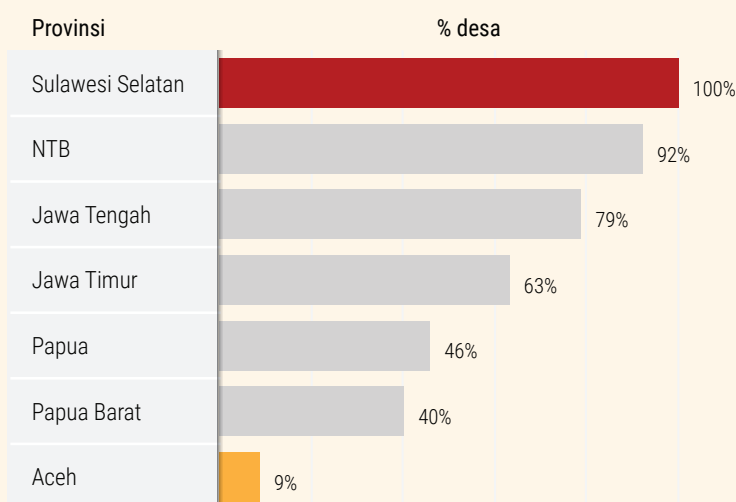
- Model Musrenbang Inklusif diujicobakan di tiga provinsi bersama Kemendesa PDTT untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan inklusivitas forum perencanaan daerah. KOMPAK bersama pemerintah provinsi dan kabupaten menyempurnakan model ini dan menyusun pedoman yang dapat diterapkan Kemendesa PDTT dan pemerintah daerah.
- KOMPAK sedang menguji coba Sekar Desa dan Posko Aspirasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama perempuan, dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada 2019, sebanyak 1.410 perempuan dari daerah pedesaan telah dilatih tentang tanggung jawab BPD, perencanaan dan penganggaran desa. Upaya ini dilengkapi dengan mekanisme untuk mengumpulkan aspirasi dan pengaduan masyarakat, dimana lebih dari 15.000 saran terkumpulkan. Banyak saran yang diajukan perempuan dan saran-saran dimasukkan ke dalam anggaran desa, misalnya program gizi untuk ibu yang kekurangan gizi dan kegiatan untuk menghasilkan pendapatan bagi perempuan. Lewat kolaborasi dengan MAMPU dan PEDULI, pembelajaran yang didapat dari uji coba kedua model ini digunakan sebagai informasi penyusunan pedoman nasional akuntabilitas sosial dan pedoman nasional pemberdayaan perempuan yang akan disampaikan kepada Kemendesa PDTT.
- Di enam kabupaten, KOMPAK menguji coba sistem peringkat kinerja desa yang dihubungkan dengan penyediaan dana insentif. KOMPAK telah memasukkan indikator gender, misalnya akses perempuan ke layanan dasar dan alokasi pendanaan desa untuk memperbesar peluang ekonomi perempuan. Sistem peringkat ini diperluas ke tingkat nasional tahun 2020 oleh Kementerian Keuangan.
- Melalui sistem informasi desa, KOMPAK memperkuat kapasitas pemerintah desa merencanakan dan memberikan layanan untuk perempuan dan kelompok rentan. Semua sistem mengumpulkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan sebagian besar desa menyajikan data tentang kemiskinan dan status pekerjaan, keanggotaan program perlindungan sosial, dan partisipasi pendidikan dan kesehatan. Ketersediaan data ini memungkinkan desa untuk mempertajam sasaran layanan bagi rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan dan kelompok yang kurang beruntung lainnya.
- Fasilitator PASH Desa telah dilibatkan di desa untuk melakukan penjangkauan layanan, terutama untuk perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok paling rentan. Melalui upaya ini, akta kelahiran dapat diterbitkan di desa, sehingga mengatasi hambatan bagi perempuan yang tidak bisa bepergian.

MEMBANGUN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN LOKAL

KOMPAK telah memperoleh wawasan yang lebih baik tentang kepemimpinan perempuan melalui Survei Desa. Provinsi Sulawesi Selatan dan NTB memiliki keterwakilan perempuan yang tinggi di tingkat desa; sementara Papua, Papua Barat, dan Aceh memiliki perwakilan terendah. Budaya patriarkal dan konservatisme agama (seperti Hukum Syariah di Aceh) merupakan hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dan menduduki jabatan senior di tingkat pemerintahan dan masyarakat setempat. KOMPAK bermitra dengan PUSKAPA, Seknas Fitra, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi perempuan sebagai aparatur pemerintah desa dan anggota BPD (khususnya melalui Akademi Paradigta), peserta forum perencanaan tahunan (melalui Musrenbang dan Musyawarah Khusus), dan warga yang lebih aktif (melalui Posko Aspirasi dan Sekar Desa)

Inisiatif untuk meningkatkan pemimpin perempuan paling dibutuhkan di Aceh, Papua, dan Papua Barat

Apakah ada setidaknya satu perempuan yang menjabat sebagai kepala, sekretaris, atau bendahara desa?



Seluruh desa (17 desa) di **Sulawesi Selatan** memiliki seorang perempuan yang menjabat sebagai pimpinan

Aceh masih tertinggal, hanya sedikit desa yang memiliki seorang perempuan yang menjabat sebagai pimpinan

(Sumber: Survei Desa KOMPAK, Des 2019)

Agenda Penelitian

Untuk tahap kegiatan KOMPAK berikutnya, ada kebutuhan yang semakin besar untuk menunjukkan hasil yang membuktikan efektivitas model yang diujicobakan dan bantuan teknis yang diberikan. Berbagai bukti dan hasil ini berguna bagi KOMPAK dan mitra dalam menyusun rencana dan keberlanjutan program, mengadvokasi pengembangan dan replikasi, dan membantu penyusunan dokumentasi untuk serah terima program kepada mitra pemerintah.

Agenda penelitian KOMPAK, ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Bappenas, didasarkan pada empat area fokus: (1) Menunjukkan kontribusi KOMPAK membantu pemerintah mengidentifikasi dan memecahkan masalah; (2) Membuktikan efektivitas kegiatan KOMPAK untuk mencapai hasil yang ditargetkan; (3) Mengkaji nilai tambah program KOMPAK dalam mendukung Pemerintah mencapai pengurangan kemiskinan (*vis-a-vis* program rutin); dan (4) Menganalisis dan memberikan pengetahuan atau informasi tentang lingkungan sosial ekonomi di wilayah kerja KOMPAK. Agenda penelitian ini merupakan dokumen yang dapat terus diperbarui sejalan dengan kerja tim secara kolaboratif dengan unit lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang timbul.

Pada 2019, KOMPAK telah menyelesaikan dua laporan dan sedang melakukan tujuh kajian. Kajian lainnya yang telah direncanakan juga tercantum di bawah ini, selain bantuan teknis yang sedang berlangsung dan dukungan analisis yang diberikan oleh tim KOMPAK

DAFTAR PENELITIAN DAN KAJIAN EVALUASI

Selesai tahun 2019*

<p>Layanan Kesehatan di Daerah Pulau Terpencil (Studi Kelayakan Drone)</p>	<p>Tujuan: Mengidentifikasi faktor penting dan tantangan yang terkait dengan penggunaan drone untuk pengiriman vaksin, darah dan obat-obatan esensial di Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>Metode Utama: Studi kelayakan, kuantitatif (analisis biaya dan manfaat).</p> <p>Ruang Lingkup: Sulawesi Selatan.</p>
<p>BANGGA Papua Studi Kelayakan Blockchain</p>	<p>Tujuan: Mengidentifikasi teknologi untuk mendukung bantuan langsung tunai dan penyimpanan data untuk Program BANGGA Papua dan merekomendasikan solusi berbasis teknologi untuk pemangku kepentingan (pemerintah provinsi), termasuk <i>blockchain</i> dan pendekatan lain</p> <p>Metode Utama: Kajian literatur, wawancara mendalam, dan observasi</p> <p>Ruang Lingkup: Asmat, Papua.</p>

*Studi tersedia jika diminta. Sedang menunggu persetujuan akhir dari Bappenas.

Masih berlangsung

<p>Studi Midline PASH Ags 2019 – Apr 2020</p>	<p>Tujuan: (i) Menilai perubahan terkait PASH periode 2015-2019 dan apakah perubahan ini selaras dengan capaian yang diharapkan; (ii) Meninjau kontribusi, jika ada, intervensi atau kegiatan KOMPAK terhadap perubahan tersebut; (iii) Mengkaji tingkat layanan dan keterhubungan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan PASH; dan (iv) Mendalami peluang dan tantangan dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan serta penguatan desa, transparansi anggaran, dan akuntabilitas sosial untuk mendukung PASH.</p> <p>Metode Utama: Kuantitatif, dilengkapi kualitatif untuk memahami proses dan peran KOMPAK/mitra.</p> <p>Ruang Lingkup: 5 provinsi, 10 kabupaten.</p>
<p>PASH untuk kelompok rentan “Menjangkau Kelompok Rentan: Membangun PASH Inklusif dan Akuntabel” Sept 2019 – Jun 2020</p>	<p>Tujuan: (i) Mengidentifikasi tantangan kelompok rentan dalam memperoleh dokumen identitas hukum; dan (ii) Apa yang dapat dilakukan agar sistem lebih inklusif.</p> <p>Metode Utama: <i>Desk-review</i> dan analisis kerangka regulasi, dan kualitatif melalui FGD.</p> <p>Ruang Lingkup: Semua wilayah kerja KOMPAK secara umum.</p>
<p>PASH untuk Masyarakat Pascabencana Sept 2019 – Jun 2020</p>	<p>Tujuan: Meninjau proses PASH dalam situasi darurat.</p> <p>Metode Utama: Kualitatif melalui FGD, wawancara mendalam, dan <i>desk-review</i>.</p> <p>Ruang Lingkup: Sulawesi Tengah dan NTB.</p>
<p>Tinjauan Pengeluaran Anggaran Desa Sept 2019 – Des 2020</p>	<p>Tujuan: (i) Menganalisis pengeluaran desa wilayah kerja KOMPAK untuk menilai apakah terdapat peningkatan alokasi anggaran untuk layanan dasar (pendidikan dan kesehatan); dan (ii) Meninjau faktor-faktor yang memberikan pengaruh dan insentif terhadap perubahan pola pengeluaran anggaran di tingkat desa</p> <p>Metode Utama: Analisis kuantitatif terhadap anggaran desa dan peraturan kabupaten terkait.</p> <p>Ruang Lingkup: Semua desa KOMPAK.</p>
<p>Akademi Paradigma Analisis Pelatihan Kepemimpinan Perempuan (PEKKA) Jul 2019 – Mar 2020</p>	<p>Tujuan: (i) Mengumpulkan dan menganalisis praktik baik dari implementasi PEKKA oleh Akademi Paradigma; (ii) Mengidentifikasi peluang untuk mempercepat implementasi Akademi Paradigma di wilayah kerja KOMPAK (Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTB); dan (iii) Memberikan masukan kepada Kemendesa PDTT.</p> <p>Metode Utama: Kualitatif melalui <i>desk-review</i> dokumen proyek dan peraturan, FGD dan wawancara mendalam.</p> <p>Ruang Lingkup: Brebes (Jawa Tengah) dan Lombok (NTB).</p>

<p>Evaluasi Inisiatif UMD di Aceh, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan</p> <p>Nov 2019 – Feb 2020</p>	<p>Tujuan: Membahas persoalan apakah model UMD KOMPAK (i) efektif menghubungkan universitas dan mahasiswa dengan desa dan proyek pembangunan; dan (ii) efisien untuk mengatasi masalah pembangunan.</p> <p>Metode Utama: Kualitatif melalui <i>desk-review</i> dokumen proyek, wawancara mendalam dan analisis nilai atas investasi yang diberikan (VFM).</p> <p>Ruang Lingkup: Universitas uji coba UMD terpilih di Aceh, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.</p>
<p>Penilaian Pra-Musrenbang Inklusif dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa</p> <p>Sept 2019 – Jun 2020</p>	<p>Tujuan: (i) Memahami perbedaan dalam implementasi Forum Perencanaan Pembangunan Desa inklusif (musrenbang) (ii) Menilai sejauh mana kebijakan dan peraturan mendukung prosedur pelaksanaan musrenbang inklusif; (iii) Menilai peran pemangku kepentingan (pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perempuan, dan kelompok rentan yang terlibat dalam musrenbang inklusif); (iv) Menilai sejauh mana implementasi musrenbang mampu meningkatkan prioritas anggaran dan kegiatan bagi perempuan dan kelompok rentan; dan (v) Menilai apakah musrenbang inklusif meningkatkan kepemimpinan perempuan di tingkat daerah.</p> <p>Metode Utama: Kualitatif.</p> <p>Ruang Lingkup: Pacitan dan Trenggalek, Jawa Timur.</p>

Direncanakan untuk Tahun 2020

<p>Penguatan Sistem Informasi Desa untuk Pembangunan Inklusif</p> <p>Feb – Jun 2020</p>	<p>Tujuan: Memahami apakah sistem informasi desa mampu mempromosikan pembangunan inklusif. Dengan demikian, laporan peninjauan cepat ini akan digunakan sebagai dasar penguatan/ pengembangan sistem informasi desa.</p> <p>Metode Utama: Kualitatif.</p> <p>Ruang Lingkup: 5 provinsi, masing-masing 2 kabupaten.</p>
<p>Evaluasi Peran Kecamatan dalam Penguatan Tata Kelola Desa (Tinjauan terhadap PTPD)</p> <p>Feb – Jun 2020</p>	<p>Tujuan: (i) Mendokumentasikan proses dan hasil PTPD; (ii) Memahami PTPD yang berfungsi dengan baik dan faktor/elemen utama pendukung fungsi PTPD; dan (iii) Mengumpulkan pembelajaran untuk replikasi/pengembangan.</p> <p>Metode Utama: Kualitatif (wawancara mendalam), analisis data proyek.</p> <p>Ruang Lingkup: Semua kabupaten untuk dokumentasi, kabupaten terpilih (dua atau tiga) untuk analisis terperinci.</p>

<p>Penilaian Cepat Penggunaan Instrumen PFM</p> <p>Mar – Jun 2020</p>	<p>Tujuan: Mengkaji dan meninjau penggunaan instrumen PFM kabupaten: (i) Mengidentifikasi instrumen PFM yang tersedia di pemerintah kabupaten; (ii) meninjau pemahaman pemerintah kabupaten tentang fungsi instrumen PFM; (iii) Mengkaji bagaimana instrumen PFM digunakan pemerintah kabupaten; dan (iv) Mengidentifikasi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi PFM untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang lebih baik.</p> <p>Metode Utama: Kualitatif, analisis sederhana terhadap data perencanaan dan penganggaran kabupaten, wawancara</p> <p>Ruang Lingkup: 1-2 kabupaten terpilih.</p>
<p>Indikator Dampak Keperantaraan Pasar (Evaluasi PEL)</p> <p>Jan – Jun 2020</p>	<p>Tujuan: (i) Menganalisis model usaha pendekatan PEL KOMPAK; (ii) Membuka jalan untuk pengembangan; dan (iii) Mengukur kemungkinan dampak selain indikator moneter.</p> <p>Metode Utama: Campuran.</p> <p>Ruang Lingkup: 2 kegiatan PEL KOMPAK, kemungkinan di Jawa Tengah</p>



LAPORAN KEUANGAN



Laporan Keuangan

Total pengeluaran KOMPAK dari Januari hingga Desember 2019 tercatat sebesar \$20,5 juta (tidak termasuk biaya manajemen). Dari pengeluaran tersebut, sebanyak 49% adalah untuk biaya kegiatan, 40% untuk biaya personel, dan 11% untuk biaya operasional. KOMPAK ingin mempertahankan pembagian pengeluaran sebesar 50% untuk biaya kegiatan dan sisanya untuk biaya personel dan operasional.

Pengeluaran tingkat daerah mencapai 38% total pengeluaran. Pengeluaran tingkat nasional lebih besar untuk personel, terutama tim *Executive* dan *Performance* serta tenaga ahli dalam tim Implementasi untuk memberikan dukungan teknis kepada mitra di tingkat daerah dan pusat (tetapi berkantor di Jakarta). Investasi tingkat daerah terbesar berada di Papua (\$2,4 juta) sebagian besar melalui Program LANDASAN dan mitra hibah BaKTI. Investasi di provinsi lain berkisar antara \$700 ribu hingga \$1,2 juta tahun ini.

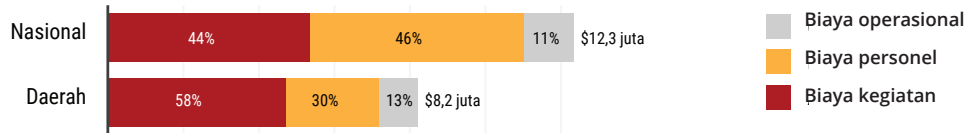
Pengeluaran kegiatan (\$10,1 juta), sebagian besar adalah untuk Kegiatan Unggulan (68%) dan sisanya untuk kegiatan *cross-cutting* atau kegiatan non-unggulan dan dukungan program. Pengelolaan keuangan publik masih menjadi investasi KOMPAK terbesar, yang diikuti dengan akuntabilitas sosial, PASH, dan penguatan kecamatan dan desa.

Total pengeluaran

\$20.525.406

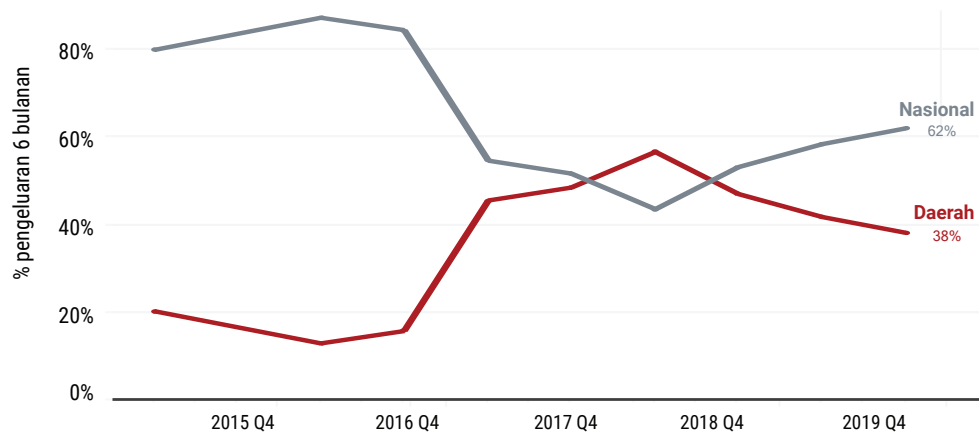
Pengeluaran tingkat nasional (Jan-Des 2019)

(total = \$20,5 juta)



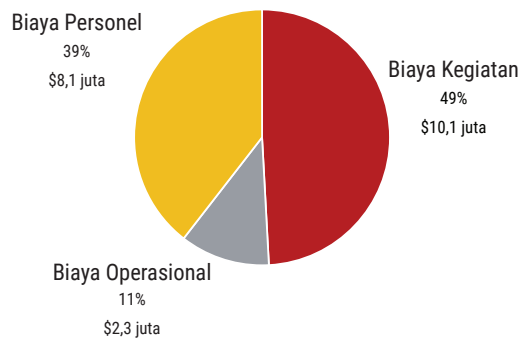
Persentase pengeluaran tingkat nasional dan daerah (2015-2019)

(total = \$20.5M)



Persentase biaya, berdasarkan jenis biaya (Jan-Des 2019)

(total = \$20,5 juta)



(Sumber: Sistem Keuangan KOMPAK, Des 2019)

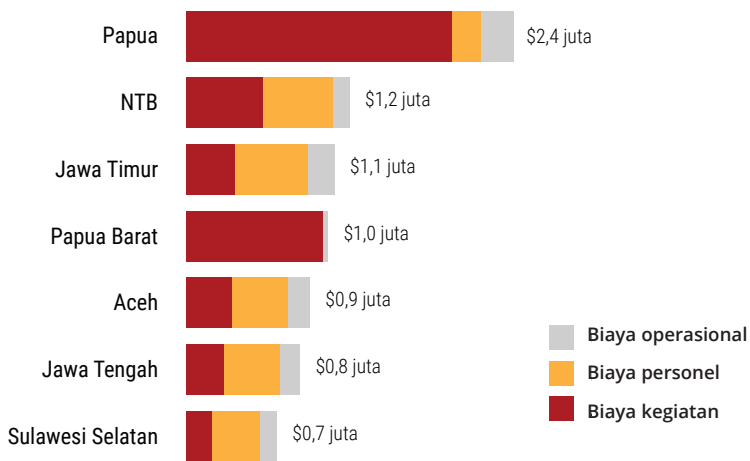
Total Biaya Kegiatan berdasarkan tema (Jan-Des 2019)

(total = \$10,1 juta)

Unggulan	Pengelolaan keuangan publik (PFM)	Instrumen PFM	Otsus	MSS	DAK & DID	\$1,9 juta
	Akuntabilitas sosial					\$1,6 juta
	PASH					\$1,6 juta
	Penguatan kecamatan dan desa					\$1,3 juta
	Pengembangan ekonomi lokal	\$0,3 juta				
	Sistem informasi desa	\$0,2 juta				
Saling terkait	Kesehatan					\$0,7 juta
	Pendidikan	\$0,4 juta				
	Inovasi	\$0,1 juta				
	GESI	\$0,0 juta				
Dukungan program	Komunikasi dan relasi media					\$0,5 juta
	Tata kelola program					\$0,5 juta
	Penelitian dan evaluasi					\$0,4 juta
	Kinerja dan analisis					\$0,3 juta
	Lainnya					\$0,2 juta

Pengeluaran di daerah (Jan-Des 2019)

(total = \$8,2 juta)



(Sumber: Sistem Keuangan KOMPAK, Des 2019)

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*